

Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Indonesia 2010 - 2014

Departemen Kajian Strategis
Badan Eksekutif Mahasiswa FE UI



Simposium Ekonomi Nasional 2009
Indonesian Student Initiative - Indonesian Development Goals

TEMA : KEDAULATAN PANGAN

BUKU SIMPOSIUM EKONOMI NASIONAL
TEMA : KEDAULATAN PANGAN

Oleh

M. Alfatih Timur
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
(Anggota Tim Perumus Simposium Ekonomi Nasional)

Andriyan W
Perencanaan wilayah dan kota Universitas Gajah Mada
(Finalis lomba paper Simposium Ekonomi Nasional)

Alfia Oktivalerina
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
(Finalis lomba paper Simposium Ekonomi Nasional)

Isnurdiansyah
Fakultas Ekonomi Manajemen Institut Pertanian Bogor
(Finalis lomba paper Simposium Ekonomi Nasional)

Ellen Hutagaol, Fariz dan Marissa malahayati
Fakultas ekonomi manajemen Institut Pertanian Bogor
(Delegasi Institut pertanian bogor)

Dari sabang sampai merauke dari mianggas sampai pulau rote terhampar luas bumi ibu pertiwi yang subur lagi makmur. Digelari jamrud khatulistiwa bangsa ini dianugerahi sinar matahari yang konsisten menampakkan cahayanya di setiap hari, diberbagai tempat terbentanglah tanah-tanah subur yang dapat ditanami berbagai varietas tumbuhan dan pangan, masih teringat bagi kita bait lagu yang didendangkan koes plus “tongkat,kayu dan batu pun jadi tanaman” ini merupakan refleksi betapa kaya negri ini, betapa dianugerahinya bangsa ini, dan betapa layak bagi kita untuk mensyukurinya.

Kedaulatan pangan dalam konteks kemampuan produksi dalam negri, tentunya merupakan cita-cita besar bangsa Indonesia, namun dalam proses perwujudannya harus melalui sebuah fase, sebelum predikat berdaulat disandang bangsa ini, yaitu fase ketahanan pangan yang berarti jaminan pada setiap elemen masyarakat untuk bisa mengakses pangan secara simultan

Indonesia memiliki potensi, tidak hanya untuk berswasembada (yang masih menyisakan peluang impor 10 persen), namun juga untuk mencapai surplus pangan. Kita dianugerahi keanekaragaman sumber pangan yang sangat melimpah ruah: 100 spesies tumbuhan sumber karbohidrat, 100 species kacang-kacangan, 450 spesies buah-buahan, serta 250 spesies sayur-sayuran, harta pemberian ini seharusnya dapat dioptimalisasi untuk menciptakan ketahanan pangan dalam proses pewujudan kedaulatan pangan.

Berbicara ketahanan pangan, tidak akan luput dari perkembangan sektor pertanian, kondisi saat ini perekonomian Indonesia yang notabene merupakan negara berkembang tentu saja masih disokong oleh sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan maupun pertanian perkebunan.

Tabel 3.2
Share Komoditas Pertanian terhadap PDB (2004 -2008)
Atas Dasar Harga Konstan 2000 (milyar rupiah)

Komoditas	2004	2005	2006	2007**	2008***
Tanaman Pangan	122.611,7	125.801,8	129.548,6	133.888,5	141.800,2
Tanaman Perkebunan	38.849,3	39.810,9	41.318,0	43.135,6	44.792,6
Total GDP	1.656.516,8	1.750.815,2	1.847.126,7	1.963.091,8	2.082.103, 7
%dari GDP total	9,74%	9,46%	8,925%	9,02%	8,96%

Sumber : Badan Pusat Statistik (dari beberapa tahun)

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa meskipun dari sisi kuantitas terdapat peningkatan output dari sektor pertanian pada setiap tahunnya, namun rasio terhadap total PDB sebenarnya mengalami penurunan. Berkurangnya *share* dari sektor pertanian terhadap PDB ini sesuai dengan teori mengenai transformasi struktural suatu negara. Teori tersebut menyatakan bahwa seiring terjadinya pembangunan perekonomian pada suatu negara, maka *share* dari sektor pertanian terhadap PDB akan berkurang (bukan dari segi jumlah output sebab mungkin terjadi peningkatan jumlah output) karena adanya peningkatan *share* dari sektor industri dan jasa terhadap PDB. Sesuai teori tersebut, dengan semakin majunya perekonomian suatu negara maka sektor andalan akan bergeser dari sektor pertanian, industri hingga jasa.

Saat ini, pertumbuhan pertanian di Indonesia cenderung lamban, bahkan stagnan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa sifat proses produksi sektor pertanian yang lamban dan kurang dinamis dalam menanggapi perubahan-perubahan pasaran yang membuka kesempatan

pengembangan baru serta inovasi teknologi modern untuk menekan biaya produksi. Sifat lamban dan kurang dinamis sektor pertanian dibanding dengan sektor jasa disebabkan karena (a) ketergantungan sektor pertanian akan iklim yang tidak bisa dikendalikan membuat produsen pertanian bersifat hati-hati dan konservatif dalam menanggapi inovasi teknologi dan kesempatan pengembangan baru, (b) proses biologi yang mendasari produk pertanian memakan waktu relatif lebih lama daripada proses-proses produksi di sektor industri dan jasa. Selain itu tentunya faktor-faktor yang menjadi masalah dalam pertumbuhan sektor pertanian yang menyokong ketahanan pangan antara lain, pendanaan, infrastruktur, lahan, diversifikasi, dll yang akan dibahas selanjutnya.

Dibawah ini ada tujuh poin rekomendasi berbentuk petisi yang akan dibahas sebagai sebuah solusi yang lahir dari rahim pemikiran mahasiswa. Ketujuh poin ini menyentuh berbagai aspek yang menjadi *key succes factors* dalam menciptakan ketahanan pangan dalam tinjauan sektor pertanian.

1. Mewujudkan Reformasi Agraria

Reformasi agraria menjadi suatu hal yang sangat penting dan mendesak, karena persoalan yang terjadi bukan hanya semakin menyempitnya lahan pertanian secara agregat, tetapi juga semakin besarnya jumlah petani yang memiliki lahan teramat sempit atau petani gurem, yang jauh dari skala ekonomi, yakni luas lahan per petani adalah 0,13 hektare (Suryana dan Kariyasa, 2008).

Modernisasi pertanian telah menimbulkan gejala marjinalisasi suatu kelompok berupa 'guremisasi petani', yang juga dikatakan sebagai *modernization without development* (Sajogyo, 1982). Pangkal penyebab guremisasi tersebut adalah biaya intensifikasi yang tinggi sehingga hanya petani kaya (dengan lahan yang luas) yang mampu mendanainya pada *economies of scale*. Petani miskin dengan lahan kecil kemudian akan mengalihkan penguasaan sebagian atau seluruh lahannya kepada petani besar, baik secara temporer maupun permanen, karena tidak mampu membiayai program intensifikasi yang bersifat 'komando' tersebut dengan keterbatasan dana (Tjondronegoro, 1994, Wiradi dan Makali, 1984). Proses guremisasi ini diperparah dengan industrialisasi yang bersifat eksklusif yang mendorong konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri atau pemukiman (PKA IPB,

2004). Jika dianalisis berdasarkan pendekatan sosial-budaya, diketahui bahwa sistem ini masih berlaku karena di Indonesia tradisi kepemilikan tanah warisan masih kental.

Reformasi agraria sebenarnya sudah dicanangkan sejak tahun 1960 dengan dikeluarkannya UU No. 5 tahun 1960. Namun, kebijakan tersebut belum memberikan hasil yang signifikan. menurut hasil pendataan usaha tani yang dilakukan oleh BPS 2009, sebanyak 63% petani di Indonesia merupakan petani gurem yang kepemilikan lahannya kurang 0,25 Ha. Minimnya lahan akan berpengaruh langsung terhadap jumlah hasil pertanian dan kesejahteraan petani.

Namun salah satu yang penting juga adalah penambahan jumlah lahan saja tidak serta merta dapat mensejahterakan petani karena lahan dikuasai segelintir orang saja, sebagai contoh adalah data statistik dari pertanian padi dibawah

**Perkembangan luas areal, produktivitas dan produksi padi di Indonesia
(2005 – 2009)**

Tahun	Luas panen (Ha)	Produktivitas (Qu / Ha)	Produksi (Ton)
2005	11.839.060	45,74	54,151,097
2006	11.786.430	46,20	54.454.937
2007	12.147.637	47,05	57.157.435
2008	12.327.425	48,94	60.325.925
2009*	12.668.989	49,38	62.561.146

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel 3.3, tampak bahwa baik luas areal, produktivitas dan jumlah produksi padi di Indonesia meningkat setiap tahunnya sejak tahun 2005 hingga 2009. Meskipun begitu, ini tidak mengindikasikan membaiknya kondisi pertanian padi di Indonesia. Pasaunya, aspek yang seharusnya mendapatkan perhatian juga adalah NTP (nilai tukar petani) yang memperlihatkan kondisi sebenarnya petani.

Salah satu indikator kerugian petani dapat dilihat dari NTP (Nilai Tukar Petani) yang berfluktuasi. NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (IT), yang menunjukkan fluktuasi harga komoditas pertanian yang dihasilkan, terhadap indeks harga yang dibayar petani (IB), yang menunjukkan fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat pedesaan serta fluktuasi harga barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator dari tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan sekaligus indikator tingkat kesejahteraan petani. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi nilai NTP, maka semakin kuat tingkat kemampuan atau daya beli petani. Penurunan NTP umumnya terjadi ketika panen tanaman pangan ataupun tanaman perkebunan rakyat. Selain itu, fluktuasi harga komoditas konsumsi rumah tangga dan biaya produksi serta penambahan barang juga mempengaruhi tinggi rendahnya NTP.

Nilai Tukar Petani (Tahun 2008)

Bulan(Tahun 2008)	Indeks Harga yang diterima petani			Indeks Harga yang dibayar petani			Nilai Tukar Petani
	Padi	Palawija	Total	Kons. Rmh Tangga*	Indeks BPPBM*	Total	
Januari	105,34	108,53	106,53	106,27	104,83	105,97	100,52
Februari	104,46	108,48	105,89	107,39	105,80	107,07	98,90
Maret	98,75	106,77	101,44	108,54	106,52	108,13	93,82
April	97,32	109,16	101,24	109,13	107,37	108,77	93,08
Mei	101,41	111,81	104,95	110,41	108,60	110,04	95,38
Juni	106,31	116,72	109,92	113,56	111,63	113,16	97,14
Juli	107,15	122,24	112,71	115,50	112,65	114,92	98,08
Agustus	108,10	124,56	114,17	116,15	113,19	115,54	98,81
September	108,76	125,64	114,80	117,09	113,75	116,41	98,62
Oktober	109,39	123,36	114,28	117,75	114,29	117,05	97,64
% Perubahan	0,59	-1,81	-0,45	0,54	0,56	0,47	-0,99

Sumber: Badan Pusat Statistik (dengan perubahan)

Keterangan:

- Indeks Konsumsi Rumah Tangga (Household consumption index) mencakup bahan makanan, makanan jadi, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan (termasuk rekreasi & olahraga), serta transportasi & komunikasi.
- Indeks BPPBM (Cost of production and capital formation index) mencakup obat-obatan & pupuk, transportasi & komunikasi, sewa lahan, pajak & lainnya, penambahan barang modal, serta upah buruh tani.
- Nilai tukar petani dihitung berdasarkan rumus
$$= \frac{IT \times 100\%}{IB}$$
 - IT = indeks harga yang diterima petani
 - IB = indeks harga yang dibayar petani

Tabel 3.4 tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2008 walaupun terjadi peningkatan dalam indeks harga yang diterima oleh petani, tetapi peningkatan tersebut tidak setinggi harga yang harus dibayarkan oleh petani (untuk rumah tangga dan biaya produksi). Akibatnya, nilai tukar petani sebenarnya, semakin berkurang yang secara otomatis mengindikasikan berkurangnya kesejahteraan petani tersebut. Angka % perubahan juga memperlihatkan bahwa perubahan indeks harga yang diterima petani berkurang sebesar -0,59 (untuk petani padi sebesar 0,59) sementara indeks harga yang harus dibayar berubah meningkat sebesar 0,47 sehingga secara keseluruhan nilai tukar petani berubah sebesar -0,99. Yang berarti kesejahteraan petani akan semakin buruk.

Untuk itulah reformasi Agraria muncul sebagai solusi berbentuk pemerataan distribusi kepemilikan tanah / land sharing untuk menurunkan disparitas dan meningkatkan kesejahteraan petani, yang mayoritasnya merupakan buruh tani yang tidak memiliki lahan. Reformasi agraria bertujuan untuk mengurangi jumlah petani gurem, menciptakan sistem kepemilikan lahan yang adil bagi petani, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan yang ada untuk kegiatan produktif, meningkatkan hasil produksi pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani dan merapihkan sistem administrasi pertanahan dengan mengurangi monopoli kepemilikan dan spekulasi lahan.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh adalah

- a. Menetapkan pajak lahan yang progresif terhadap jumlah lahan yang menganggur, artinya semakin luas lahan yang menganggur, semakin tinggi juga pajak yang harus dibebankan terhadap pemilik lahan.
- b. Realisasi program pendistribusian lahan gratis kepada petani gurem, yaitu: Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAM).

Sebagai penyempurnaan terhadap Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAM), pendistribusian lahan terhadap petani sebaiknya dilakukan secara simultan dengan sistem kredit bunga lunak.

2. Menjadikan desa sebagai fokus pembangunan

Pemerintah harus menjadi agen pembangunan yang aktif, baik secara langsung maupun tidak. Adapun pembangunan yang dimaksud dalam konteks ini mencakup pembangunan dalam bentuk material dan non-material.

Pembangunan material dilakukan dengan membangun fasilitas pertanian terkait dari tahap *on-farm* hingga *off-farm* (pasca pertanian). Pembangunan dalam segi material berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan sektor pertanian, contohnya di Taiwan, pada masa Presiden Lee, pemerintah Taiwan melakukan pembangunan besar-besaran infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, listrik, air bersih, dan telekomunikasi telah mampu menjadi penghubung yang paling efisien dalam aktivitas ekonomi di negara tersebut. Secara teori, intensifikasi pertanian yang didukung pembangunan infrastruktur ekonomi seperti ini akan menghasilkan dampak ganda pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Untuk itu fokus pembangunan di desa dalam segi pemenuhan fasilitas fisik / pembangunan material harus menyentuh berbagai bidang, yaitu perbaikan Irigasi, jalan raya untuk meningkatkan aksesibilitas, dan komunikasi (dalam proses pemasaran produk)

Sedangkan pembangunan non-material: yakni penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya masyarakat desa (human capital). Proses tersebut dapat dicapai melalui implementasi program pelatihan, penyuluhan, hingga pembangunan lembaga-lembaga pendidikan formal sejak jenjang pendidikan dasar hingga tinggi. Pembangunan non-material lainnya adalah pembangunan lembaga desa yang multifungsi. Lembaga ini dapat berfungsi sebagai intermediasi antara petani dengan pemilik dana (seperti bank, blockgrant pemerintah ataupun dana CSR dan kredit perusahaan swasta).

Selain masalah kredit, lembaga ini juga harus dapat menjadi fasilitator yang membantu masalah distribusi agar petani dapat mengoptimalkan pemasarannya dan mendapatkan harga yang layak. Lembaga ini juga akan membantu pemerintah dalam mengumpulkan data produksi pertanian dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi (karena menyentuh hingga unit-unit terkecil dalam sistem pertanian, seperti petani berlahan sempit). Lembaga ini pula yang akan menjadi mediasi antara pemerintah daerah dan petani agar kebijakan pemerintah dapat benar-benar mencapai targetnya. Lembaga yang membantu dalam hal modal usaha dan proses distribusi sangat krusial karena kedua hal tersebut

memiliki korelasi secara langsung dengan tingkat kesejahteraan petani (melalui fungsi pendapatan).

3. Menggalakkan diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal

Komoditas tanaman pangan terdiri dari dua bagian besar, yaitu : padi-padian (*cereals*) dan umbi-umbian (*tubers*). Beras, jagung, sorgum, kedelai, sagu, kacang hijau dan gandum termasuk ke dalam padi-padian. Sedangkan ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah termasuk ke dalam umbi-umbian. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi padi-padian untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat. Beras, gandum dan jagung merupakan komoditas pangan yang memiliki kandungan karbohidrat cukup tinggi dibandingkan komoditas tanaman pangan lain. Komoditas beras memiliki kandungan karbohidrat tertinggi (Tabel 3).

Tabel 3. Komposisi Nutrisi Komoditas Serealia per 100 gram

Nutrisi	Gandum	Sorgum	Jagung	Beras
Karbohidrat (g)	74,1	73,0	72,4	78,9
Protein (g)	11,8	11,0	10,0	6,8
Lemak (g)	1,2	73,0	10,0	6,8
Kalori (g)	-	332,0	361,0	360,0
Vitamin B1 (mg)	-	0,4	2,3	-
Serat	0,4	-	2,3	-
Air	12,0	-	13,5	-

Sumber : Ditjen Tanaman Pangan, Direktorat Budidaya Serealia (2007)

Diversifikasi pangan dapat diartikan sebagai pergeseran konsumsi sumberdaya komoditas pangan tertentu kepada komoditas pangan lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan alternatif pilihan komoditas pangan menjadi lebih beragam, seperti komoditas padi kepada jagung, ubi jalar, atau ubi kayu. Kemandirian pangan pun akan tercipta di seluruh pelosok daerah karena setiap masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pangan tanpa adanya ketergantungan terhadap pihak asing. Diversifikasi pangan yang digalakkan harus diawasi dengan baik karena pergeseran ini berpotensi meningkatkan konsumsi terigu (gandum) di dalam negeri dengan berbagai produk olahannya, seperti kue, mie, dan biskuit. Kecenderungan masyarakat terhadap komoditas cepat saji (*instan*), terutama kaum muda, merupakan penyebab utama meningkatnya konsumsi terigu di Indonesia. Sebenarnya, permasalahan ini pun dapat diselesaikan jika pemerintah bekerjasama dengan *stakeholders* lainnya menekuni pengembangan agribisnis gandum lokal yang cukup adaptif di Indonesia.

Pelaksanaan diversifikasi pangan harus dimulai dari pihak pemerintah untuk memberikan sebuah kebijakan yang tepat dan akurat. Sebagai langkah awal, media massa pun dapat menjadi partner yang baik dalam perubahan citra pola makan masyarakat non-beras, bukan menganggap masyarakat yang mengkonsumsi komoditas non-beras (ubi jalar, ubi kaya, singkong, dll) sebagai masyarakat yang memiliki kerawanan pangan.

Contoh dari potensi pemanfaatan sumber daya lokal dengan semangat diversifikasi pangan adalah pemanfaatan gandum.

Besarnya kontribusi PDB subsektor tanaman pangan terhadap sektor pertanian Indonesia tidak didukung dengan kontribusi komoditas gandum. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat impor komoditas gandum yang digunakan di dalam negeri. Indonesia merupakan negara pengimpor gandum keempat terbesar di dunia setelah Mesir, Brazil, dan Algeria (Tabel 4).

Tabel 4. Negara Pengimpor Gandum Terbesar Tahun 2005-2009 (Ribu Ton)

No	Negara Pengimpor	Tahun			
		2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009
1	Mesir	7.771	7.300	7.700	7.800
2	Brazil	6.576	7.624	7.000	7.000
3	Algeria	5.469	4.879	5.887	5.600
4	Indonesia	4.981	5.572	5.215	5.600
5	Jepang	5.469	5.747	5.701	5.500
Gandum Dunia		110.745	113.247	112.116	120.832

Sumber: USDA, diolah (2008)

Impor gandum ke Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Permintaan gandum dalam negeri mencapai 4,9 juta ton pada tahun 2008 dari 4,5 juta ton pada tahun 2003. Impor gandum yang dilakukan pemerintah Indonesia dapat mengurangi cadangan devisa negara (Tabel 5).

Tabel 5. Perkembangan Impor Gandum Tahun 2003-2008

No	Tahun	Volume (Ton)	Nilai (US\$)	Konsumsi/ kapita/ tahun (kg)
1	2003	4.500.000	650.565.000	15,0
2	2004	4.400.000	636.108.000	15,0
3	2005	4.519.000	655.954.000	15,0
4	2006	4.640.000	676.420.000	17,0
5	2007	4.770.000	697.524.000	17,1
6	2008	4.900.000	697.546.000	17,1

Sumber : Ditjen Tanaman Pangan, Direktorat Budidaya Serealia (2008)

Gandum merupakan biji-bijian yang cukup banyak memiliki kandungan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Gandum merupakan pangan pokok bagi sebagian besar penduduk dunia. Selain itu, gandum juga dapat mendukung ketahanan pangan dan diversifikasi pangan. Pengembangan komoditas ini berpeluang cukup besar karena sudah dikenal masyarakat dalam bentuk terigu.

Permintaan komoditas gandum dunia terus meningkat, sedangkan produksi gandum dunia berfluktuasi (Tabel 6). Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan antara permintaan dan penawaran yang berimplikasi pada peningkatan harga gandum di pasar internasional dan pengurangan kuota ekspor yang dilakukan oleh negara-negara produsen gandum. Indonesia akan mengalami kelebihan permintaan (*excess demand*) di pasar domestik sehingga memperoleh gandum dengan harga impor cukup tinggi yang dapat menurunkan kesejahteraan konsumen dengan peningkatan harga jual produk olahan gandum.

Tabel 6. Produksi dan Pemakaian Gandum Dunia Tahun 2003-2008

No	Tahun	Produksi (MMT)*	Pemakaian (MMT)	Defisit (MMT)
1	2003/ 2004	554	585	(31)
2	2004/ 2005	625	615	10
3	2005/ 2006	621	624	(3)
4	2006/ 2007	593	616	(23)
5	2007/ 2008	604	619	(15)

Sumber : Ditjen Tanaman Pangan, Direktorat Budidaya Serealia (2008)

Keterangan : *) *Milion Matrick Tons*

Produksi gandum dunia selama lima tahun terakhir ini rata-rata sebesar 599,4 MMT/tahun. Nilai produksi tersebut lebih rendah dibandingkan pemakaian yang terus meningkat, yaitu rata-rata sebesar 611,8 MMT/tahun. Beberapa tahun ke depan ketergantungan Indonesia terhadap terigu impor akan menjadi masalah yang sulit untuk dipecahkan. Ketergantungan suatu komoditas terhadap negara lain dapat menimbulkan instabilitas sosial dan ekonomi bagi suatu negara sehingga peluang pengembangan gandum lokal cukup besar.

Banyak lahan yang sesuai dengan syarat pertumbuhan gandum di Indonesia tetapi lahan tersebut belum dapat dimanfaatkan dengan baik. Lahan yang baru dimanfaatkan untuk penanaman gandum pada tahun 2001-2008 sebesar 1.508 hektar. Indonesia memiliki 706.500 hektar lahan potensial untuk pengembangan gandum. Di Indonesia gandum cocok dikebunkan di dataran tinggi beriklim kering. Namun, di beberapa daerah seperti Soe (Nusa Tenggara Timur) dan Merauke (Papua), gandum adaptif ditanam di dataran rendah. Hal ini dikarenakan adanya dukungan iklim mikro yang kondusif, yaitu berupa angin muson dari Australia (Yulita 2008).

Kelembagaan penunjang merupakan salah satu subsistem pendukung dari agribisnis sehingga dapat mengantarkan menjadi katalisator pengembangan sentra produksi gandum. Kelembagaan perekonomian pedesaan yang baik dapat mendukung agribisnis gandum lokal di setiap sentra produksi gandum di Indonesia. Selain itu, kelembagaan yang baik dapat mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang kuat di bidang sosial, ekonomi, politik, dan penguasaan mengelola sumberdaya alam pertanian.

4. Membangun sistem pertanian yang terintegrasi (Agriculture to Agribusiness) dan berkelanjutan melalui konsep Agropolitan

Indonesia terkenal sebagai negara agraris, namun seiring dengan berjalannya waktu, gelar yang ada seolah hilang ditelan zaman. Berbagai permasalahan yang muncul di bidang pertanian menyebabkan munculnya permasalahan struktural yang membutuhkan penanganan secara intensif dan komprehensif.

Berdasarkan isu dan permasalahan pembangunan pedesaan yang terjadi, pembangunan sistem pertanian secara terintegrasi diharapkan menjadi alternatif solusi untuk mengembalikan citra Indonesia sebagai negara agraris. Jika selama ini kita berkutat dengan sistem pertanian konvensional yang mengedepankan sistem tradisional, sekarang sudah saatnya kita menciptakan nilai tambah terhadap produk pertanian yang ada.

Agribisnis dalam pengertian awam sering dicampuradukkan dengan bisnis pertanian. Sebenarnya terdapat suatu tahapan perkembangan bisnis dari kegiatan pertanian yang paling sederhana hingga menjadi agribisnis. Drillon dalam Krisnamurthi (2001) mendefinisikan agribisnis sebagai *“the sum total of all operations involved in the manufacture and distribution of farm supplies; production operations of the farm, processing, and distribution of farm commodities and items made from them”*. Agribisnis merupakan konsep dari suatu sistem yang integratif dari beberapa subsistem, yaitu: (1) subsistem pengadaan sarana produksi pertanian, (2) subsistem produksi usahatani, (3) subsistem pengolahan dan industri hasil pertanian (*agroindustry*), (4) subsistem pemasaran hasil pertanian, dan (5) subsistem kelembagaan penunjang kegiatan pertanian.

Penanganan pembangunan pertanian tidak dapat lagi hanya dilakukan terhadap aspek-aspek yang berada dalam subsistem *on farm* saja tetapi juga harus melalui aspek-aspek *off farm* secara integratif sehingga agribisnis merupakan sistem yang memiliki lingkup lebih luas dibandingkan dengan pertanian dalam arti luas. Krisnamurthi dan Fausia (2006) mengungkapkan bahwa usaha agribisnis merupakan kegiatan produktif karena mempunyai

rentang peluang yang sangat luas, mulai dari kegiatan penyediaan *input* hingga pasca panen dan pemasaran.

Pengembangan kawasan agropolitan merupakan salah satu alternatif solusi untuk mewujudkan sistem pertanian yang terintegrasi. Kawasan agropolitan disini diartikan sebagai sistem fungsional desa-desa yang ditunjukkan dari adanya hirarki keruangan desa yakni dengan adanya pusat agropolitan dan desa-desa di sekitarnya. Sedangkan pengertian berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan literatur mengenai agropolitan adalah Disamping itu, Kawasan agropolitan ini juga dicirikan dengan kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis di pusat agropolitan yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya

Dengan adanya implementasi konsep ini diharapkan kawasan pedesaan akan berkembang sesuai dengan keunikan lokal. Kemudian, pengembangan kawasan agropolitan dapat meningkatkan pemerataan mengingat sektor yang dipilih merupakan basis aktifitas masyarakat dan yang pada akhirnya akan menciptakan keunggulan kompetitif dan komparatif produk pertanian yang ada.

Disisi lain proses ekstensifikasi dan intensifikasi demi peningkatan output produksi merupakan hal yang lumrah dalam proses pembangunan pertanian, Namun, proses ini juga harus dilandasi dengan kesinambungan pembangunan dengan mempertimbangkan kesuburan tanah dan daya dukung lingkungan..

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah pergeseran kultur pertanian dari penggunaan pupuk organik menjadi pupuk anorganik yang berpotensi berdampak buruk pada masa depan pertanian. Intensitas kesuburan dan kualitas tanah akan berkurang seiring dengan penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan. Oleh karena itu diperlukan sebuah gerakan kembali kepada penggunaan pupuk organik sebagai tindakan preventif terhadap ancaman berkurangnya tingkat kesuburan tanah dan daya dukung lingkungan. Namun, proses transisi ini tidak dapat dilakukan secara radikal, melainkan proses penyesuaian bertahap (komposisi penggunaan pupuk anorganik dikurangi sedikit demi sedikit dan disubstitusikan dengan pupuk organik).

5. Membangun komitmen dan sinergisitas antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di bidang pertanian.

Sebuah Komitmen dan sinergisitas harus dipegang teguh oleh antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Program-program serta kebijakan untuk pembangunan ketahanan pangan yang dibuat oleh pemerintah pusat harus tersalurkan secara optimal ke pemerintah daerah dan diteruskan ke masyarakat yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Butuh komitmen besar dari pemerintah pusat terkait pembangunan pertanian khususnya ketahanan pangan. Seperti yang kita ketahui bahwa RAPBN 2010 anggaran pertanian hanyalah 8 Trilliun rupiah dan ini menempati urutan ke 10. Hal ini menunjukkan kurangnya keseriusan dan komitmen pemerintah pusat terhadap pembangunan pertanian demi terciptanya ketahanan pangan.

Komitmen Pemerintah daerah untuk mengembangkan pertanian harus didahulukan untuk menciptakan ketahanan pangan pada daerahnya masing-masing. Dengan terciptanya ketahanan pangan secara daerah maka secara menyeluruh akan menciptakan ketahanan pangan Indonesia.

Tercapainya komitmen dan sinergisitas antar pemerintah pusat dan daerah dimaksudkan agar seluruh kelembagaan pemerintah dapat menjalankan program dan kebijakan secara optimal dan sesuai yang diharapkan tanpa terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan bangsa dan Negara ini. Salah satu indikator tercapainya komitmen dan sinergisitas antar pemerintah pusat dan daerah adalah semua lapisan masyarakat dapat mengerti dan merasakan akan kebijakan dan program pemerintah secara komperhensif yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk menciptakan kondisi yang sinergis dan komitmen yang tinggi antar pemerintah pusat dan daerah, cukup dengan keseriusan, reformasi birokrasi, serta rasa dedikasi yang tinggi untuk bangsa dan Negara tanpa mementingkan kepentingan pribadi dan golongan maka pembangunan pertanian khususnya ketahanan pangan akan tercapai dengan apa yang kita harapkan bersama.

6. Menjalin kemitraan antar *stakeholder* di bidang pertanian

Kemitraan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan antara pihak pemerintah yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan instansi-instansi lain seperti instansi pendidikan, pihak swasta serta masyarakat.

Tujuan dari terjalinnya kemitraan antar para *stakeholder* adalah agar tidak terjadi ketimpangan antara perumus kebijakan, dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan para pelaku kebijakan di lapangan, mulai dari masyarakat, instansi

pendidikan,serta pihak swasta. Dengan adanya kemitraan ini, maka kebijakan yang telah dirumuskan tidak hanya menjadi kebijakan formal di atas kertas tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata oleh para *stakeholder* lain di lapangan. Dengan adanya kemitraan juga, diharapkan antar para *stakeholder* bisa tercipta mekanisme saling koreksi terhadap kewajiban-kewajiban yang seharusnya mereka lakukan untuk kepentingan pembangunan pertanian.

Selain itu, mengingat ranah dari sektor pertanian yang sangat luas serta kompleksitas masalah yang ada pada sektor ini, maka kemitraan mutlak diperlukan, agar penanganan masalah pertanian tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja tetapi berbagai pihak dan ada spesialisasi dalam penyelesaian masalah yang ada sehingga upaya yang dilakukan oleh para *stakeholder* akan lebih efektif dan efisien.

Langkah-langkah yang harus dicapai:

- Mengoptimalkan program sarjana pendamping petani.
- Perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan pertanian dan atau menggunakan sumber daya pertanian harus melakukan kegiatan CSR yang berkaitan dengan pembangunan pertanian.
- Pengoptimalan kinerja BULOG. Dalam hal ini pemerintah daerah dan masyarakat bisa melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh BULOG.
- Perumusan kebijakan oleh pemerintah yang memudahkan penyuluh pertanian serta program CSR bisa berkontribusi untuk kemajuan pertanian.
- Penyuluhan yang dilakukan serta program CSR yang dilakukan tidak hanya menyangkut teknis cara bertani tetapi juga melingkupi pendampingan untuk peningkatan mutu SDM serta pembangunan lembaga-lembaga pertanian. Contoh dari CSR (corporate social responsibilities) ataupun kepedulian sosial yang sudah terwujud adalah kasus yang terjadi di bantul Yogyakarta, dimana sebuah kelompok Tani Ngudi Mulyo, Sabrang, Sumber Mulyo, Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta, dibantu oleh sebuah perusahaan, dimana ratusan petani di daerah itu, yang tadinya hanya bertanam padi dan palawija, dibina untuk menanam kedelai hitam. Mereka diberi bibit unggul gratis, diberikan pelatihan agar hasil panennya sesuai dengan standar perusahaan, dan hasilnya lalu ditampung oleh perusahaan itu.
- Revitalisasi koperasi dengan fungsi pembiayaan dan intermediasi sebagai focus utama dalam pembangunan pertanian.

Diperlukan sinergisasi antara Intervensi, dan kontrol pemerintah secara konsisten, partisipasi aktif swasta, dan kepedulian masyarakat termasuk petani sebagai *key succes factor* agar ketahanan pangan dapat dilaksanakan dan untuk kemudian kedaulatan pangan dapat terwujud.

TEMA : PELAYANAN DAN BARANG PUBLIK

Akbar Suwardi

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

(Anggota Tim Perumus Simposium Ekonomi Nasional)

Dwi Andi Rohmantika dan Iqbal Kautsar UGM

Universitas Gajah Mada

(Pemenang Paper Simposium Ekonomi Nasional)

Rully Prassetya

Universitas Indonesia

(Pemenang Paper Simposium Ekonomi Nasional)

Rizky Febriana

Universitas Gajah Mada

(Pemenang Paper Simposium Ekonomi Nasional)

Anina Sukmajati, Darjito dan Farah

Universitas Brawijaya Malang

(Peserta Delegasi Simposium Ekonomi Nasional)

Selama ini pelayanan publik berupa barang dan jasa tidaklah memuaskan, hal ini seringkali dapat menjadi hambatan dalam mencapai produktifitas yang efisien di kalangan pelaku ekonomi di dalam negeri. Maka dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang sustainable dan mandiri, barang Publik yang disediakan oleh pemerintah haruslah Competitive dan Sustainable. Competitive berarti barang publik dalam pelayanan dan

kegunaannya terhadap perilaku bisnis dan masyarakat dapat berkompetisi dengan barang private yang disediakan oleh swasta. Profesional berarti barang publik dalam pengadaannya harus menggunakan pendekatan organisatif dan sistematis. Dalam penerapannya, barang publik yang Competitive dan Sustainable haruslah diterapkan di segala sektor, baik sektor yang sifatnya pelayanan umum berupa jasa ataupun berupa barang, agar dapat terwujud secara menyeluruh dan komprehensif.

Pada dasarnya, Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh [Instansi Pemerintah](#) di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan [Badan Usaha Milik Negara](#) atau [Badan Usaha Milik Daerah](#), dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik Tahun 2009, Pelayanan publik diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Kondisi Pelayanan Publik Indonesia

Sudah menjadi rahasia publik bahwa kondisi pelayanan publik Indonesia sangat menyedihkan. Berdasarkan Hasil survey *Doing Business Index*, sebuah index yang menggambarkan kekondusifan melakukan bisnis di setiap Negara di dunia berdasarkan pertimbangan keamanan pelayanan publiknya, kepastian proses perizinannya, kepastian hukumnya, dll., diketahui bahwa Indonesia berada pada peringkat 129 dari 181 negara.

Table 1. Rangings on the Ease of doing Business

2009 Rank	2008 Rank	Economy	2009 Rank	2008 Rank	Economy
1	1	Singapore	9	10	Australia
2	2	New Zealand	10	9	Norway
3	3	United States	20	25	Malaysia
4	4	Hong Kong, China	70	80	Kazakhstan
5	5	DenMark	77	74	Pakistan
6	6	United kingdom	79	75	Kiribati
7	7	Ireland	129	127	Indonesia
8	8	Canada	150	149	Bolivia

Sumber: Doing business Survey 2008

Lalu berdasarkan *Survey Corruption Perception Index 2008* yang dilakukan oleh Transparency International terhadap 180 negara di dunia, diketahui bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih sangat tinggi. Lalu apa hubungannya dengan kualitas pelayanan publik? Hubungannya tentu sangat jelas, Negara yang sangat korup, cenderung memiliki pelayanan publik yang tidak efisien, menyebabkan terjadinya *high cost economy*, yang bermuara pada rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia. Untuk membuat sesuatu yang sebenarnya mudah dan gratis seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) misalnya, kita tetap harus mengeluarkan uang pelican agar proses pembuatan KTP tersebut bisa cepat. Itu baru KTP, belum urusan-urusan lainnya terkait birokrasi pemerintah.

Table 2. CPI 2008

Country Rank	Country	2008 CPI Score	Survey Used	Confidence Range
1	Denmark	9,3	6	9,1 - 9,4
1	New Zealand	9,3	6	9,2 - 9,5
1	Sweden	9,3	6	9,2 - 9,4
4	Singapore	9,2	6	9,0 - 9,3
5	Finland	9,0	6	8,4 - 9,4
5	Switzerland	9,0	6	8,7 - 9,2
121	Vietnam	2,7	9	2,4 - 3,1
126	Ethiopia	2,6	7	2,2 - 2,9
126	Honduras	2,6	6	2,3 - 2,9
126	Indonesia	2,6	10	2,3 - 2,9
126	Libya	2,6	5	2,2 - 3,0

Sumber: Transparency International, CPI Survey Report 2008

Lalu berdasarkan survey e-Government yang dilakukan oleh Division for Publik Administration United Nations Tahun 2008, yaitu tentang kesiapan Negara-negara di dunia dalam menyediakan pelayanan publik yang proaktif, efisien, transparan, *service oriented*, dan kesiapan dalam mengaplikasikanya dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada survey ini, ranking Indonesia masih sangat rendah, yaitu pada peringkat 106 dari 182 negara yang disurvei. Hal lebih menyayangkan lagi, Peringkat Indonesia di Kawasan ASEAN pun hanya berada pada peringkat ke tujuh, hanya sedikit di atas Kamboja, Myanmar, Timor Leste, dan Laos.

Table 3. E – Government Readliness for South – Eastern Asia

Country	2008 Index	2005 Index	2008 Ranking	2005 Ranking
Singapore	0.7009	0.8503	23	7
Malaysia	0.6063	0.5706	34	43
Thailand	0.5031	0.5518	64	46
Philippines	0.5001	0.5721	66	41
Brunei Darussalam	0.4667	0.4475	87	73
Viet Nam	0.4558	0.3640	91	105
Indonesia	0.4107	0.3819	106	96
Cambodia	0.2989	0.2989	139	128
Myanmar	0.2922	0.2959	144	129
Timor Leste	0.2462	0.2512	155	144
Lao People's Democratic Republic	0.2383	0.2421	156	147
Region	0.4290	0.4388		
World	0.4514	0.4267		

Sumber: UN E-Government Survey 2008 Report

Jika merinci sektor-sektor yang termasuk ke dalam *publik goods* berdasarkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, sekiranya ada beberapa permasalahan utama di dalam pelaksanaan pelayanan publik pada bidang kesehatan, pendidikan, insfrasturktur, lingkungan dan *protect living standards*.

Table 4. Permasalahan Pelayanan *Public Goods* di Indonesia

No	Bidang	Permasalahan
1	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Disparitas status kesehatan • Beban ganda Penyakit • Kinerja pelayanan kesehatan yang rendah • Rendahnya kualitas, pemerataan, dan keterjangkauan pelayanan kesehatan • Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata • Rendahnya status kesehatan penduduk miskin
2	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pendidikan penduduk relatif rendah • Kesenjangan pendidikan masih lebar

		<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas pendidikan masih belum tersedia secara merata • Kualitas pendidikan yang masih rendah (ketersediaan pendidik yang belum memadai secara kuantitatif dan kualitatif, kesejahteraan pendidik yang masih rendah, fasilitas belajar belum mencukupi, biaya operasional belum disediakan secara memadai) • Anggaran pembangunan pendidikan belum tersedia secara memadai
3	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan sumber daya air • Permasalahan transportasi (sarana dan prasarana, rendahnya pelayanan dan keselamatan transportasi, dan lain-lain) • Permasalahan infrastruktur energi, ketenagalistrikan, pos dan telematika • Permasalahan infrastruktur perumahan dan pemukiman
4	Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Terus menurunnya kondisi hutan Indonesia • Kerusakan Daerah Aliran Sungai • Habitat ekosistem pesisir dan laut makin rusak • Citra pertambangan yang merusak lingkungan • Pencemaran air dan udara
5	<i>Protect living standards</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kematian penduduk • Permasalahan kemiskinan dan iklim ketenagakerjaan • Dan lain-lain

Sumber: disarikan dari RPJMN 2004-2009 (Sinar Grafika, 2006)

Dari semua permasalahan – permasalahan dibawah ini ada lima poin rekomendasi berbentuk petisi yang akan dibahas sebagai sebuah solusi yang kami rumuskan dari hasil diskusi kami dengan menggunakan berbagai referensi –referensi yang terkait hal tersebut..

Kelima point ini menyentuh berbagai aspek yang menjadi *key succes factors* dalam menciptakan Pelayanan Publik yang Kompetitif dan Efisien dalam melayani kebutuhan masyarakat. Kelima rumusan tersebut adalah Mereformasi dan Memperkuat lembaga Birokrasi di Indonesia, Menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda utama Pemerintahan 2009-2014, Memastikan adanya Ombudsman (lembaga pengawas pelayanan publik) pada setiap level kota administrasi di seluruh Indonesia, Memperbaiki Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara, baik daerah maupun Pusat, dengan Membangun Sumberdaya Manusia yang baik, dan Menerapkan konsep workplace spirituality dan Total Quality Management (TQM).

1. Mereformasi dan Memperkuat lembaga Birokrasi di Indonesia.

Buruknya Pelayanan Publik di Indonesia tidak terlepas dari Buruknya Proses Birokrasi yang terjadi selama ini. Oleh karena itu, dalam memperbaiki Pelayanan Publik maka Mereformasi dan memperkuat Lembaga Birokrasi di Indonesia merupakan rekomendasi pertama yang kami ajukan. Dalam mereformasi birokrasi ada pemikiran yang sudah dikenal oleh para pelaku kebijakan public, yaitu David Osborne dan Ted Gaebler. Dalam mereformasi birokrasi mereka menyarankan paradigma birokrasi yang baru antara lain:

A. *Catalytic government: steering rather than rowing.*

Pemerintah sebagai katalis, lebih baik menyetir daripada mendayung. Pemerintah dan birokrasinya disarankan untuk melepaskan bidang-bidang atau pekerjaan yang sekiranya sudah dapat dikerjakan oleh masyarakat sendiri.

B. *Community-owned government: empowering rather than serving.*

Pemerintah adalah milik masyarakat: lebih baik memberdayakan daripada melayani. Pemerintah dipilih oleh wakil masyarakat, karenanya menjadi milik masyarakat. Pemerintah akan bertindak lebih utama jika memberikan pemberdayaan kepada masyarakat untuk mengurus masalahnya secara mandiri, daripada menjadikan masyarakat tergantung terhadap pemerintah.

C. *Competitive government: injecting competition into service delivery.*

Pemerintahan yang kompetitif adalah pemerintahan yang memasukan semangat kompetisi di dalam birokrasinya. Pemerintah perlu menjadikan birokrasinya saling bersaing, antar bagian dalam memberikan pendampingan dan penyediaan regulasi dan barang-barang kebutuhan publik.¹

Indonesia, samapai saat ini sistem birokrasinya adalah Sistem Biorkarsi yang lama. Oleh karena itu, untuk dapat mereformasikan system birokrasi, kita dapat merubah system Birokrasi tersebut menjadi system Birokrasi Pemerintahan *Entrepreneur*. Jika kita bandingkan antara perbandingan Sistem Birokrasi dengan Sistem Pemerintahan yang *Entrepreneur*, maka dapat dengan mudah kita gambarkan sebagai berikut:

Tabel 5. Perbandingan dari sistem birokratis dan kemungkinan perubahan menjadi arah reformasi birokrasi

Sistem Birokratis	Sistem Pemerintahan Enterpreuner
Rowing (Mendayung/bekerja sendiri)	Steering (Menyetir/mengarahkan)
Service (Melayani)	Empowering (Memberdayakan)
Monopoly (Menguasai sendirian)	Competition (Ada persaingan)
Rule-driven (Digerakan oleh aturan)	Mission-driven (Digerakkan oleh misi)
Budgeting inputs (Menunggu anggaran)	Funding outcomes (Menghasilkan dana)
Bureaucracy-driven (Dikendalikan birokrat)	Customer-driven (Dikendalikan pelanggan/pembayar pajak)
Spending (Pengeluaran)	Earning (Penghasilan/tabungan)
Curing (Penyembuhkan)	Preventing (Pencegahan)
Hierarchy (Berjenjang)	Teamwork /participation (Pelibatan/kerja kelompok)
Organization (Organisasi, lembaga)	Market (Pasar, keseimbangan orang banyak)

Sumber: Frederickson, 1997.²

¹ David Osborne and Ted Gaebler, *Reinventing Government*, 1992, hlm. ix. Buku ini dialibahasakan ke dalam bahasa Indonesia: David Osborne dan Ted Gaebler, *Mewirauahakan Birokrasi*, Jakarta; Pustaka Binaman Pressindo, 1995.

² Di sandur oleh Syafuan Rozi, *PPW LIPI, Model Reformasi Birokrasi*,

Tabel tersebut, telah menjelaskan, dengan Merubah sistem Birokrasi yang lama dengan syitem birokrasi Pemerintahan *Enterpreneur*, maka system Pemerintahan *Enterpreneur* dapat membantu permasalahan Pelayanan Publik saat ini. Sedangkan Untuk Mereformasikan Birokrasi, kita dapat melakuakannya dengan berbagai macam Model, yaitu Model Lama Birokrasi dan Model Baru Birokrasi. Dalam Model Reformasi Birorkasi Untuk Indonesia yang ditulis oleh Syafuan Rozi, Bahawa dalam melakukan Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 6. Model Reformasi Birorkasi Untuk Indonesia

Dimensi	Model Lama Birokrasi	Model Baru Birokrasi
Kultur dan struktur kerja	Irasional –hirarkis	Rasional-egaliter
Hubungan kerja	Komando-intervensionis	Partisipan -outonomus
Tujuan kerja	Penguasaan dan Pengendalian Publik	Pemberdayaan Publik dan Demokratisasi
Sikap terhadap publik	Rent-seeking (ekonomi biaya tinggi).	Profesional pelayanan publik, transparansi biaya (public accountability).
Pola Rekrutmen, pengawasan, dan Penghargaan	Spoil System (Nepotisme, diskriminasi, reward berdasarkan ikatan primordial –suku, ras, agama)	Merit System (pengangkatan karena keahlian, pengawasan kolektif, obyektif)
Model Pelayanan	Tidak Ada Kompetisi dalam Memberikan Pelayanan	Kompetitif dalam Memberikan Pelayanan
Keterkaitan dengan Politik	Birokrasi Berpolitik	Netralitas Politik Birokrasi

Diolah Oleh: Syafuan Rozi dari berbagai sumber, th. 2000.

Dimana tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa, dalam Mereformasi Birokrasi perlu dibangun birokrasi berkultur dan struktur rasional-egaliter, bukan irasional-hirarkis. Caranya dengan pelatihan untuk menghargai penggunaan nalar sehat dan menggunakan hasil-hasil ilmu pengetahuan. Perlunya memiliki semangat pioner, bukan memelihara budaya minta petunjuk dari atasan. Perlu dibiasakan mencari cara-cara baru yang praktis untuk pelayanan publik, inisiatif, antisipatif dan proaktif, cerdas membaca keadaan kebutuhan publik, memandang

semua orang sederajat di muka hukum, menghargai prinsip kesederajatan kemanusiaan, setiap orang yang berurusan diperlakukan dengan sama pentingnya.

Birokrasi yang propartisipan-otonomus bukan komando-hirarkis. Birokrasi Indonesia ke depan perlu mendukung dan melakukan peran pemberdayaan dan memerdekakan masyarakat untuk berkarya dan berkreatifitas. Perlu dikurangi kadar pengawasan dan represi terhadap hak ekspresi masyarakat. Perlu ditinggalkan cara-cara penguasaan masyarakat lewat kooptasi kelembagaan dan dihindari sikap dominasi.

Birokrasi bertindak profesional terhadap publik. Berperan menjadi pelayan masyarakat (*public servant*). Dalam memberikan pelayanan ada transparansi biaya dan tidak terjadi pungutan liar. PNS perlu memberikan informasi dan transparansi sebagai hak masyarakat dan bisa dimintai pertanggungjawabannya (*public accountability*) lewat dengar pendapat (*hearing*) dengan legislatif atau kelompok kepentingan yang datang. Melakukan pemberdayaan publik dan mendukung terbangunnya proses demokratisasi. · Birokrasi yang saling bersaing antar bagian dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam melayani publik secara kompetitif, bukan minta dilayani atau membebani masyarakat dengan pungutan liar, salah urus, dan ketidakpedulian.

Birokrasi yang melakukan rekrutmen sumber daya manusianya melalui seleksi *fit and proper test*, bukan mengangkat staf atau pimpinan karena alasan kolusi dan nepotisme. Birokrasi yang memberikan *reward merit system* (memberikan penghargaan dan imbalan gaji sesuai pencapaian prestasi) bukan *spoil system* (hubungan kerja yang kolusif, diskriminatif dan kurang mendidik, pola *reward* dan *punishment* kurang berjalan). Birokrasi yang bersikap netralitas politik, tidak diskriminatif, tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan partai politik tertentu.

2. Menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda utama Pemerintahan 2009-2014

Seperti yang telah di ungkapkan pada survey E -Government yang dilakukan oleh Division for Public Administration United Nations Tahun 2008 bahwa ranking Indonesia di E – Government masih sangat rendah, yaitu pada peringkat 108 dari 182 negara yang disurvei. *Corruption Perception Index 2008* yang dilakukan oleh Transparency International terhadap 180 negara di dunia, diketahui bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih sangat tinggi, dan di dunia pada nomor 126. Sedangkan berdasarkan Hasil survey *Doing Business Index*, sebuah index yang menggambarkan kekondusifan melakukan bisnis di setiap Negara di dunia

berdasarkan pertimbangan kemapanan pelayanan publiknya, kepastian proses perizinannya, kepastian hukumnya, dll., diketahui bahwa Indonesia berada pada peringkat 129 dari 181 negara.

Tabel 7. Hambatan Jalannya Bisnis

	Indonesia	Pakistan	Philipina	Banglades	Cina
Anti Kompetisi	17.3	21.3	24.3	29.3	17.6
Lisensi Bisnis dan Izin Usaha	17.5	14.5	13.5	16.5	15.9
Korupsi	38.2	40.4	35.2	57.8	22.4
Pungutan liar terhadap Penerimaan	3.4	2.0	1.9	2.5	1.8

Laporan ADB dan Bank Dunia, May 2005

Dilihat pada Tabel 1.1, pada anti kompetisi Indonesia menduduki peringkat terakhir. Lama nya Lisensi Bisnis dan Izin Usaha pada urutan yang pertama, hal ini menandakan sulitnya para Investor dalam menginvestasikan dananya ke Indonesia, dana hal ini pula yang dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dan memperburuk iklim Insvestasi dalam negeri. Sedangkan jika dibandingkan neagara berkembang lainnya di Asia, Indonesia menempati posisi teraats dalam hal pembuatan izin usaha paliing lama dan panjangnya prosedur yang harus dilalui perusahaan dalam memulai usaha baru.

Korupsi, seperti yang kita ketahui tingkat korupsi merupakan hal penting dalam memeperhatikan ketidaka efisienan suatu negara, namun sangat memprihatinkan ternyata Indonesia mempati posisi ketiga ketiga tertinggi dalam hal Korupsi (*The Investment Climate Study, 2005*) setelah Banglades dan Pakistan,

*“korupsi merupakan titik kulminasi dari proses hubungan kolusi yang sistemik antara pelaku institusi politik (baik politikus atau birokrat) dengan pelaku ekonomi (baik ekonomi privat atau masyarakat biasa) yang relatif kontinyu sehingga menghasilkan semacam situasi dilematis (reconfusion) dalam menentukan batas-batas ruang lingkup ‘publik’ dan ‘privat’”.*³

Kata kolusi di atas merujuk pada pengertian adanya kesepakatan rahasia untuk kepentingan kedua belah pihak yang biasanya bersifat ilegal atau pemalsuan, sementara bentuk titik kulminasi di atas misalnya skandal terbuka, kebangkrutan ekonomi negara, bahkan kudeta, atau revolusi sosial.

Sangat Besar Kerugian yang disebabkan oleh perilaku Korupsi terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya Bangsa ini. Maka bukan hanya untuk memperbaiki Kondisi Pelayanan

³ Ahmad Zaenal Fanani, SHI “Optimalisasi Pelayanan Publik; Persepektif David Osborne dan Ted Gaebler”

Publik, namun Pemberantasan Korupsi dapat juga memperbaiki keadaan sosial, politik, budaya Masyarakat. Oleh karena itu, kami sangat menyarankan bahwa pemberantasan korupsi tetap menjadi Panglima program dalam pemerintahan ini dan berikutnya. Pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan berbagaimacam cara yang sudah ada, seperti Mempertahankan Eksistensi serta Kuasa dari Penegak Hukum, baik Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Memberikan sanksi yang tegas dan menjerat kepada pelaku Korupsi, memberantas Mafia Peradilan, Mereformasi Sistem Hukum di Indonesia, serta ada *Political will* yang benar ditunjukkan oleh puncak kekuasaan.

3. Memastikan adanya Ombudsman (lembaga pengawas pelayanan publik) pada setiap level kota administrasi di seluruh Indonesia.

Salah satu yang menyumbangkan atas permasalahan buruknya pelayanan Publik di Indonesia baik barang dan jasa adalah banyaknya para aparatur – aparatur pemerintah atau PNS tidaklah berkerjasecara profesionalisme maka merealisasikan Gagasan pembentukan komisi kepegawaian untuk mereformasika Birokrasi dijalankan.

Ombudsman Republik Indonesia (sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional) adalah lembaga negara di [Indonesia](#) yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh [Badan Usaha Milik Negara](#), [Badan Usaha Milik Daerah](#), dan [Badan Hukum Milik Negara](#) serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari [Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara](#) atau [Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah](#). Lembaga ini dibentuk berdasarkan [Undang-Undang](#) Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008.

Sesuai dengan Fungsinya, maka Ombudsman merupakan Lembaga penting yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengadukan atas pelayanan public yang mereka terima saat ini. Dan pada dasarnya pula, Ombudsman, dapat sebagai cara mudah pemerintah untuk mengevaluasi serta untuk memperbaiki keadaan pelayanan public dimasyarakat. Oleh karena itu, kami merekomendasikan bahwa kita tidak perlu lagi membuat suatu komisi atau lembaga yang sejenis untuk mengevaluasi serta menjaga kondisi Pelayanan public, namun dengan memastikan adanya Ombudsman (lembaga pengawas pelayanan publik) pada setiap level kota administrasi di seluruh Indonesia, maka Pelayanan Publik di Seluruh Indonesia dapat dirasakan secara merata, dengan kualitas yang baik.

4. Memperbaiki Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara, baik daerah maupun Pusat, dengan Membangun Sumberdaya Manusia yang baik.

Bank Dunia dalam laporannya menengarai bahwa tingkat kebocoran keuangan di Indonesia berkisar antara 10% - 40% (USDRP, 29 Juni 2009). Ini konsisten dengan skor Corruption Perception Index Indonesia tahun 2008 yang hanya 2,6 yang berarti Indonesia menduduki posisi “jelek” (nomor 126 dari 180) dalam urutan indeks korupsi negara-negara sedunia⁴. Beberapa hal yang menyebabkan kegagalan dari pelaksanaan otonomi daerah (Widiarto, 2006) antara lain:

1. Pemerintah pusat belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya untuk mengeluarkan aturan-aturan UU No. 32 Tahun 2004.
2. Masih adanya keengganan dari pemerintah pusat sendiri untuk melaksanakan otonomi daerah.
3. Ada semacam keengganan dari aparat pemerintah pusat yang ada di daerah seperti gubernur atau kanwil terhadap pelaksanaan otonomi.
4. Kegagalan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah.
5. Adanya kepentingan yang berbeda antara aparat pemerintah pusat dengan pemerintah pusat sendiri.
6. Di lain pihak di daerah juga muncul perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah dengan aparat daerah.
7. Pelaksanaan otonomi memerlukan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Otonomi daerah berjalan beriringan dengan diterapkannya *good corporate governance* sebagai salah satu syarat pengelolaan lembaga pemerintahan yang baik. Laporan keuangan merupakan salah satu hasil yang bisa dipertanggungjawabkan dan diperiksa kebenarannya oleh badan independen. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah masih relatif rendah, yang antara lain ditunjukkan oleh rendahnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Mardiyanto, 2009).

Tabel Jumlah LKPD yang Mendapatkan Opini BPK

Opini	Jumlah LKPD			
	2004	2005	2007	2008

⁴ www.bpk.go.id

Wajar Tanpa Pengecualian (<i>Unqualified</i>)	21	17	3	4
Wajar Dengan Pengecualian (<i>Qualified</i>)	249	308	326	283
Tak Memberikan Pendapat (<i>Disclaimer</i>)	7	25	106	120
Tidak Wajar (<i>Adversed</i>)	10	12	28	59
Jumlah	287	362	463	466

Tabel Jumlah LKKL yang Mendapatkan Opini BPK

Opini	Jumlah LKKL		
	2006	2007	2008
Wajar Tanpa Pengecualian (<i>Unqualified</i>)	7	16	34
Wajar Dengan Pengecualian (<i>Qualified</i>)	37	31	30
Tak Memberikan Pendapat (<i>Disclaimer</i>)	35	33	18
Tidak Wajar (<i>Adversed</i>)	-	1	-
Jumlah	79	81	82

Sumber: Presentasi Sri Mulyani Indrawati dalam Seminar Nasional BPK-RI

Untuk mengatasi kualitas SDM pada Pengelolaan Keuangan Negara, maka dapat dilakukan sebagai berikut :

- 1) Pemerintah pusat perlu mendorong peningkatan kualitas SDM akuntansi sektor publik pemerintah daerah dengan:
 - a. Mengirimkan SDM yang berpengalaman dan profesional untuk bekerja di daerah dalam jangka waktu tertentu. SDM pusat bekerja di daerah sembari mengajarkan kemampuan akuntansi sektor publiknya kepada SDM pemerintah daerah. Jika dirasa cukup, SDM pusat akan ditarik lagi dan mungkin dilimpahkan ke daerah lain.
 - b. Mengadakan diklat-diklat dan pelatihan-pelatihan akuntansi sektor publik, baik dalam pengelolaan keuangan maupun manajemen daerah secara intensif dan rutin berkala dengan instruktur dari internal pemerintah atau KAP.
 - c. Membuat *grand design* nasional terkait peningkatan kualitas dan kuantitas SDM akuntansi sektor publik untuk jangka panjang
- 2) Pemerintah daerah harus berkomitmen untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM akuntansi pengelola keuangan daerah secara lebih signifikan agar dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah ke depan
- 3) Pemerintah daerah perlu membangun kerja sama dengan instansi perguruan tinggi yang terbaik di Indonesia, khususnya di bidang akuntansi sektor publik dalam

rangka perekrutan tenaga akuntan untuk mengisi pos-pos pengelolaan keuangan dan manajemen pelayanan publik daerah.

- 4) Pihak akademis perlu mengembangkan kurikulum akuntansi sektor publik secara khusus yang diterapkan di perguruan tinggi sebagai sarana pengkaderan akuntan-akuntan yang akan berkiprah di sektor publik, termasuk pemerintahan daerah.
- 5) Peningkatan kesejahteraan para tenaga di akuntansi sektor publik, khususnya di pemerintahan daerah, agar profesionalitas dan dedikasi atas pengelolaan keuangan dan manajemen lembaga pelayanan publik daerah semakin transparan dan akuntabel.

5. Menerapkan konsep workplace spirituality dan Total Quality Management (TQM)

Pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh budaya birokrasi tersebut. Budaya organisasi (birokrasi) merupakan kesepakatan bersama tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi dan mengikat semua orang dalam organisasi yang bersangkutan (Sondang P.Siagian,1995). Oleh karena itu budaya organisasi birokrasi akan menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota organisasi; menentukan batas-batas normatif perilaku anggota organisasi; menentukan sifat dan bentuk-bentuk pengendalian dan pengawasan organisasi; menentukan gaya manajerial yang dapat diterima oleh para anggota organisasi; menentukan cara-cara kerja yang tepat, dan sebagainya. Secara spesifik peran penting yang dimainkan oleh budaya organisasi (birokrasi) adalah membantu menciptakan rasa memiliki terhadap organisasi; menciptakan jati diri para anggota organisasi; menciptakan keterikatan emosional antara organisasi dan pekerja yang terlibat didalamnya; membantu menciptakan stabilitas organisasi sebagai sistem sosial; dan menemukan pola pedoman perilaku sebagai hasil dari norma-norma kebiasaan yang terbentuk dalam keseharian. (Drs Agus Suryono,MS dalam Budaya Birokrasi Pelayanan Publik).

Pengintegrasian nilai-nilai spiritualitas dengan pelayanan publik dan beserta ide-ide konsep praktisnya di lapangan.. menurut Prof Mc Clain, sumber motivasi yang sangat kuat itu berasal dari internal orang tersebut, yaitu motivasi yang muncul dari penghayatan orang tersebut akan pekerjaannya yang memiliki *meaning* dan *value*. Hal inilah yang selama ini belum tergarap dengan baik oleh pemerintah dalam mendesain konsep dan praktek pelayanan publiknya.

Berdasarkan fakta-fakta tentang kondisi pelayanan publik Indonesia di atas dan teori-teori para ahli yang belum juga memperlihatkan perbaikan yang menyeluruh pada kondisi

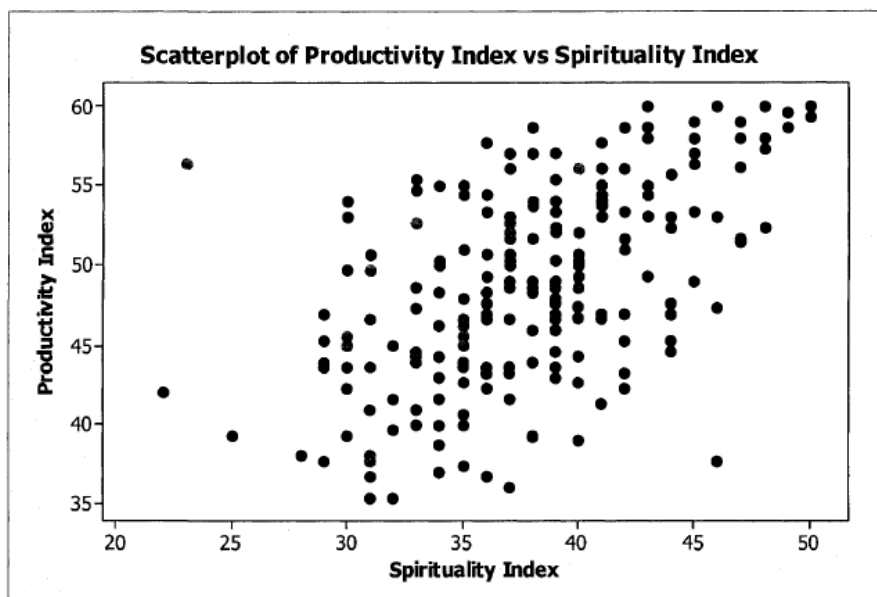
pelayanan publik Indonesia, maka penulis mengajukan sebuah wacana cara peningkatan kualitas pelayanan publik yang lain, yaitu sebuah metode pendekatan yang menekankan pentingnya menyatukan spiritualitas di tempat kerja dengan aktivitas kerja seorang PNS. Selama ini, pendekatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Indonesia hanya bersifat sekuler, dimana strateginya hanya berkisar, meningkatkan gaji pegawai, menerapkan reward and punishment, memperpendek birokrasi, dan pendekatan lainnya, sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bagian sebelumnya. Sangat jarang ada pendekatan yang menekankan implementasi spiritualitas di tempat kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hal senada juga disampaikan oleh Irwan Noor dalam tulisannya *Mensoalkan: makna haqiqi pelayanan publik* (2000), Ia menyatakan bahwa Penataan ulang perbaikan aparatur mestinya dimulai pada nilai-nilai kesetimbangan spritual-intelektual mereka. Namun sayangnya, justifikasi logika sekuler mengejawantahkan pemahaman spiritual hanya sebatas rutinitas ritual semata. Padahal makna tersembunyi dibalik dimensi spiritual adalah keharmonisan unsur-unsur ketenagaan di dalam diri yang akan mampu menerobos batas-batas pelayanan, sehingga tercuat dalam wujud nyata kegiatan yang bertindak penuh belas-hiba karena kasih sayang semata.

Oleh karenanya cakupan pelayanan publik semestinya meluas pada dimensi keselarasan keseimbangan antara spritual-intelektual para pelayan publik tersebut. Hal ini disebabkan, kemapanan intelektual yang tidak diimbangi oleh ketenagaan spritual menjadikan aparatur pemerintah berintelektual sekuler. Ia hanya ahli dalam logika rekayasa. Yaitu hanya pandai berteori tanpa mampu mewujudkannya dalam perbuatan. Artinya, pelayanan yang baik dan santun hanya menggantung pada konsep-konsep pelatihan dan buku-buku literatur semata. Pertanyaannya, dapatkah dijawab dengan pasti, jika seseorang yang telah berselempangkan toga kebesaran akan santun sebagai pelayan publik? Oleh karenanya, pemahaman makna pelayanan publik semestinya diawali dari kemapanan aparatur dalam bentuk keselarasan antara spritual-intelektualnya.

Konsep yang kita ajukan ini bukanlah tidak berdasar. Berdasarkan sebuah penelitian kuantitatif yang dilakukan oleh Anthony Valasek, Jr (seorang Doktor dari USA), dalam disertasinya yang berjudul *Examining the Relationships of Spirituality and Religiosity to Individual Productivity in the United States* (2009) meyakini bahwa terdapat hubungan antara produktivitas dan tingkat spiritualitas seseorang. Berikut adalah salah satu grafik hasil penelitian beliau.

Grafik 1: Hubungan antara produktivitas dan spiritualitas di tempat kerja



(Disertasi Anthony Valasek, Jr, 2009)

East (2005) suggested that there was a strong and significant relationship between workplace spirituality and a person's job satisfaction. Oleh karena itu, Berdasarkan studi yang telah dilakukan oleh para ahli, ditemukan bahwa spiritualitas mendorong peningkatan produktivitas. Dan hal tersebut dapatlah membantu untuk memperbaiki kinerja dan produktifitas dalam Pelayanan Publik.

TEMA : Pendidikan dan Kesehatan

Joseph Natanael Sihotang
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
(Anggota Tim Perumus Simposium Ekonomi Nasional)

Bambang Dwi Putra
Kedokteran Universitas Indonesia
(Finalis lomba paper Simposium Ekonomi Nasional)

Baraputra Christian Oktavianus
Fakultas Ekonomi Universitas Kr Maranatha
(Finalis lomba paper Simposium Ekonomi Nasional)

Richard Alexandro
Fakultas Ekonomi Universitas Kr Maranatha
(Finalis lomba paper Simposium Ekonomi Nasional)

Sakti, Wilis dan Nurhasanah
Universitas Indonesia
(Delegasi Simposium Ekonomi Nasional)

A.Pendahuluan

Pembangunan pada hakekatnya adalah pembangunan manusia. Sudah sepatutnya penembangan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu target utama dalam pembangunan nasional. *Human capital* dalam pembangunan merupakan akselerator pertumbuhan ekonomi. *Human Development Index* (HDI) sebagai salah satu ukuran yang digunakan UNDP dalam melihat kualitas pembangunan suatu bangsa, memasukkan faktor *literacy adult*, dan *life expentancy at birth* untuk mendampingi GDP. Pemilihan kedua faktor yang merepresentasikan pendidikan dan kesehatan tersebut menandakan pentingnya mereka dalam pembangunan ekonomi. Peningkatan pendidikan dan kesehatan membawa dampak positif pada produktivitas yang menunjang kenaikan tingkat pendapatan tiap individu, yang pada akhirnya secara siklis kembali lagi pada kualitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.

Dalam laporan *Human Development Index* (HDI) yang dikeluarkan *United Nation Development Program* periode 2009 menempatkan Indonesia pada posisi ke-111 di antara 179 negara di dunia. Hal ini merupakan suatu penurunan dibandingkan laporan tahun lalu dimana Indonesia menduduki peringkat 109. Padahal, HDI mencerminkan tiga aspek penting

dalam pembangunan negara, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Ketiga aspek tersebut memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain dalam keberlangsungan pembangunan nasional. Dapat dimengerti bahwa tanpa kesehatan yang baik, pendidikan tidak mungkin berjalan dengan baik. Dengan rendahnya taraf kesehatan dan pendidikan mustahil ekonomi masyarakat dapat membaik.

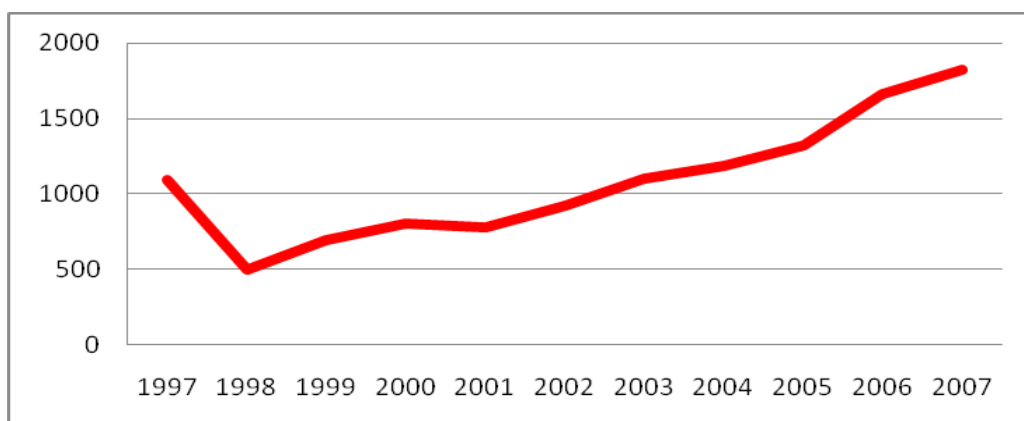
Pendidikan dan kesehatan punya makna penting dalam perekonomian terkait fungsinya sebagai pembentuk *human capital*. Masalah dalam pendidikan dan kesehatan adalah masalah struktural yang harus segera dicari pemecahannya jika Indonesia ingin terus melakukan pembangunan dengan lebih baik. Kemiskinan, pendapatan, dan kesejahteraan sangat terkait dengan tingkat pendidikan dan kesehatan dalam suatu masyarakat. Pentingnya dua masalah ini menyebabkan Simposium Ekonomi Nasional mengangkat tema ini menjadi salah satu dari petisi bagi pemerintahan Indonesia 2009-2014.

B. Urgensi Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia

Kondisi perekonomian Indonesia sampai tahun 2007 menunjukkan pertumbuhan GDP yang positif. Sebagai suatu indikator makro, GDP biasa menjadi patokan perubahan atau pertumbuhan suatu negara. Namun, jika kita cermati seperti pada **grafik 1**, tren positif ini melaju dengan akselerasi yang melambat. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita dapat meningkatkan akselerasi tersebut. Untuk itu kita perlu mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan.

Grafik 1.

Perkembangan PDB per Kapita Indonesia, 1997-2007 (USD)



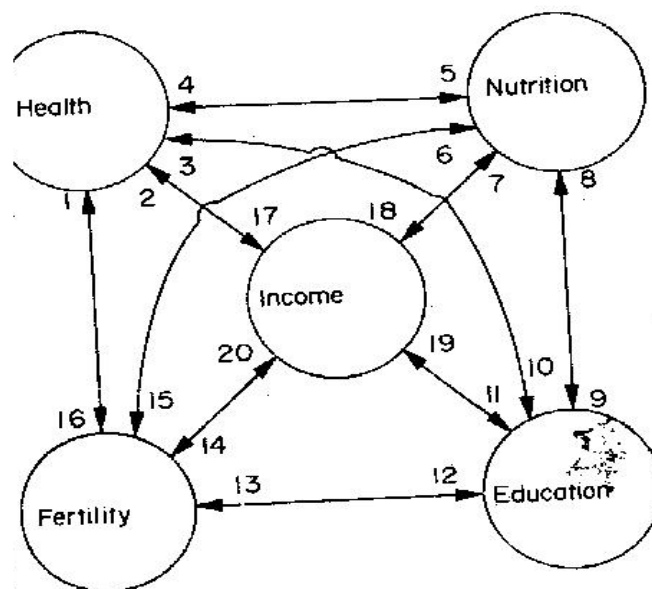
Sumber: Jakti (2009)

Tidak dapat dipungkiri, bahwa pendapatan masyarakat akan menentukan besar produktivitas suatu negara. Tingginya daya beli selaras dengan produktivitas mereka. Dengan adanya pendapatan maka masyarakat punya kesempatan melakukan *saving* dan investasi yang nantinya mendorong perekonomian (mendorong GDP). Peningkatan pendapatan tidak dapat dilepaskan dari faktor produktivitas masyarakat. Di sinilah, letak penting *human capital* dalam pembangunan. Modal manusia atau sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan produktivitas yang baik. Dan, ada dua hal yang sangat mempengaruhi *human capital*. Mereka adalah pendidikan dan kesehatan (lihat **grafik 2**)

Grafik 2.

Hubungan Antara Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pendapatan

A general model of Health and Development (Univ of Michigan, 1977)



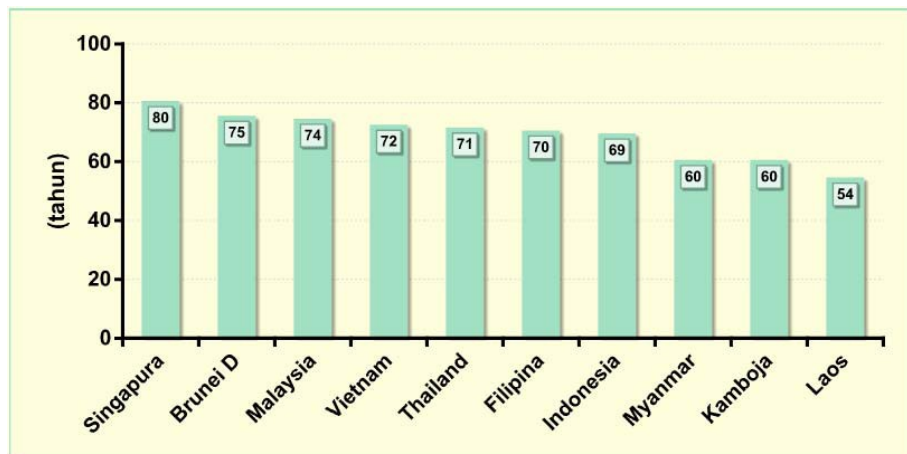
sumber: Kartono (2009)

Kesehatan dan pendidikan secara bersama-sama akan meningkatkan kualitas manusia. Lewat nutrisi dan profil kesehatan yang baik, tentu masyarakat dapat bekerja lebih baik dan produktif dibandingkan dalam kondisi sakit. Begitu pula dengan pendidikan, taraf pendidikan yang lebih tinggi akan meningkatnya balas jasa, dalam bentuk upah, yang tinggi pula. Tentu upah bagi *skilled labor* akan lebih tinggi daripada *unskilled labor*.

Melihat hal di atas, semakin jelas betapa penting *human capital* bagi perekonomian Indonesia. Pendidikan dan kesehatan adalah kunci tercapainya kualitas *human capital* yang

baik. Namun, pada dua poin ini pula Indonesia masih menghadapi banyak sekali masalah. Sebagai contoh, proporsi *unskilled labor* kita masih sangat banyak dan tingkat harapan hidup yang cenderung lebih buruk daripada negara berkembang lain di Asia Tenggara (lihat grafik 3).

Grafik 3.
Perbandingan Angka Harapan Hidup Indonesia di ASEAN



Sumber: *World Population Data Sheet, USAID, 2006*. Dalam Profil Kesehatan 2006 Indonesia

Fakta ini tentu bukan hal yang menyenangkan. Pendidikan dan kesehatan yang buruk menyebabkan pendapatan masyarakat rendah dan berujung pada kemiskinan (lingkaran setan kemiskinan). Singkatnya, pendidikan dan kesehatan tidak lain merupakan “gunting” yang mampu memotong lingkaran setan kemiskinan. Mengingat kompetisi di negara-negara di dunia semakin terbuka, Indonesia perlu segera berebenah diri dan memeriksa kembali apa yang salah dalam pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Untuk itulah Simposium ini mencoba menggali bersama dari sudut pandang mahasiswa, masalah-masalah yang perlu diperiksa.

C. Permasalahan Dalam Pendidikan

Pembangunan pendidikan di Indonesia belum memuaskan. Kita dapat melihat gambaran umumnya pada tabel 1. Tabel ini menceritakan kualitas pembangunan pendidikan di Indonesia.

Tabel 1.

Perbandingan Indeks Pembangunan Pendidikan di ASEAN

Negara	Indeks Pembangunan Pendidikan	Angka Partisipasi Pendidikan Dasar	Angka Melek Huruf usia 15 thn keatas	Angka menurut gender	Angka Bertahan hingga kelas 5 SD
Brunei Darussalam	0,965	0,969	0,927	0,967	0,995
Malaysia	0,945	0,954	0,904	0,938	0,984
Indonesia	0,935	0,983	0,904	0,959	0,895
Vietnam	0,899	0,878	0,903	0,945	0,868
Filipina	0,893	0,944	0,926	0,955	0,749
Myanmar	0,866	0,902	0,899	0,963	0,699
Kamboja	0,807	0,989	0,736	0,871	0,631
Laos	0,750	0,836	0,714	0,820	0,630

Sumber: *EFA Global Montoring Report 2008*. dalam Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2007

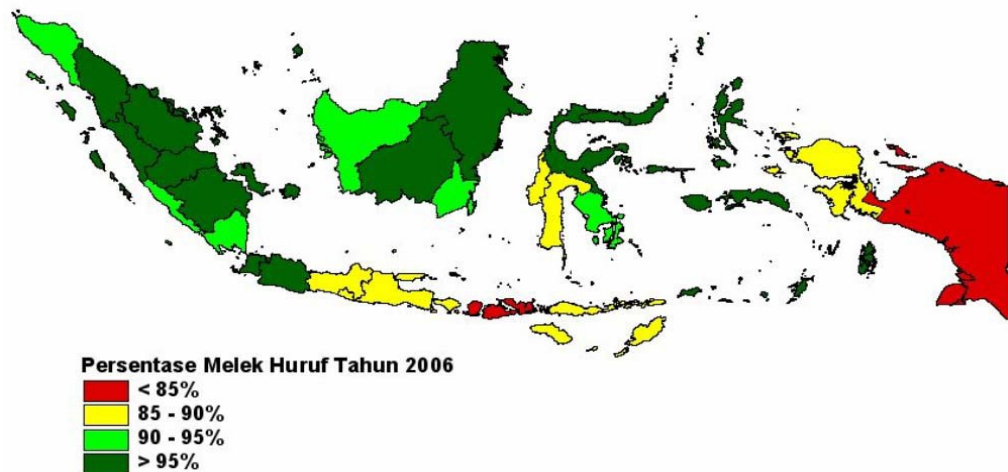
Secara umum kita dapat melihat bagaimana IPP Indonesia dibandingkan dengan negara-negara berkembang (dalam hal ini ASEAN) Untuk sektor pendidikan primer (*primary education*) dapat kita lihat Indonesia mencapai lebih dari 80% lebih baik dari negara Thailand. Namun, jelas tampak terlihat di tingkat pendidikan yang lebih tinggi Indonesia hanya berada di kisaran 20% hingga 40% erbeda jauh dengan rata-rata negara OECD. Hal ini dapat menjadi gambaran nilai saing negara kita di bidang *skilled labor* dibandingkan negara-negara OECD lainnya. Hal ini menjadi pertanyaan besar seperti yang sudah dibahas kurangnya pendidikan tinggi artinya sebagian besar pendapatan masyarakat kita masih rendah. Lalu problem apakah yang menghalangi pembangunan tersebut?

Secara umum dapat pendidikan di Indonesia mengalami 3 problem. Pertama, *inequality* dalam hal kualitas pendidikan. Kedua, pembiayaan penyelenggaraan pendidikan. Ketiga, kualitas penyelenggaraan pendidikan yang pada akhirnya terkait pada kualitas output pendidikan Indonesia di dunia kerja.

Pendidikan yang kurang merata

Pendidikan di Indonesia seharusnya berjalan dari Sabang hingga Merauke. Namun, sayangnya banyak tuduhan bahwa pendidikan tidak dilaksanakan dengna merata. benarkah demikian. Pada Gambar 1. kita dapat melihat persebaran melek huruf di Indonesia. Apa yang kita lihat adalah bentuk ketimpangan dimana di daerah timur (Maluku dan Papua) angka melek huruf masih berada dibawah daerah wilayah barat Indonesia.

Gambar 1. Persebaran Angka Melek Huruf Tahun 2006



Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2006

Hal ini tentu menguatkan indikasi ketimpangan tersebut. Belum lagi kondisi infrastruktur pendidikan di daerah yang terkenal sangat memprihatinkan. Kondisi yang tidak seimbang ini tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang timpang pula pada wilayah barat dan timur. Konsentrasi perekonomian yang memusat di daerah barat dapat dimengerti setidaknya lewat ketimpangan pendidikan di Indonesia

Pembiayaan pendidikan

Pembiayaan bagi pendidikan selalu menjadi kontroversi. Pemerintah dianggap kurang member perhatian besar bagi dunia pendidikan. Mulai isu UU BHP hingga perjuangan realisasi anggaran 20% APBN bagi pendidikan, menjadi isu sentral. Menurut laporan Kebijakan Pengeluaran Publik tahun 2007, sudah 17,5 % dari pengeluaran publik tersalur ke pendidikan dimana jika dibandingkan pada tahun 2001 hanya sebesar 11,4% persentase yang dialihkan ke sektor pendidikan. Namun hal ini masih relatif kecil jika kita mau melihat persentase pengeluaran publik untuk pendidikan di negara lain. Pemerintah Indonesia sendiri sebagai *lower middle-income countries* menganggarkan hanya 0,9% dari *share* GDP (2005) dimana pada umumnya di *high-income countries* dianggarkan 5,6% Dari GDP dan di *middle-income countries* sebesar 4,4% dari GDP dialokasikan ke pendidikan.

Sumber pembiayaan yang kurang dapat dipahami sebagai penyebab lambatnya pembangunan infrastruktur dan suprastruktur dari pendidikan di Indonesia. Yang menjadi sorotan pula adalah tingkat kesejahteraan guru yang masih kurang. Anggaran pendidikan di Indonesia memasukan biaya administratif dan biaya pendidikan dalam satu pos anggaran. Artinya gaji guru masuk dalam anggaran tersebut. Maka semakin kecil pula gaji guru yang

diterima bila anggaran pendidikan juga kecil. Kesejahteraan guru tentu akan banyak mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia.

Kualitas Penyelenggaran Pendidikan

Kualitas pendidikan Indonesia mungkin dapat mudah diukur lewat masih tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Belum lagi masalah *mismatch* dunia kerja dan pendidikan, masalah kualitas yang mendasar seperti kurikulum dan kelayakan guru masih sering dipertanyakan. Pada Grafik 3 dapat dilihat jumlah ketidaklayakan pada guru di tingkat swasta (data ini masih belum menunjukkan pada guru negeri). Setidaknya dapat tampak bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia secara umum.

Grafik 3.Kelayakan Kepala Sekolah dan Guru di Sekolah Swasta

Sumber : Depdiknas

Penurunan kualitas guru ini tidak sejalan dengan Pasal 8 UU Nomor 14 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Alesxandro, 2009).

Kritik lainnya adalah dalam bentuk sistem pengajaran antara lain kurikulum. Pendidikan di Indonesia masih terlalu sering terjadi kontroversi dalam kurikulum. Peralihan kurikulum yang terlalu sering dan kurang substansial sering menjadi kendala bagi peserta didik. Begitu pula persoalan UAN yang sebenarnya terkait dengan pemerataan pendidikan. Hasilnya dunia pendidikan Indonesia dianggap kurang mampu menghasilkan output sesuai kondisi dunia kerja.

D. Permasalahan dalam Dunia Kesehatan

Pembiayaan Kesehatan

Dunia kesehatan Indonesia memang ada pada tahap yang cukup mengkhawatirkan. Hal ini juga didukung sedikitnya dana yang dianggarkan pemerintah dalam bidang kesehatan. Indonesia menganggarkan 2,7% dari PDB pada tahun 2005 (tabel 1 untuk bidang kesehatan, dimana angka ini dibawah standar WHO 5%. Tentu pemerintah memiliki keterbatasan sumber dana anggaran, tetapi perlu diperhatikan adanya tren yang stagnan dari jumlah pengeluaran pada bidang kesehatan di Indonesia

Tabel 1

Alokasi Pengeluaran Pemerintah Untuk Program Kesehatan

Sumber : Kartono (2009)

EXPENDITURES ON HEALTH	2001	2002	2003	2004	2005
Expenditure ratios					
Total expenditure on health (THE) as % of GDP	2.7	2.8	2.9	2.8	2.7
Financing Agents measurement					
General government expenditure on health (GGHE) as % of THE	33.1	33.7	31.6	34.2	34.7
Private sector expenditure on health (PvtHE) as % of THE	66.9	66.3	68.4	65.8	65.3
General government expenditure on health as % of GGE	4.2	5.3	4.6	5.0	5.0
Social security funds as % of GGHE	8.9	10.2	11.7	10.8	21.3
Private households' out-of-pocket payment as % of PvtHE	75.1	75.3	76.0	74.7	74.3
Prepaid and risk-pooling plans as % of PvtHE	4.1	5.1	5.6	5.9	6.0
source : World Health Organization, 2007					

Selain kurangnya dana pembiayaan, dalam masalah anggaran kesehatan banyak terjadi *gap* realisasi dan anggaran. Dari sisi pendanaan sebenarnya terjadi peningkatan dalam alokasi dana kesehatan. Sayangnya, justru terjadi juga penurunan realisasi dana kesehatan. Pada tahun 2003 alokasi anggaran Departemen Kesehatan meningkat 49,34%, tahun 2004 meningkat 19,81%, tahun 2005 meningkat cukup besar yaitu 73,34% dan tahun 2006 naik lagi menjadi 43,52%. Sedangkan justru terjadi penurunan realisasi, pada tahun 2005 hanya 62,09%, dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2004) sebesar 84,52%. Artinya control anggaran masih lwmah dan semakin memperburuk kondisi kesehatan yang sebenarnya masih butuh dana besar.

Sistem Jaminan Kesehatan

Sistem jaminan kesehatan di Indonesia memang sedang mengalami suatu transformasi yang cukup positif. Namun, dapat dirasakan bahwa sistem jaminan di Indonesia belum mampu melindungi masyarakat Indonesia secara tepat guna. Ketidakefektifan ini terlihat pada bagaimana program semacam Askes (Asuransi Kesehatan), Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), dan produk lainnya dilaksanakan, Program Jaminan Sosial selama ini diselenggarakan oleh PT Askes Indonesia, PT Taspen, PT Jamsostek, dan PT Asabri, dirasa kurang efektif setidaknya karena dua hal. Pertama, sedikitnya jumlah pemegang polis, dengan kata lain kurangnya jangkauan jaminan sosial. Kedua, pemerintah perlu meninjau ulang penyedia penyedia sistem jaminan kesehatan yang sifatnya *non-profit*.

Apalagi terkait dengan UU tersebut kemudian dikenal sebagai UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada prinsipnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memberdayakan kemampuan rakyat sendiri. asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Dwiputra, 2009).

Paradigma yang salah dalam dunia Kesehatan Indonesia

Salah satu problem besar dalam dunia kesehatan Indonesia adalah kurangnya paradigma “mencegah lebih baik daripada mengobati”. Sistem jaringan kesehatan yang sifatnya *pay per service* membuat dokter tidak punya insentif untuk membuat masyarakat sehat. Dokter justru identik dengan orang sakit. Hal ini tidak sesuai dengan program Departemen Kesehatan yaitu Visi Indonesia Sehat yang seharusnya berakhir pada tahun 2010.

Paradigma kesehatan Indonesia masih bersifat kuratif (menyembuhkan). Fokus pemerintah pada Jamkesmas memang baik, tetapi menunjukkan bahwa paradigma kuratif masih diandalkan. Padahal kesehatan lebih baik tercapai dalam usaha-usaha preventif. Hal ini juga terkait pada tingkat pelayanan kesehatan di Indonesia yang dari primer hingga tersier mengabaikan paradigma pencegahan.

Padahal seperti yang diungkapkan Gosse (1983) faktor-faktor penentu masyarakat sehat adalah (1) indikator sosial (pendidikan, gizi, transportasi, komunikasi) dan sanitasi (tersedianya air bersih dan lingkungan sehat) berkontribusi sebesar 88%, (2) indikator ekonomi (GNP) sebesar 2%, dan (3) pelayanan kuratif (dokter, rumah sakit) sebesar 10%. Dapat disimpulkan paradigma kuratif selama ini telah salah kaprah. Tindakan semacam ini hanya mempengaruhi 10% upaya penciptaan masyarakat sehat.

Akibatnya tingkat kesehatan buruk, pada akhirnya akan memberatkan sistem jaminan sosial dalam bentuk Jamkesmas ataupun bentuk perlindungan kesehatan lainnya. Hal ini akan berujung pada semakin terteklannya anggaran pemerintah yang juga sudah dalam porsi yang sedikit.

E. Petisi Kebijakan Pemerintah

Kita sepenuhnya menyadari bahwa *human capital* itu penting, dan amat bergantung pada pendidikan dan kesehatan. Kaitannya dalam perekonomian terutama pada produktivitas masyarakat. Namun, sudah dipaparkan begitu banyak permasalahan yang muncul dalam pembangunan pendidikan dan kesehatan.

Demi mengentaskan persoalan di atas maka dirasa perlu bagi pemerintah untuk melakukan program-program nyata. Program-program tersebut haruslah dilandasi suatu rancang bangun yang sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang telah diungkapkan di atas. Untuk itu Simposium Ekonomi Nasional 2009 lewat diskusi mahasiswa-mahasiswa di Indonesia mengemukakan beberapa poin rekomendasi sebagai landasan langkah-langkah pemerintah ke depan sebagai berikut.

Pada bidang Pendidikan

1. Realisasikan anggaran 20% APBN untuk pendidikan (di luar komponen gaji guru, dosen, dan sekolah kedinasan).

Tujuan Kebijakan:

untuk meningkatkan akses atas pendidikan dan standar kualitas atas pendidikan yang berlaku menyeluruh dan non-diskriminasi.

Parameter: telah terpenuhinya 20% anggaran pendidikan dari APBN.

Langkah-langkah:

- a. Optimalisasi anggaran pendidikan dengan cara mengurangi pengeluaran Negara yang dirasa tidak perlu, misalnya mengurangi tunjangan anggota dewan terkait kunjungan ke daerah, ke luar negeri atau tunjangan lain yang dirasa di luar kewajiban masyarakat.
- b. Memisahkan biaya pendidikan dengan biaya administratif yang dibebankan pada 20% anggaran pendidikan seperti gaji/tunjangan guru dan tenaga kependidikan, serta biaya operasional dan investasi (sudah termasuk perhitungan gaji/tunjangan guru dan tenaga kependidikan)

- c. Restrukturisasi hutang luar negeri guna meningkatkan APBN yang kemudian dapat di gunakan untuk meningkatkan anggaran pendidikan.
2. Ciptakan sistem pengawasan yang efektif guna menekan kebocoran anggaran Negara di sektor pendidikan.

Tujuan kebijakan:

Terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran pendidikan.

Parameter: Realisasi sesuai alokasi anggaran yang telah ditetapkan pemerintah

Langkah-langkah:

- a. Membentuk sebuah tim audit khusus (internal) yang bertugas mengawasi alokasi anggaran APBN untuk pendidikan.
 - b. Menetapkan dan menjalankan sistem monitoring dan evaluasi berkala pengelolaan dana pendidikan di pusat dan daerah.
 - c. Menjalin hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah lewat pembangunan sistem pendanaan pendidikan yang transparan
 - d. Menjalankan *performance based audit* dalam kinerja setiap lembaga pendidikan
3. Realisasikan Standar Nasional Pendidikan dalam hal kurikulum, insfrastruktur serta kualitas tenaga Pendidik guna pengembangan pendidikan di tiap-tiap daerah.

Tujuan:

Mewujudkan pemerataan standar pendidikan di Pusat dan Daerah

Parameter: Terwujudnya standar pendidikan yang berlaku secara nasional.

Langkah-langkah:

- a. Menetapkan standar minimum pendidikan nasional terkait sesuai dengan PP No.65 Tahun 2005 demi meningkatkan kualitas pendidikan

- b. Revisi standar yang digunakan sebagai basis perhitungan biaya agar tidak terlalu mahal dan rancu dalam hal pelaksanaannya. Selama ini pemerintah daerah hanya memenuhi Standar Pelayanan Minimal dan tidak wajib mengikuti Standar Nasional Pendidikan.
4. Tingkatkan kualitas dan kesejahteraan guru
Tujuan:
Meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, terutama tenaga kerja honorer
Parameter: Meningkatnya human development index Indonesia (HDI), menurunnya jumlah tenaga pendidik yang memiliki pekerjaan sampingan selain di bidang akademik.
Langkah- langkah:
 - a. Menetapkan standar gaji tenaga pendidik (Remunerasi gaji guru dan dosen)
 - b. Memberikan insentif kepada tenaga pendidik yang berprestasi, sebagai stimulus untuk memacu peningkatan kinerja dan prestasi tenaga pendidik secara keseluruhan

Kesehatan

1. Meningkatkan sumber pembiayaan kebijakan di sektor kesehatan.
Tujuan: Menambah sumber pembiayaan untuk mendanai program-program penanggulangan maupun program-program pencegahan
Parameter: Alokasi anggaran di bidang kesehatan mencapai 5% hingga 15% dari PDB dan dapat mendanai klaim-klaim asuransi kesehatan termasuk program-program kesehatan pemerintah
 - a. Melakukan kajian mendalam mengenai kebutuhan dana untuk memenuhi program-program kesehatan pemerintah.
 - b. Peningkatan alokasi anggaran untuk kesehatan setidaknya 5% dari PDB/15% dari APBN.
 - c. Naikkan cukai rokok karena rokok merupakan salah satu penyumbang biaya kesehatan.

- d. Mewujudkan SJSN yang merupakan sebuah asuransi bersifat universal sehingga mengurangi beban anggaran Negara dalam APBN
- e. Memberikan regulasi dan insentif fiskal bagi perusahaan-perusahaan agar memiliki program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam program kesehatan masyarakat, melihat kecenderungan CSR yang masih terfokus di bidang pendidikan.

- 2. Ubah fokus kebijakan pemerintah di bidang kesehatan yang awalnya kuratif menjadi promotif dan preventif.

Tujuan: Menciptakan kondisi masyarakat yang sehat

Parameter: Tercapainya seluruh tujuan-tujuan dalam MDG'S yang harus dicapai tahun 2015, antara lain menurunkan tingkat malnutrisi hingga 19%, *infant mortality rate* sebesar 23 per 1000 kelahiran, *maternal mortality rate* hingga 102 per 1000 kelahiran.

Langkah –langkah:

- a. Menganangkan kembali Visi Indonesia Sehat yang sebelumnya sudah dicanangkan tahun 1999 dan seharusnya berakhir tahun 2010 mendatang
 - b. Mengembalikan kembali fungsi Puskesmas kepada fungsi utamanya yaitu memberikan penyuluhan tentang kesehatan di masyarakat tidak lagi sebagai balai pengobatan
 - c. Memperbanyak iklan layanan masyarakat tidak hanya ketika ada kasus-kasus tertentu saja. Departemen Kesehatan harus mampu meningkatkan kinerja penyuluhannya dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga masyarakat setempat seperti LKMD di pedesaan, atau bekerja sama dengan kantor-kantor pemerintahan seperti kecamatan dan kelurahan
 - d. Meningkatkan program – program dasar kesehatan dasar seperti pemberantasan penyakit cacangan pada anak-anak, sehingga memperbaiki kualitas intelektual anak-anak Indonesia
 - e. Pemerintah mampu memonitor dan mendesak pemerintah daerah sesuai dengan otoritasnya untuk mengembangkan penyuluhan kesehatan tingkat daerah.
- 3. Wujudkan sistem jaminan sosial yang terintegrasi sesuai dengan amanat UU No.40 tahun tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Tujuan:

Parameter: Berhasil mewujudkan BPJS (Badan Penyedia Jaminan Sosial) untuk mengintegrasikan program-program jaminan akses kesehatan masyarakat

Langkah-langkah:

- a. Meninjau ulang keberadaan P.T. Askes, P.T. Asabri, P.T. Taspen, dan P.T. Tmm sebagai lembaga sosial
- b. Melebur lembaga-lembaga penjaminan sosial yang sudah disebutkan yaitu P.T. Askes, P.T. Asabri, P.T. Taspen, dan P. ke dalam suatu badan yang terintegrasi yang nantinya berbentuk BPJS.
- c. Memastikan BPJS berfungsi sebagai suatu lembaga jaminan kesehatan sosial yang non-profit yang sifatnya universal.
- d. Mengevaluasi keberadaan lembaga-lembaga jaminan kesehatan seperti perusahaan asuransi lain diluar BPJS sebagai lembaga swasta yang tetap diawasi oleh pemerintah dalam menentukan premi dan kepastian pemenuhan klaimnya.
- e. Setiap warga Negara wajib mengikuti BPJS sehingga terkumpul iuran sebagai sumber pendanaan
- f. Mewujudkan suatu standar mutu dan pelayanan dengan membentuk badan khusus yang mengurus hal tersebut.

TEMA : PENGANGGURAN

Jahen Fachrul Reski
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
(Anggota Tim Perumus Simposium Ekonomi Nasional)

Nizar
Universitas Jendral Soedirman
(Finalis lomba paper Simposium Ekonomi Nasional)

Muh. Ikhsan Hariadi dan Wikca Pratita
Universitas Airlangga
(Finalis lomba paper Simposium Ekonomi Nasional)

Prastowo dan Aditya Rangga Yogatama
Universitas Gajah Mada
(Finalis lomba paper Simposium Ekonomi Nasional)

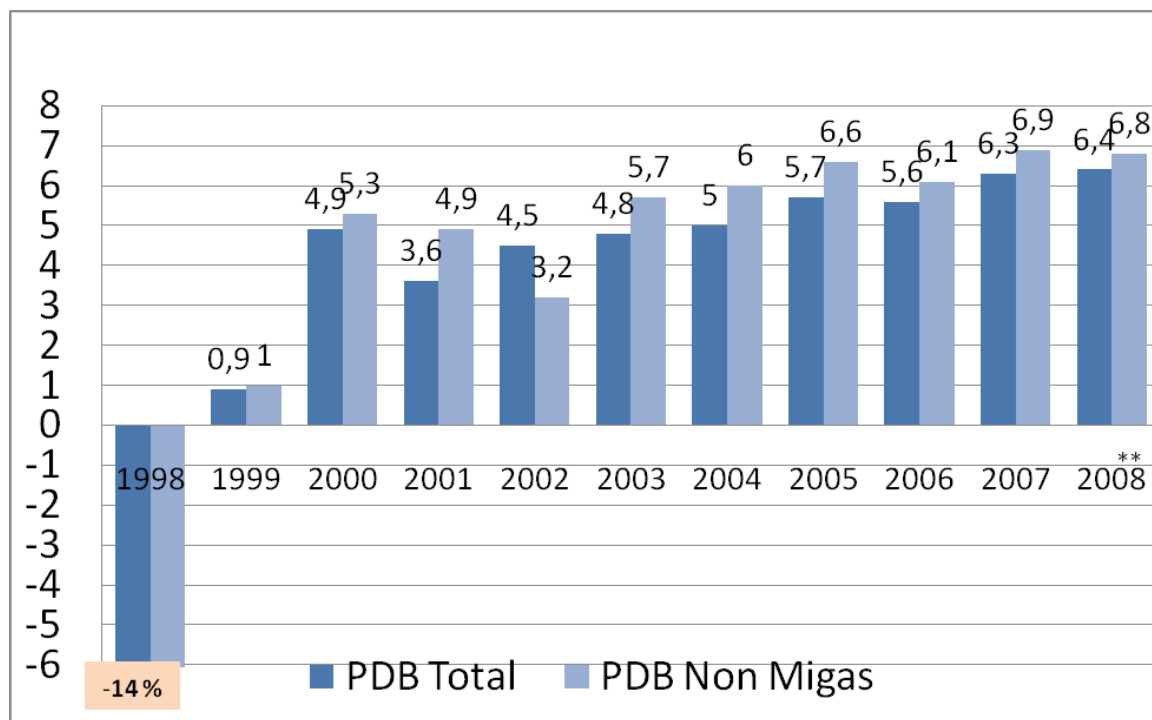
Bintang Dwitya, Nila Armelia Windasari dan Dhita Normaliza
Universitas Airlangga
(Delegasi Simposium Ekonomi Nasional)

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya manusia yang berlimpah dan memiliki kesempatan yang begitu besar untuk memaksimalkan kondisi ini. Ada 220 juta rakyat Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan roda perekonomian negara, namun sayangnya realita yang terjadi mengatakan sebaliknya. Dari begitu banyaknya penduduk usia produktif yang dimiliki oleh Indonesia, ada 19 juta orang yang menjadi pengangguran (BPS: 2008). Ada 8,6 % penduduk kita yang menganggur dan permasalahan ini harus bisa segera diselesaikan. Hal ini karena pengangguran akan berimplikasi yang cukup signifikan terhadap peningkatan pengangguran. Apabila kedua permasalahan struktural itu timbul, maka negara berada pada kondisi yang sangat gawat. Oleh karena itulah dibutuhkan upaya bersama dalam mengatasi masalah pengangguran ini.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai upaya penanggulangan masalah pengangguran di Indonesia, ada baiknya kita melihat indikator perekonomian Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Krisis moneter yang terjadi pada 1997-1999 memberikan dampak yang begitu keras bagi perekonomian kita. Ditambah dengan krisis politik serta luntarnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah membuat kita berada pada posisi yang benar-benar genting. Pengangguran meningkat menjadi 6,4 juta jiwa, penduduk miskin meningkat pula persentasenya menjadi 27,1 % (BPS dan World Bank, 2007). Kondisi inilah yang dihadapi oleh pemerintah pada saat itu.

Selang sepuluh tahun, kita menunjukkan tren yang begitu menjanjikan. Berdasarkan grafik dibawah, kita bisa melihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami peningkatan semenjak krisis moneter.

Grafik. 1
Laju Pertumbuhan Ekonomi 1998-2008 (dalam persen)



Sumber: Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, 2009

Kita bisa melihat pada grafik diatas bahwa tren pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menunjukkan kondisi yang menjanjikan. Keterpurukan pertumbuhan ekonomi pada tahun 1998 yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi sebesar -14% mulai bisa dilupakan. Hal ini karena semenjak tahun 1999 hingga 2008 pertumbuhan Indonesia selalu positif. Ini menjadi sebuah kondisi yang begitu menyenangkan bagi pemerintahan kita. Tidak hanya itu saja, indikator-indikator makroekonomi lainnya juga menunjukkan hal yang sama.

Tabel. 1
Ikhtisar Ekonomi Makroekonomi Indonesia: 2001-2007

No	Indikator Ekonomi	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007 1)
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,6	4,5	4,8	5,0	5,7	5,5	6,3
	- Non Migas	4,9	5,2	5,7	6,0	6,6	6,1	6,9
2	Inflasi (%)	12,5	10	5,1	6,4	17,1	6,6	6,7
3	SBI rate % (3bulan)	17,63	13,02	8,31	7,43	12,75	9,75	8
4	Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	10256	9318	8593	8940	9713	9050	9130
5	Sektor Eksternal							
	- Cadangan Devisa (USD milyar)	28	32	36,6	36,3	34,7	42,6	56,9
	- Transaksi Berjalan (% thd PDB)	4,2	3,9	3,4	1,2	0,1	2,7	2,6
7	Defisit Anggaran (% thd PDB)	2,4	1,3	1,7	1,3	0,5	0,9	1,2
8	Utang Pemerintah (% thd PDB)	75,3	63,9	57,4	55,5	46,5	39,2	35,5
9	Utang Luar Negeri							
	- % thd PDB	81,0	66,5	56,8	53,8	46,5	35,2	32,7
	- Debt Service Ratio (% thd ekspor)	41,4	33,1	32,3	27,1	17,3	24,8	21,5
10	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,1	9,1	9,7	9,9	11,2	10,3	9,1
11	Tingkat Kemiskinan (%)	18,2	17,4	17,4	16,7	16,0	17,8	16,6

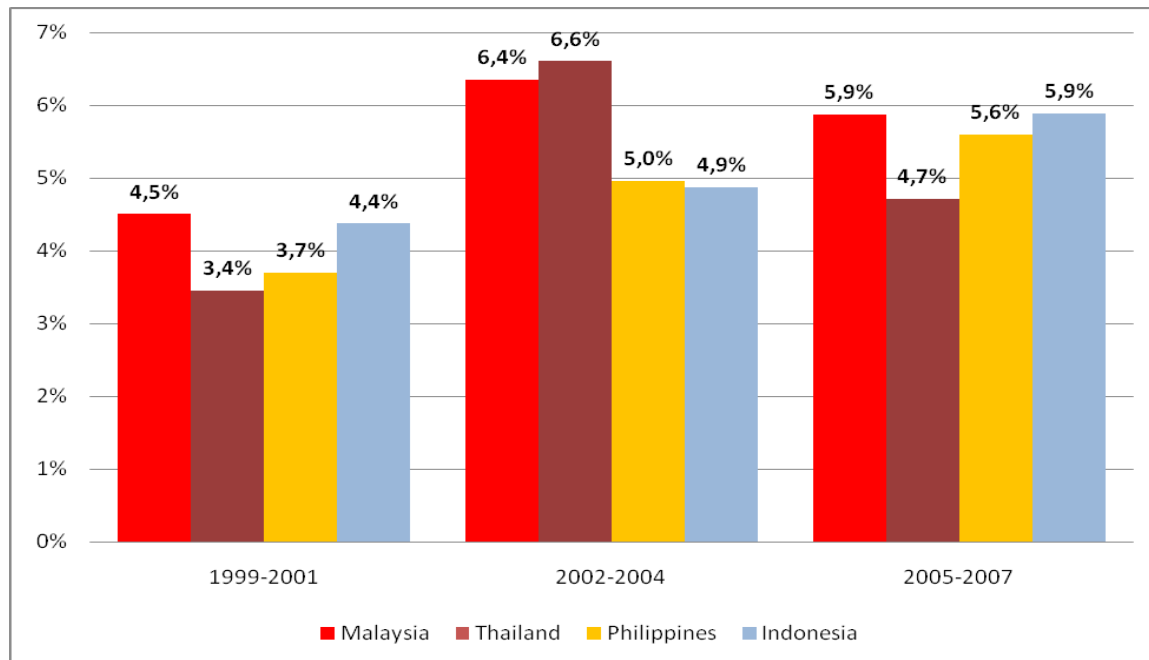
Sumber: Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, 2009

Ikhtisar Ekonomi Makroekonomi Indonesia juga menunjukkan tren yang bagus. Semua indikator makroekonomi menunjukkan angka yang menyenangkan semua pihak. Persentase utang terhadap PDB yang semakin berkurang, stabilnya nilai rupiah, inflasi yang terkendali dan berbagai indikator lainnya menunjukkan kita sudah berada pada jalur yang benar. Namun kalau diteliti lebih dalam lagi, ada dua indikator yang masih bermasalah, yaitu pengangguran dan kemiskinan.

Indonesia, tidak sendirian. Negara-negara ASEAN lainnya juga memperoleh dampak yang sama buruknya dengan Indonesia ketika krisis moneter 1997-1998 terjadi. Hampir semua negara ASEAN terkena imbasnya, tanpa terkecuali. Pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN banyak yang mengalami kontraksi. Namun itu dulu, ketika krisis melanda seluruh ASEAN. Sekarang kondisinya jauh berubah dibandingkan dulu. Laju pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan pada saat krisis. Grafik. 2 menunjukkan laju pertumbuhan negara ASEAN yang terkena krisis, periode 1999-2007.

Grafik. 2

Laju Pertumbuhan PDB Beberapa Negara ASEAN yang Terkena Krisis, 1999-2007



Sumber: Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, 2009

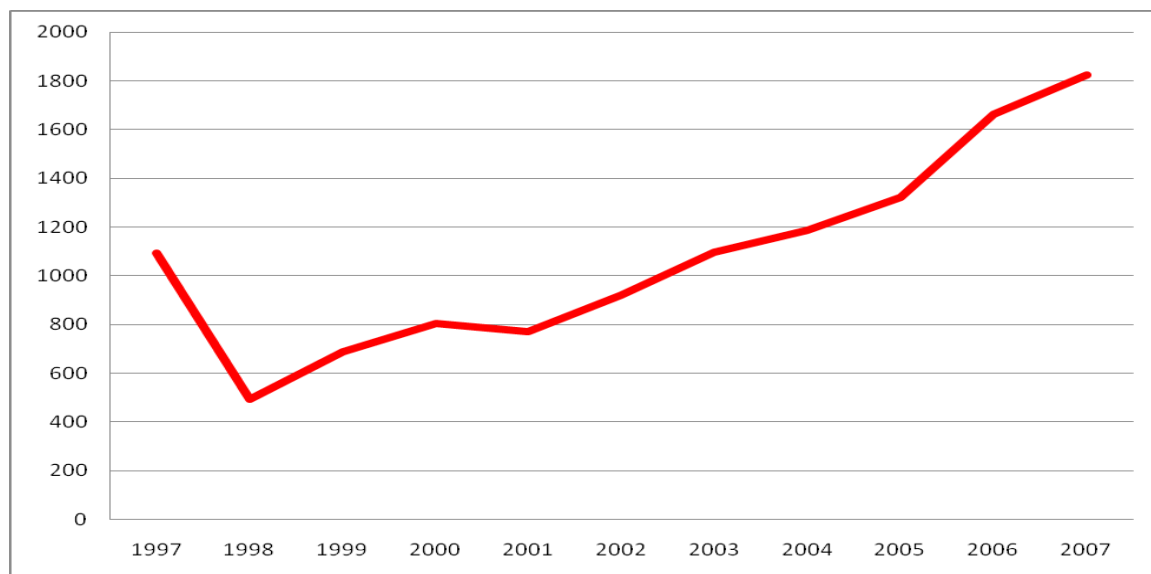
Kita bisa melihat diatas bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN setelah krisis itu terjadi. Semua negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif serta meningkat dengan pesat. Medio 1999-2001, negara-negara ASEAN masih berusaha untuk melakukan stabilisasi dalam perekonomian mereka. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi negara ASEAN yang masih berada dibawah 5% (Malaysia 4.5%, Thailand 3.4%, Filipina 3.7%, dan Indonesia 4.4%). Tetapi periode 2002-2004 terlihat bahwa kondisinya jauh berubah. Malaysia dan Thailand sudah mampu tumbuh diatas 5%, masing-masing Malaysia 6.4% dan Thailand 6.6%. Indonesia dan Filipina belum mampu mencapai kondisi ini, namun bisa dikatakan sudah lebih baik ketimbang saat krisis. Hal senada juga terjadi pada medio 2005-2007. Semua negara mempunyai pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih baik dan memperlihatkan kondisi yang sangat menggembirakan. Walaupun terjadi fluktuasi dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi indikator makroekonomi negara-negara ASEAN sudah bisa kita katakan bagus.

Indonesia, khususnya semenjak tahun 1997-2007 mengalami peningkatan dalam PDB per kapita. Pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus disertai dengan perbaikan indikator ekonomi lainnya membuat peningkatan yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan PDB per kapita Indonesia. Dimana sekarang PDB per kapita kita telah menginjak angka 1800

USD. Memang jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya kita belum bisa dikatakan yang tertinggi, namun jika dilihat semenjak tahun 1997, angka tersebut memberikan angin segar bagi perekonomian Indonesia.

Grafik. 3

Perkembangan PDB per Kapita Indonesia, 1997-2007 (USD)



Sumber: Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, 2009

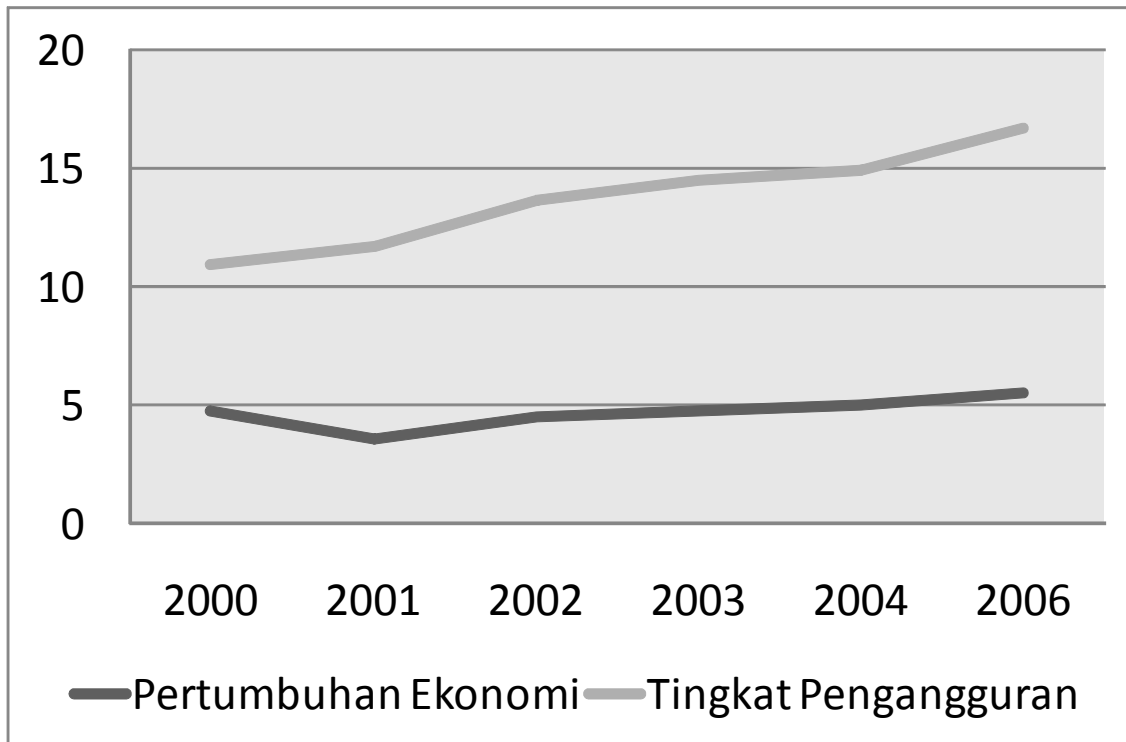
Realita Pengangguran di Indonesia

Seperti yang telah dibahas sebelumnya kondisi makroekonomi Indonesia telah berada pada tahap yang begitu menggembirakan. Segala indikator makroekonomi menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Namun ada dua hal yang masih menjadi permasalahan struktural Indonesia, yaitu pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran akan menjadi fokus utama kita, karena pada bagian ini kita akan merumuskan kebijakan apa saja yang hendaknya dilaksanakan oleh pemerintah untuk mereduksi jumlah pengangguran.

Berdasarkan tabel. 1 kita melihat bahwasanya kondisi pengangguran di Indonesia masih memprihatinkan. Ada 9,1% rakyat Indonesia yang menganggur dan tidak memperoleh pekerjaan. Padahal kondisi pertumbuhan ekonomi kita sudah begitu menggairahkan. Ini tentunya berbeda dengan *Okun's Law* yang menyatakan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mengurangi angka pengangguran. Justru semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, jumlah pengangguran justru semakin meningkat. Seperti yang diperlihatkan oleh grafik. 4 tentang hubungan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan angka pengangguran.

Grafik. 4

Pertumbuhan Ekonomi yang Dibarengi dengan Peningkatan Pengangguran



Sum

ber: BPS

Dari grafik diatas kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk mengurangi tingkat pengangguran atau pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak merata dan tidak menyangkut hajat hidup orang banyak. Kondisi inilah yang harus segera dicari tahu penyebabnya. Karena semakin tingginya pertumbuhan ekonomi harusnya bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Bila kondisi ini tidak terjadi berarti ada yang salah dalam siklus perekonomian di Indonesia.

Pengangguran dan Kemiskinan

Pengangguran erat kaitannya dengan tingkat pengangguran. Dibawah kita bisa melihat korelasi tingkat pengangguran dengan kemiskinan.

Tabel. 2
Data Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia

Indikator	1996	1997	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Persentase penduduk miskin (berdasarkan kriteria miskin yang ditetapkan Pemerintah)	15,7	27,1	16	15,1	15,2	16	17,8	16,6
Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan internasional 1 (dengan penghasilan kurang dari US\$ 1 per hari)	7,8	12,0	7,2	6,6	7,4	6,0	8,5	6,7
Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan internasional 2 (dengan penghasilan kurang dari US\$ 2 per hari)	50,5	65,1	53,5	50,1	49,0	45,2	49,6	45,2
Tingkat pengangguran (persentase mereka yang menganggur dari total angkatan kerja)	4,9	6,4	9,1	9,5	9,9	11,2	10,3	9,1

Sumber: BPS dan World Bank, 2007

Berdasarkan tabel. 2 pengangguran dan kemiskinan sangat erat kaitannya. Rata-rata orang miskin adalah pengangguran, namun tidak semua penganggur adalah orang miskin. Walaupun begitu jika lama kelamaan para penganggur yang tidak miskin ini tetap tidak mempunyai pekerjaan, contohnya para pengangguran friksional—para mahasiswa kaya yang masih bergantung kepada orangtua—tentunya akan menjadi miskin. Inilah alasan kenapa kedua masalah ini harus bisa segera diselesaikan. Karena ketika kita terlalu berlarut-larut dalam menyelesaikan permasalahan ini, maka tidak negara tidak akan mampu mengembangkan sektor yang lain. Padahal sektor yang lain ini juga membutuhkan perhatian dan pengembangan yang lebih dibandingkan sekarang.

Pengangguran dan Pendidikan

Pengangguran mempunyai hubungan yang sangat erat apabila dikaitkan dengan tingkat pendidikan. Kebanyakan orang-orang yang menganggur adalah mereka yang tingkat pendidikannya hanya sebatas SD-SLTA. Lebih menariknya lagi, tingkat pendidikan yang mempunyai penyerapan tenaga kerja yang tinggi justru pendidikan vokasi atau keterampilan, bukan universitas. Hal ini menandakan bahwa tenaga kerja yang dibutuhkan di Indonesia

adalah tenaga kerja yang terampil dan siap pakai. Makanya lulusan-lulusan yang begitu diminati oleh para pencari kerja adalah tamatan sekolah vokasi atau keterampilan.

Dibawah ini kita bisa melihat tingkat pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan yang mereka punyai. Hal yang sangat menarik adalah jumlah pengangguran SLTA umum sangat tinggi dibandingkan SLTA kejuruan. Hal senada juga terjadi jika dibandingkan dengan SMP. Pengangguran SLTA juga lebih tinggi dibandingkan SMP, padahal tingkat melanjutkan pendidikan ke SLTA bagi masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Namun jumlah pengangguran mereka yang tamat SLTA lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang hanya tamat SMP. Universitas ternyata juga tidak menjamin kepastian mendapatkan pekerjaan. Masih banyak lulusan universitas yang tidak memperoleh pekerjaan. Hal ini tentunya menjadi sebuah anomali, karena walaupun mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dan tentunya pengetahuan yang lebih, para lulusan universitas ini justru banyak yang menjadi penganggur. Bisa jadi karena ketidakcocokan dengan pekerjaan yang didapatkan atau pun karena masih mencari pekerjaan, namun ini bisa dikatakan sungguh sangat menyayangkan.

Tabel. 3
Penganggur Menurut Pendidikan

	Tidak/ belum pernah sekolah	Belum/ tidak tamat sekolah	SD	SLTP	SLTA Umum	SLTA Kejuruan	Diploma I,II,III/ Akademi	Univer- sitas	JUMLAH
2003	352,5	710,4	2.495,9	2.458,9	2.435,8	1.037,1	202,8	245,9	9.939,3
2004	336,0	668,3	2.275,3	2.690,9	2.441,2	1.254,3	237,3	348,1	10.251,4
2005 Feb	342,7	670,1	2.541,0	2.680,8	2.680,8	1.230,8	322,8	385,4	10.854,3
2005 Nov	264,5	673,5	2.729,9	3.151,2	3.069,3	2.037,6	308,5	395,5	11.899,3
2006 Feb	234,5	615,0	2.675,5	2.860,0	2.842,9	1.204,1	297,2	375,6	11.104,7
2006 Agt	170,7	611,3	2.589,7	2.730,0	2.851,5	1.305,2	278,1	395,6	10.932,0
2007 Feb	145,8	520,3	2.753,5	2.643,1	2.630,4	1.114,7	330,3	409,9	10.547,9
2007 Agt	94,3	438,58	2.179,8	2.264,2	2.532,2	1.538,3	397,2	566,6	10.011,1
2008 Feb	79,8	448,4	2.216,7	2.166,6	2.204,4	1.165,6	519,9	626,2	9.427,6

Sumber: BPS

Memaksimalkan Sektor Informal

Ada salah satu cara yang bisa kita simpulkan ketika melihat banyaknya penyerapan tenaga kerja dari lulusan sekolah kejurusan dan keterampilan, yaitu memaksimalkan sektor informal. Berdasarkan tabel. 4 kita bisa melihat bahwa sektor informal menjadi tempat yang paling ampuh untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Hal ini terlihat dari banyaknya penyerapan tenaga kerja di sektor ini. Ada 66.3 juta penduduk Indonesia yang bekerja pada sektor informal pada tahun 2005. Ini merupakan sebuah angka yang fantastis. Berdasarkan angka tersebut, bisa dikatakan ada lebih dari 69,83% penduduk Indonesia yang bergerak pada sektor tersebut. Sisanya, sekitar 28.65 juta orang bekerja pada sektor formal, baik sebagai majikan ataupun sebagai pegawai tetap. Kondisi ini terus berada pada kondisi yang stabil, baik pada tahun 2006 maupun 2007. Kontribusi sektor informal terhadap penyerapan tenaga kerja masih besar, masing-masing 65,78% dan 69%. Sebuah angka yang sangat besar ditengah sulitnya membuka lapangan kerja bagi penduduk Indonesia. Solusi pemanfaatan lapangan kerja ini tentunya memberikan ruang yang lebih besar untuk peningkatan kesempatan kerja bagi penduduk Indonesia serta mengurangi jumlah pengangguran yang ada.

Tabel. 4

Jumlah (dalam juta jiwa) dan Persentase Penduduk Indonesia yang Menekuni Sektor Formal dan Informal

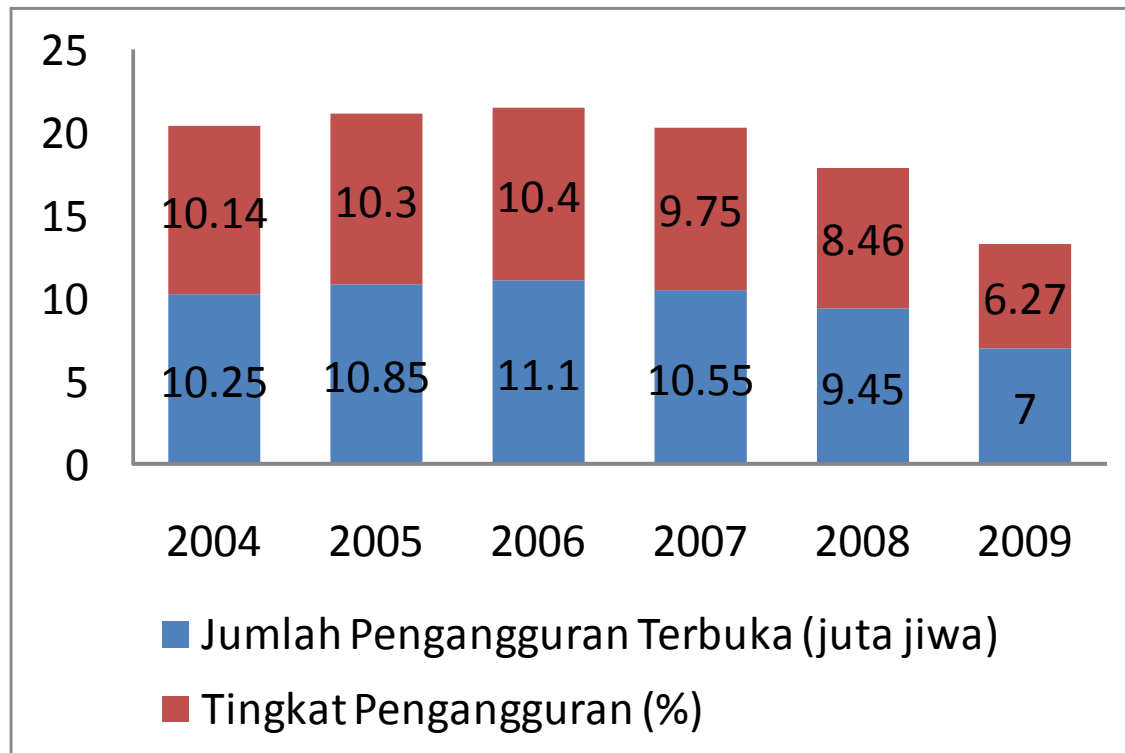
Status ketenagakerjaan	Jumlah penduduk Indonesia (juta jiwa)			Persentase Penduduk Indonesia (%)		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
Sektor Formal	28,65	29,67	30,92	30,17	31,08	30,94
Majikan	2,91	2,85	2,88	3,06	2,98	2,88
Pegawai tetap	25,74	26,82	28,04	27,11	28,1	28,06
Sektor Informal	66,3	65,78	69	69,83	68,9	69
Bekerja sendiri	17,48	19,5	20,32	18,41	20,43	20,33
Bekerja sendiri plus asisten tidak tetap	21,24	19,95	21,02	22,37	20,9	21,03
Buruh musiman pertanian	4,95	5,54	5,92	5,21	5,8	5,92
Buruh musiman non-pertanian	4,09	4,62	4,46	4,31	4,84	4,46
Pekerja tanpa upah tetap	18,54	16,17	17,28	19,53	16,94	17,29
Total	94,95	95,46	99,93	100	100	100

Sumber: Faisal Basri, 2009

Berdasarkan komponen-komponen diatas kita bisa melihat berapa sebenarnya jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Sebuah data resmi menunjukkan tingkat pengangguran pada periode 2004-2009. Memang, jumlah pengangguran di Indonesia berkurang semenjak 2007-2009, namun kebanyakan orang berpendapat bahwa angka yang sebenarnya jauh lebih

besar ketimbang angka yang dilansir pemerintah. Walaupun begitu data dibawah bisa memberikan kita gambaran kondisi yang sebenarnya di Indonesia. Begitu banyaknya orang yang menganggur dan dibutuhkan upaya yang konkrit apabila ingin segera menyelesaikan jumlah pengangguran.

Grafik. 5
Data Resmi Tingkat Pengangguran, 2004-2009



Sumber: Faisal Basri, 2009

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kondisi diatas, kita bisa melihat bahwa kondisi pengangguran di Indonesia masih berada pada taraf yang belum begitu bagus. Oleh karena itu diharapkan adanya upaya dari pemerintah untuk bisa mengurangi jumlah ini. Memang mengurangi jumlah pengangguran ini tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Tidak bisa secepat mungkin untuk menyelesaikan ini semua, tetapi harapannya pemerintah bisa sigap dan tanggap untuk menguranginya.

Kami dari mahasiswa memberikan beberapa rekomendasi kebijakan yang dibuat berdasarkan analisa dan hasil diskusi selama mengikuti Simposium Ekonomi Nasional (SEN) 2009 yang lalu. Ada beberapa kebijakan yang kami anggap sangat penting untuk bisa

dilaksanakan atau minimal menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah. Kami mengerti bahwa pemerintah mungkin telah memikirkannya jauh sebelum kami memberikan rekomendasi ini, tetapi kami belum melihat tindakan yang konkrit dan hasil yang memuaskan. Oleh karenanya akan ada *empat* kebijakan yang kami rekomendasikan kepada pemerintah dalam upaya pengurangan jumlah pengangguran di Indonesia. Adapun keempat kebijakan tersebut adalah:

1. Memasukkan *entrepreneurship* dan *softskill* dalam kurikulum di setiap jenjang pendidikan
4. Pemberian bantuan modal usaha disertai pelatihan keterampilan bagi pengangguran terbuka
3. Meningkatkan partisipasi tenaga kerja Indonesia dalam setiap investasi dalam negeri
4. Optimalisasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Industri Kreatif.

Kebijakan 1:

“Memasukkan *entrepreneurship* dan *softskill* dalam kurikulum di setiap jenjang pendidikan”

Tujuan: Membentuk kreativitas dan jiwa kemandirian di dalam diri setiap anak bangsa

Parameter:

1. Minimal 30% dari jumlah sekolah formal di setiap tingkatan di setiap daerah tingkat II (Kabupaten/Kota) menerapkan kurikulum tersebut
2. Minimal 30% dari penduduk yang berusia 17-24 tahun di daerah tingkat I (Provinsi) memiliki usaha sendiri

Langkah-langkah:

1. Satu tahun pertama, berupa sosialisasi dan memastikan tiap sekolah memasukkan kurikulum tersebut.
2. Tiga tahun berikutnya, memastikan program telah berjalan dan menghasilkan *entrepreneur* sesuai dengan target.
3. Tahun terakhir, evaluasi program
4. Tahun pertama sampai dengan tahun kelima, pengawasan berkelanjutan

Kebijakan 2:

“Pemberian bantuan modal usaha disertai pelatihan keterampilan bagi pengangguran terbuka”

Tujuan: Mengurangi jumlah pengangguran yang ada secara langsung

Parameter: Turunannya tingkat pengangguran hingga 5% pada tahun 2014

Langkah-langkah:

1. Pendataan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) dan pelaksanaan pelatihan keterampilan oleh Balai Latihan Kerja (BLK).
2. Optimalisasi pendanaan melalui program pemerintah yang sudah ada seperti: Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
3. Melakukan pengawasan dalam penyaluran dana dan pelaksanaan program.
4. Melakukan evaluasi tahunan.

Kebijakan 3:

”Meningkatkan partisipasi tenaga kerja Indonesia dalam setiap investasi dalam negeri”

Tujuan : Memaksimalkan potensi tenaga kerja Indonesia di negeri sendiri

Parameter: Mewajibkan setiap investor untuk melibatkan minimal 70% tenaga kerja dalam negeri dari keseluruhan tenaga kerja yang digunakan.

Langkah:

Pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Bab VI (Ketenagakerjaan) Pasal 10 ayat 1-4.

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.*
- (2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Kebijakan 4:

“Optimalisasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Industri Kreatif”

Tujuan:

1. Memberdayakan potensi UMKM dan Industri Kreatif berbasis sektoral di setiap daerah
2. Meningkatkan *market share* dan daya saing produk UMKM dan Industri Kreatif

Parameter:

Komposisi pendapatan dari UMKM dan Industri Kreatif dalam PDRB meningkat

Langkah:

1. Pemetaan potensi setiap daerah untuk dikembangkan.
2. Memperkuat posisi UMKM dan Industri Kreatif dengan kelembagaan yang kuat.
3. Memberikan insentif (bagi UMKM dan Industri Kreatif) berbasis kinerja.

TEMA : KEMISKINAN

Rachmat Satriotomo

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
(Anggota Tim Perumus Simposium Ekonomi Nasional)

Drafit Tomele

Universitas Hasanuddin
(Finalis lomba paper Simposium Ekonomi Nasional)

Desi Sri Wahyu Utami

Universitas Indonesia
(Finalis lomba paper Simposium Ekonomi Nasional)

Nurul Latifah

Universitas Airlangga
(Finalis lomba paper Simposium Ekonomi Nasional)

Nova Kurniawan, Riski Raisa dan Lina Budiarti

Universitas Gajah Mada
(Delegasi Simposium Ekonomi Nasional)

*“Poverty is not created by poor people. It is produced by our failure to create
institution to support human capabilities.”*

-Muhammad Yunus-

Secara harfiah kemiskinan berasal dari kata miskin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata miskin berarti tidak berharta, serba kekurangan atau berpenghasilan rendah. Sedangkan pengertian kemiskinan dalam arti kemiskinan absolut adalah situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum. Di atas adalah sebuah pernyataan penuh makna yang diungkapkan oleh Prof. Muhammad Yunus, pendiri Grameen Bank, Bangladesh (penerima nobel perdamaian tahun 2006). Pernyataan tersebut hendak menyiratkan suatu hal bahwa kemiskinan itu sebenarnya akibat kesalahan pembuat kebijakan dan keputusan dalam pembangunan negara yang tidak menyentuh kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan manusia. Kemiskinan merupakan buah dari salah urus dalam pengelolaan negara, dan tidak ada persoalan yang lebih besar selain kemiskinan.

Tak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan merupakan masalah krusial yang selalu

muncul di setiap peradaban bangsa-bangsa di dunia. Dewasa ini kemiskinan dijadikan sebagai *common enemy* oleh masyarakat dunia karena sifatnya yang kontraproduktif dan meliputi tiga dimensi vital: ekonomi, sosial dan politik. Dalam artian ekonomi, kemiskinan timbul akibat alokasi sumberdaya yang tidak seimbang. Secara sosial, kemiskinan berhubungan dengan tidak cukupnya akses pada fasilitas pokok yang diperlukan untuk eksistensi terhormat. Sedangkan secara politik kemiskinan berarti sedikit atau tidak adanya akses pada proses pengambilan keputusan. Ketiga komponen ini saling berhubungan dan makin memperparah kemiskinan, masyarakat miskin seolah terjebak dalam lingkaran setan. Anak-anak yang lahir pun dihadapkan pada kondisi yang tidak fair, yang tidak memberikan kesempatan pada mereka untuk mengubah nasib.

Di Indonesia, masalah kemiskinan menjadi tema serius setidaknya untuk dua alasan. Pertama, selama beberapa dasawarsa (orde baru), Indonesia mencatat laju pertumbuhan rata-rata 6-7 persen pertahun, yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari sedikitnya negara di dunia yang mampu mencapai laju pertumbuhan relatif tinggi. Namun ternyata pertumbuhan tersebut tidak memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penurunan kemiskinan relatif (ketimpangan distribusi pendapatan). Menurut Bourguignon (2004) dan Lopez (2004) bahwa pertumbuhan hanya mempunyai dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan jika disertai dengan perubahan distribusi pendapatan secara progresif. Selain itu, menurut Dollar dan Kraay (2002) menegaskan hal serupa bahwa pertumbuhan akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi si miskin jika pertumbuhan disertai dengan kebijakan penegakan hukum, disiplin fiskal, keterbukaan dalam perdagangan internasional, dan strategi pengentasan kemiskinan.

Alasan yang kedua, sebelum krisis ekonomi menerjang Indonesia pada pertengahan tahun 1997, Indonesia membuat kemajuan besar dalam mengentaskan kemiskinan absolut diukur dari tingkat konsumsi. Namun seiring berjalan krisis global yang melanda Indonesia menunjukkan betapa rentannya kemajuan tersebut. Jumlah penduduk miskin kembali meningkat secara tajam dan berjuta-juta penduduk kembali jatuh ke jurang kemiskinan. Pada tahun 1998, jumlah penduduk miskin meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun 1996 yaitu dari 11,3 persen pada tahun 1996 menjadi 24,2 persen atau sekitar 49,5 juta jiwa dari total penduduk pada tahun 1998 (BPS, 1999). Bahkan lembaga internasional memiliki angka yang lebih tinggi yaitu sekitar 129,6 juta jiwa atau sekitar 66,3 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Namun dalam perkembangan berikutnya, jumlah penduduk miskin menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Menurut BPS jumlah penduduk pada tahun 2007 sisa 37,17 juta orang atau sekitar 16,58 persen dari total penduduk. Berbagai upaya pemulihan

ekonomi yang dilakukan pemerintah serta semakin membaik dan stabilnya berbagai indikator makro-ekonomi telah memberikan kontribusi berarti terhadap penurunan angka kemiskinan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep Tentang Kemiskinan

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (1993) menjelaskan kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Pendapat lain dikemukakan oleh Ala dalam Setyawan (2001) yang menyatakan kemiskinan adalah adanya gap atau jurang antara nilai-nilai utama yang diakumulasikan dengan pemenuhan kebutuhan akan nilai-nilai tersebut secara layak. Menurut Chambers dalam Ala (1996), ada lima ketidakberuntungan yang melingkari kehidupan orang atau keluarga miskin yaitu :

- a. kemiskinan (*poverty*)
- b. fisik yang lemah (*physical weakness*)
- c. kerentanan (*vulnerability*)
- d. keterisolasian (*isolation*)
- e. ketidakberdayaan (*powerlessness*)

kelima hal tersebut merupakan kondisi nyata yang ada pada masyarakat miskin di negara berkembang.

Menurut Suparlan (1995) kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin. Menurut Bank Dunia standar itu adalah US\$1 per hari. Seseorang dengan pendapatan dibawah itu berarti dapat dikatakan miskin.

Sementara kemiskinan menurut Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN (1996) adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya.

Sedangkan menurut Biro Pusat Statistik (BPS) standar kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu kurang dari 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada di

lapisan bawah), dan konsumsi non-makanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan).

Selain batasan tersebut, BPS juga memiliki empat belas kriteria keluarga miskin. Empat belas kriteria yang di sebutkan oleh BPS itulah yang digunakan sebagai dasar dalam program penanggulangan kemiskinan melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kriteria-kriteria keluarga miskin ini disosialisaikan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika (2005). Adapun keempat belas kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Luas tanah bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bamboo/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari dalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah ; petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000,00setiap bulannya.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah; tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000,00, seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Terkait program BLT yang digulirkan pemerintahan Presiden SBY, salah satu faktor krusial dari program BLT ini adalah penentuan kriteria rumah tangga miskin. Dari keterangan yang diperoleh penulis, diketahui bahwa indikator awal yang digunakan adalah tingkat pendapatan orang miskin atau dikenal dengan garis kemiskinan. Dengan menggunakan definisi BPS, pemerintah menyatakan bahwa seseorang disebut mendekati miskin dan berhak

memperoleh dana BLT jika memiliki tingkat pendapatan di bawah Rp 175 ribu per bulan. Tentunya angka ini merupakan angka rata-rata dari pendapatan seluruh anggota rumah tangga, sehingga jika dikembalikan kepada definisi dari rumah tangga miskin, maka angka ini perlu dikalikan dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga, yang diasumsikan sama dengan 4 orang. Implikasinya, rumah tangga dikatakan mendekati miskin dan memperoleh dana BLT jika memiliki pendapatan kurang dari Rp 700 ribu per bulan. (Syahrial: 2005)

Indikator ini merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah dalam menentukan target rumah tangga penerima bantuan. Selain itu, terdapat 14 indikator yang ditanyakan dalam survey BPS. Selain kategori mendekati miskin, BPS juga memiliki kategori sangat miskin untuk pendapatan kurang dari Rp 120 ribu per bulan dan kategori miskin untuk pendapatan kurang dari Rp 150 ribu. Idealnya, setiap kelompok rumah tangga miskin yang berbeda seharusnya memiliki tingkat kompensasi yang berbeda pula. Namun, pengkategorisasian seperti ini berpotensi menimbulkan masalah salah klasifikasi yang distortif. Ringkasnya, penulis memiliki pikiran yang sejalan dengan pemerintah untuk memberikan nilai bantuan yang seragam kepada kelompok penduduk miskin meskipun mengorbankan pertimbangan distribusi pendapatan antar kelompok penduduk miskin. (Syahrial: 2005)

Menurut Syahrial (2005) angka minimum pendapatan ini dikenal dengan garis kemiskinan, yaitu batas pendapatan dimana seseorang disebut miskin jika nilai pendapatannya dibawah garis kemiskinan tersebut. Setiap provinsi memiliki perbedaan nilai garis kemiskinan sehingga sudah selayaknya pula memiliki perbedaan nilai kompensasi. Lebih jauh lagi, kebijakan bantuan langsung tunai ini hendaknya tidak berdiri sendiri. Kebijakan ini juga harus mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah antara daerah kaya dan miskin. Kebijakan dengan perlakuan yang sama antar daerah tanpa mempertimbangkan tingkat kemahalan dan kapasitas fiskal yang bervariasi antar daerah, akan menimbulkan potensi persoalan baru yang berkaitan dengan kesenjangan pembangunan antar daerah.

Mengapa perubahan indikator garis kemiskinan terus terjadi? Perubahan indikator ini memang seharusnya terjadi karena harus disesuaikan dengan kondisi perekonomian pada saat itu. Seperti kita ketahui bahwa kondisi perekonomian sebuah negara tidaklah konstan. Nilai tukar rupiah, harga, serta inflasi menjadi dasar pengambilan kebijakan ini. Ketika ketiga aspek yang saling terkait itu mengalami perubahan, tentunya nominal yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan yang minimal pun akan berbeda dari sebelumnya. Kondisi yang terjadi di Indonesia adalah, nominal tersebut setiap tahunnya akan berubah menjadi lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu, inilah mengapa standar garis kemiskinan

itu selalu berubah dan harus berubah. Hal ini didasarkan pula pada nilai etis atau penghargaan terhadap martabat manusia tak terkecuali mereka yang dikategorikan sebagai orang miskin. Dengan adanya penyesuaian ini, di harapkan data di atas kertas yang mencantumkan jumlah penduduk miskin adalah data yang benar adanya dengan kondisi di lapangan, tidak tereduksi dan berperikemanusiaan. Dengan maksud, data yang di sajikan bukan semata-mata data yang berusaha memperkecil angka dengan penggunaan tolak ukur yang sama meskipun kondisi ekonomi berbeda, membiarkan angka-angka yang tereduksi tersebut berkeliaran dan menjadikan subjeknya sebagai “ si miskin terselubung”.

2.2 Klasifikasi Kemiskinan

Kemiskinan dapat di klasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, seperti tingkat keparahan dan penyebab. Berdasarkan tingkat keparahan, kemiskinan dapat dibedakan atas dua kategori, yaitu:

1. Kemiskinan Absolut, dimana dengan pendekatan ini diidentifikasi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. Sehingga kemiskinan bisa diartikan dari melihat seberapa jauh perbedaan antara tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin. Dan bisa disebut dengan garis batas kemiskinan (*poverty line*).
2. Kemiskinan relatif, yaitu perbandingan antara kelompok dalam masyarakat, yaitu antara kelompok miskin, kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi daripada garis kemiskinan, dan kelompok masyarakat yang relatif lebih kaya.

Selain itu, berdasarkan penyebab, kemiskinan dapat dibedakan atas dua kategori, yaitu:

1. Kemiskinan alamiah, yaitu kondisi lingkungan yang miskin, ilmu pengetahuan yang tidak memadai, adanya bencana alam, dan lain-lain.
2. Kemiskinan struktural, yaitu adanya kesalahan dalam menetapkan kebijakan ekonomi, korupsi, kondisi politik yang tidak stabil, kesalahan pengelolaan sumber daya alam, dan lain-lain.

2.3 Indikator Untuk Mengukur Tingkat Kemiskinan Absolut

Di Indonesia, ukuran kemiskinan seringkali didasarkan pada pendekatan yang digunakan oleh BPS. Penduduk miskin ditentukan berdasarkan jumlah pengeluaran

kebutuhan pokok atau tingkat konsumsi per kapita di bawah suatu standar tertentu yang disebut garis kemiskinan. Mereka yang berada di bawah garis kemiskinan tersebut dikategorikan sebagai miskin. Untuk mengukur tingkat kemiskinan absolut digunakan tiga indikator (Adams, 2003 dan Kraay, 2004), yaitu: *poverty headcount index* (PHI), yaitu persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, *poverty gap index* (PGI), yang mengukur selisih antara persentase rata-rata pengeluaran (pendapatan) penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dan *poverty severity index* (PSI), yaitu mengukur kedalaman atau keparahan kemiskinan. Pada pembahasan ini, penulis akan menjelaskan salah satu dari tiga indikator yang spesifik untuk mengukur tingkat kemiskinan absolut, yaitu *poverty headcount index* (PHI). PHI adalah persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jika jumlah (*headcount*) orang miskin (memperoleh pendapatan di bawah garis kemiskinan absolut, Y_p) dinyatakan dengan N_p dan total penduduk dinyatakan dengan N , maka *poverty headcount index* adalah

$$PHI = \frac{N_p}{N}$$

Contoh :

Jika jumlah orang miskin sebanyak 60 orang dan jumlah penduduk sebanyak 300 orang maka PHI sebesar 0,02 atau 20 persen.

2.4 Sebab – Sebab Kemiskinan

Masalah kemiskinan menjadi tema serius, karena masalah kemiskinan sudah melanda semua negara di dunia ini dan membuat hampir semua penduduk menjadi menderita dan terbelakang khususnya penduduk miskin atau kecil. Masalah kemiskinan timbul akibat dari berbagai penyebab seperti, keterbatasan dan ketertidadaan akses serta keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal yang menyebabkan rendahnya produktivitas sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima yang membuat semua negara bekerja keras untuk melawan masalah kemiskinan ini.

Hernando de Soto, dalam buku *The Mystery of Capital*, menjelaskan bahwa pemisah utama kaum miskin dengan pasar modal dunia adalah berbagai hukum dan peraturan pemerintah yang selama ini hanya menguntungkan kaum elite. Ia menghitung betapa lama dan sulitnya wiraswastawan kecil untuk masuk ke dunia bisnis formal di negara-negara berkembang. Di Peru, misalnya, untuk mengurus izin usaha perusahaan saja dibutuhkan waktu 210 hari dan biaya setara dengan upah minimum enam bulan. Akhirnya kebanyakan dari mereka yang terhalang birokrasi seperti itu menjalankan usahanya secara informal.

Lokasi berniaga di wilayah "luar hukum" inilah yang menyebabkan kaum miskin sulit mengembangkan usahanya. Ketiadaan perlindungan hukum ini, menurut Hernando de Soto, yang menjadi penyebab utama ketidakberdayaan kaum miskin di seluruh dunia. Mereka sebenarnya memiliki aset yang lumayan besar, tapi tak dapat dimanfaatkan karena tak diakui hukum yang berlaku. Kesulitan dalam mengakses berbagai modal akhirnya membuat orang miskin biasanya cenderung berada di sektor informal.

Sen dalam Ismawan (2003) mengutarakan bahwa penyebab kemiskinan dan keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas. Akibat keterbatasan dan ketertidadaan akses maka manusia mempunyai keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan apa terpaksa saat ini yang dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya dilakukan). Dengan demikian manusia mempunyai keterbatasan dalam melakukan pilihan, akibatnya potensi manusia untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat.

Menurut Kuncoro (2000) yang mengutip Sharp, penyebab kemiskinan adalah :

1. Secara mikro kemiskinan minimal karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan;
3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi yang berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya. Logika berpikir ini dikemukakan oleh Nurkse dalam Kuncoro (2000), yang mengatakan : "*a poor country is poor because it is poor*" (negara miskin itu miskin karena dia miskin).

2.5 Upaya dalam Pengentasan Kemiskinan

Menurut World Bank, 2001 dalam *Poverty Reduction Strategy Paper* (PRSP), dikemukakan 4 kebijakan yang dapat di kembangkan oleh pemerintah dalam mengentas kemiskinan, yaitu:

1. Menciptakan Peluang
2. Memberdayakan Masyarakat
3. Membangun Kapasitas
4. Perlindungan Sosial

Selain itu, dalam paradigma baru studi kemiskinan (Edi Suharto, 2003) di katakan bahwa:

1. Kemiskinan tidak boleh di lihat secara statis, melainkan secara dinamis;
2. Indikator kemiskinan sebaiknya tidak tunggal, tetapi komposit;
3. Kemiskinan tidak hanya di lihat dari konsep pendapatan,tetapi harus di lihat dari konsep kemampuan sosial;
4. Pengukuran kemampuan sosial di fokuskan pada kemampuan:
 - Memperoleh matapencaharian
 - Memenuhi kebutuhan dasar
 - Mengelola asset
 - Menjangkau sumberdaya
 - Berpartisipasi dalam kegiatan sosial
 - Menghadapi goncangan dan tekanan

3. Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia

Masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia lebih dikarenakan oleh: (1) Sulitnya pemenuhan hak-hak dasar kehidupan manusia antara lain makanan, kesehatan, pendidikan, perumahan dan pendapatan perkapita masyarakat. (2) Kesenjangan pembangunan antara kota-kota besar dipulau jawa dan kota-kota didaerah diluar pulau jawa, dan juga antara kota dengan pedesaan dan daerah terpencil lainnya yang tentunya belum terjamah pembangunan, dan juga potensi sumber daya alam yang berbeda. (3) Guncangan perekonomian sebagai akibat dari lemahnya dasar perekonomian Indonesia, yang mengakibatkan banyaknya pengangguran. (4) Kemiskinan yang dialami oleh kaum perempuan, dimana kurangnya perhatian pemerintah dalam mengikusertakan atau memberdayakan perempuan dalam pembangunan. (5) Kultur dan Budaya daerah yang turut mempengaruhi. (Saptenno: 2008)

Melihat uraian diatas, sebagai masalah yang kompleks, kemiskinan tidak bisa diselesaikan dengan program yang sifatnya jangka pendek, karena salah satu ciri kemiskinan ialah bersifat dimensional dan sifatnya dinamis. Artinya ketika penyelesaiannya tidak secara komprehensif mustahil masalah kemiskinan di Indonesia dapat diselesaikan. Begitu banyak program pengentasan kemiskinan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini tentunya dengan alokasi dana yang tidak sedikit belum menemui sasaran.

3.1. Program Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah

Pada dasarnya, pemerintah Indonesia telah merencanakan program penanggulangan kemiskinan. Namun, program-program kemiskinan di Indonesia selama ini dianggap belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), beliau mencoba menelurkan 12 program pengentasan kemiskinan, yaitu *pertama*, Bantuan Langsung Tunai pada tahun 2006 dianggarkan sebesar Rp 18,8 triliun untuk 19,1 juta keluarga. *Kedua*, program beras untuk rakyat miskin (raskin) di mana pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan produksi beras dalam rangka swasembada pangan. *Ketiga*, bantuan untuk sekolah/pendidikan, termasuk peningkatan kesejahteraan guru dan guru agama dilakukan dengan meningkatkan anggaran pendidikan dari Rp 21,49 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp 50 triliun pada tahun 2007.

Keempat, bantuan kesehatan gratis untuk berobat di Puskesmas dan rumah sakit dilaksanakan melalui pemberian Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) yang mencakup 51 juta peserta. Sejak tahun 2004 Pemerintah telah meningkatkan anggaran sektor kesehatan sebesar 250 persen, hingga pada tahun 2007 ini mencapai Rp 17,24 triliun ditambah Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 3,2 triliun. *Kelima*, pemberian kredit mikro, dan dana bergulir untuk koperasi, usaha kecil dan menengah pemerintah mengembangkan Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro yang kita sebut (P3KUM) dan disalurkan melalui lembaga keuangan mikro berkualitas. *Keenam*, bantuan untuk petani dan peningkatan produksi pangan, pemerintah menyediakan pupuk murah kepada petani sebesar Rp 5,8 triliun.

Ketujuh, bantuan untuk nelayan dan program untuk sektor perikanan, pemerintah telah melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, dan pemberian dana penguatan modal usaha budidaya. *Kedelapan*, pembangunan perumahan rakyat, atau rumah sederhana. *Kesembilan*, peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, termasuk prajurit TNI dan Polri dilakukan dengan meningkatkan gaji pokok dan tunjangan secara cukup tajam, termasuk untuk lauk pauk TNI dan Polri, serta pemberian gaji ke-13.

Kesepuluh, peningkatan kesejahteraan buruh dilakukan melalui pemberian Jaminan Sosial Pekerja yang meliputi Jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan PHK dengan sistem asuransi. *Kesebelas*, bantuan untuk para penyandang cacat diberikan dalam bentuk jaminan kesejahteraan sosial sebesar Rp 300.000 per bulan kepada 3.750 penyandang cacat di 5 provinsi. *Keduabelas*, pelayanan publik yang lebih cepat dan murah untuk rakyat diwujudkan baik dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pengurusan SIM, STNK, BPKP, Paspor, hingga pelayanan pembayaran Pajak, Kepabeanan dan Cukai. Perbaikan pelayanan dilakukan baik dengan melakukan penyederhanaan prosedur, kepastian tarif atau harga, serta kecepatan pelayanan dengan melakukan modernisasi dan penerapan sistem teknologi berbasis elektronik.

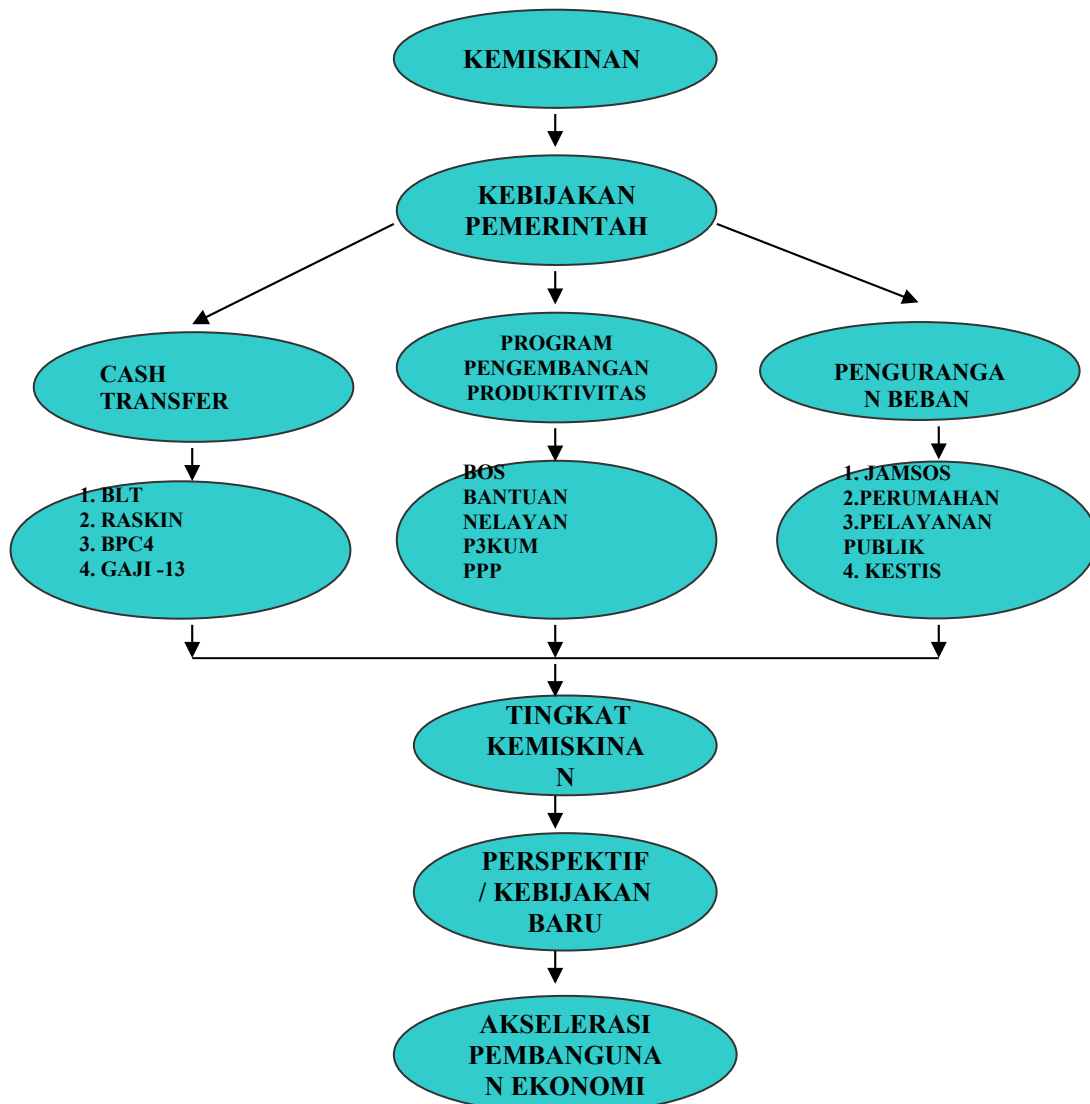
3. 2. Kerangka Pikir Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang paling utama, kompleks dan multidimensional karena masalah kemiskinan tidak hanya menyangkut masalah ekonomi (pendapatan), tetapi juga menyangkut masalah sosial (pendidikan) dan masalah moral (harga diri) dan harus diselesaikan pula dengan kebijakan-kebijakan yang di buat oleh pemerintah. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), beliau mencoba menelurkan 12 program pengentasan kemiskinan yang disusun untuk mengentaskan kemiskinan yang dikelompokkan berdasarkan tiga kelompok, yaitu:

1. *Cash/in kind transfer* (BLT, RASKIN, BPC4, Gaji -13),
2. Program Pengembangan Produktifitas (BOS, Bantuan Nelayan, P3UKM, PPP),
3. Pengurangan Beban Masyarakat (Jamsos, Perumahan, Pelayanan Publik, KESTIS).

Kerangka pikir program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah ditunjukkan oleh Gambar 1 berikut ini.

Gambar 1
Kerangka Pikir Penanggulangan Kemiskinan



Dari Gambar 1 dapat dilihat bagaimana cara pandang pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan bagaimana program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah dilakukan. Melalui strategi ini pencapaian pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan menunjukkan tren yang positif. Seiring waktu persentase penduduk miskin semakin berkurang.

Gambar 2

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia dari Tahun 1996-2008

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)	Persentase Penduduk Miskin
1996	22,50	11,30
1997	34,01	17,47
1998	49,50	24,23
1999	47,97	23,43
2000	38,70	19,14
2001	37,90	18,41
2002	38,40	18,20
2003	37,30	17,42
2004	36,10	16,66
2005	35,10	15,97
2006	39,30	17,75
2007	37,17	16,58
2008	35,0	15,4

Sumber : Diolah dari data Survei Ekonomi Nasional (Susenas)

Dari Gambar 2 bisa dilihat bahwa sejak tahun 1996-2008 tren angka kemiskinan adalah menurun. Fluktuasi hanya terjadi di tahun 1997-1998 ketika terjadi krisis ekonomi di Indonesia dan di tahun 2006 ketika pada akhir tahun 2005 pemerintah menaikkan harga BBM.

3. 3. Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan

Secara umum program penanggulangan kemiskinan bisa dikatakan berhasil menurunkan angka kemiskinan. Namun perspektif penganggulan kemiskinan adalah jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek program *cash/in kind transfer* pemerintah berhasil mengangkat sebagian masyarakat dari garis kemiskinan sehingga angka kemiskinan turun. Namun dalam jangka panjang hasil program-program pemerintah masih belum diketahui. Bisa dikatakan bahwa penurunan angka kemiskinan dalam 5 tahun terakhir ini bukanlah merupakan hal yang fundamental, tapi sangat bergantung dari kebijakan anggaran pemerintah (subsidi). Peningkatan konsumsi masyarakat dalam jangka pendek

dapat didorong dengan adanya berbagai transfer, namun peningkatan kapasitas masyarakat miskin baru dapat diketahui dalam jangka panjang.

3. 3. 1. Evaluasi Program *Cash/In Kind Transfer*

Semua program dalam menurunkan tingkat kemiskinan diklaim pemerintah sudah berjalan sesuai tujuan awal. Misalnya program yang sifatnya cash transfer BLT, Raskin dianggap mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Bantuan Langsung Tunai pada tahun 2006 dianggarkan sebesar Rp 18,8 triliun untuk 19,1 juta keluarga. Pada tahun 2007 dilakukan Program Bantuan Langsung Tunai Bersyarat untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi bagi 500 ribu rumah tangga miskin di 7 provinsi, 51 kabupaten dan 348 kecamatan. Bantuan ini mencakup bantuan tetap, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dengan rata-rata bantuan per rumah tangga sebesar Rp 1,390. Program yang dikatakan langsung mampu mengangkat masyarakat dari garis kemiskinan ini terlihat belum maksimal. Pasalnya pada tahun 2006 dimana program ini diluncurkan pada saat yang sama tingkat kemiskinan mencapai angka 39,30 juta masyarakat miskin dengan persentase 17,75%. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, beberapa pendapat mengatakan bahwa BLT cukup berhasil meredam lonjakan angka kemiskinan terkait kenaikan harga BBM pada akhir tahun 2005. Namun karena jumlahnya yang minim kemungkinan BLT hanya mampu menggeser masyarakat miskin menjadi nyaris miskin (*near poor*).

Senada dengan program BLT, program pengentasan kemiskinan dalam bentuk raskin (beras miskin) juga hanya efektif pada jangka pendek dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Semua program yang dikelompokkan dalam *cash/in kind transfer* hanya menjangkau masyarakat dalam jangka pendek. Sama halnya dengan BPC4 dan Gaji 13. Setelah penguatan masyarakat dalam jangka pendek, maka selanjutnya yang perlu diperkuat adalah jangka panjangnya.

3. 3. 2. Evaluasi Program Pengembangan Produktivitas

Program yang tergolong dalam kelompok program pengembangan produktifitas juga menjadi program andalan pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Keempat program tersebut antara lain BOS, bantuan untuk nelayan terkait dengan peningkatan produktifitasnya, serta kedua program lainnya yaitu PPP dan P3KUM untuk peningkatan produktifitas koperasi dan UKM serta peningkatan produktifitas manusianya dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Akumulasi dari *cash/in kind transfer* dan program

yang sifatnya mengembangkan produktifitas nampaknya berhasil menurunkan tingkat kemiskinan. Ini dibuktikan dengan data tahun 2007 tingkat kemiskinan menurun. Ini dikarenakan efek program *cash/in kind transfer* mulai berjalan dan program pengembangan produktivitas mulai diberlakukan. Transfer yang masif dari pemerintah mampu mengangkat sebagian masyarakat miskin dari garis kemiskinan. Dominasi program *cash/in kind transfer* dalam mengangkat tingkat konsumsi masyarakat miskin keatas garis kemiskinan masih cukup dominan saat itu karena masih dalam lingkup jangka pendek. Hasil program pengembangan produktifitas memang idealnya dapat dilihat dalam jangka yang lebih panjang.

3. 3. 3. Evaluasi Program Pengurangan Beban Masyarakat

Salah satu penyebab kemiskinan adalah beban pengeluaran masyarakat yang besar dan tidak diimbangi dengan tingkat pendapatan, sehingga dalam pemenuhan kebutuhan dasar sering mengalami kesulitan. Kelompok program yang terakhir adalah program pengurangan beban pengeluaran yang juga terdiri dari empat program yaitu Jamsos, Perumahan, Pelayanan Publik, KESTIS. Pemerintah mengeluarkan program ini pada tahun 2006 akan tetapi dikembangkan pada tahun 2007. Angka kemiskinan tahun 2008 menunjukkan tren yang menurun yaitu 35,0 juta dengan persentase 15,4. Hal ini tidak terlepas dari beberapa program pemerintah sebelumnya terutama masih berkaitan dengan program *cash/in kind transfer*. Senada dengan program pengembangan produktivitas, program pengurangan beban masyarakat pun lebih ke arah jangka panjang ketimbang jangka pendek. Akibatnya efeknya belum terasa.

Kemiskinan memang seharusnya dipandang secara substansial begitupun dalam penyusunan program pengentasannya. Dari ketiga kelompok program di atas, program pengembangan produktivitas dan pengurangan beban walaupun belum terbukti mampu menurunkan angka kemiskinan dibandingkan dengan *cash/in kind transfer* namun tetap perlu ditingkatkan. Karena dari ketiga kelompok program ini, kedua program tersebut mencoba mencabut akar permasalahan dari kemiskinan, misalnya program wajib belajar dan asuransi kesehatan yang akan saling bersinergi sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Jika ini berlanjut dan secara konsisten maka akan sangat berperan dalam pengentasan kemiskinan.

3. 4. Kebijakan Anggaran dalam Penanggulangan Kemiskinan

Dari Gambar 3 terlihat masih rendahnya alokasi dana terkait dengan program yang berhubungan dengan pengembangan produktivitas dan pengurangan beban. Pemerintah

cenderung memprioritaskan program yang sifatnya *cash/in kind transfer*. Hal ini karena pemerintah masih meihat bahwa tahapan penganggulangan kemiskinan di Indonesia masih berada pada tahap awal yaitu tanggap darurat. Bagaimana caranya agar masyarakat miskin yang terkena imbas kenaikan harga-harga tetap dapat memenuhi kebutuhannya. Dari anggaran terlihat bahwa tahap lanjutan (pemberdayaan, peningkatan kapasitas) belum menjadi prioritas utama karena masalah mendasarnya yaitu pemenuhan kebutuhan masih terancam sehingga perlu ditingkatkan dulu daya beli masyarakat miskin. Ke depannya, ketika daya beli masyarakat miskin sudah memadai, maka program *cash/in kind transfer* seharusnya disudahi jika tidak ada hal-hal yang menyebabkan shock pada perekonomian seperti kenaikan harga BBM pada akhir tahun 2005.

Program-program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas harus dilakukan meningkat tidak bisa selamanya orang miskin bergantung pada anggaran negara. Program jangka pendek adalah konsumsi, sementara program jangka panjang adalah investasi. Kita perlu konsumsi dulu untuk bisa melakukan investasi. Namun kita juga perlu investasi untuk bisa terus melakukan konsumsi dalam jangka panjang. Pemerintah harus berinvestasi pada masyarakat miskin agar di kemudian hari mereka dapat bangkit dan berdaya guna sehingga mampu memberikan sumbangan bagi perekonomian dengan melakukan konsumsi, investasi dan membayar pajak.

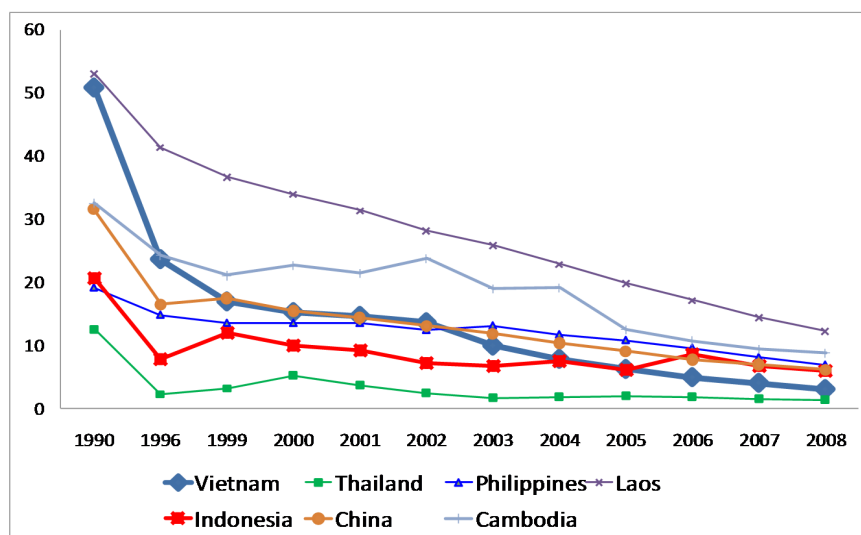
Gambar 3
Alokasi Dana untuk Program Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal, Depkeu

3. 5. Perbandingan Kawasan Penanggulangan Kemiskinan

Kalau kita cermati perkembangan kemiskinan sejak 1996 maupun dalam lima tahun terakhir, penurunan kemiskinan di Indonesia sangat lambat dibandingkan dengan negara-negara tetangga, seperti China dan Vietnam. Bahkan bila dibandingkan dengan Kamboja sekalipun. Dari Gambar 4 bisa dilihat bahwa angka kemiskinan di Indonesia turun dalam level yang moderat, sementara jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam, Kamboja, dan Laos yang turun secara agresif maka pencapaian Indonesia bisa dikatakan tidak terlalu menggembirakan. Kita belum boleh berbangga dengan pencapaian yang sekedar lebih baik—*good is not good enough*. Pemerintah bisa mempelajari apa yang dilakukan negara tetangga agar kemiskinan dapat ditekan serendah mungkin.

Gambar 4
Persentase Kemiskinan Berbagai Negara



4. Kesimpulan dan Saran

Kemiskinan memang merupakan masalah yang sulit dipecahkan karena menyangkut banyak aspek sehingga membutuhkan solusi yang multidimensi juga. Hasil yang sudah dicapai oleh pemerintah sejauh ini sudah positif walaupun jika dibandingkan dengan negara tetangga masih terlihat kurang maksimal. Langkah pemerintah melakukan kebijakan jangka pendek sudah tepat mengingat keadaan perekonomian sedang sulit. Walaupun demikian masih banyak catatan dalam pelaksanaannya di tingkat teknis dan kesiapan infrastruktur. Dalam kondisi yang lebih stabil diharapkan pemerintah dapat mulai mengalihkan fokus

penanggulangan kemiskinan pada kebijakan jangka panjang yang mencakup pemberdayaan dan peningkatan kapasitas orang miskin.

Untuk itu mahasiswa fakultas ekonomi Indonesia menyusun sebuah usulan terkait penanggulangan kemiskinan yang berisi saran kebijakan kepada pemerintah sebagai berikut.

4. 1. Mengoptimalkan Program Permodalan dan Pembinaan Kewirausahaan

Ini merupakan usulan program penyempurnaan dari program sebelumnya yang sudah berjalan yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). Mahasiswa menilai konsep KUR sudah baik dan merupakan terobosan dengan sistem pemerintah sebagai penjamin risiko dan perbankan sebagai pemberi modal. Dengan KUR pemerintah mampu mengatasi kendala anggaran yang terbatas dengan hasil yang maksimal. Hanya dengan penjaminan Rp 2 triliun pemerintah mampu menambah kredit Rp 20 triliun idealnya. Hal ini tentu merupakan hal yang baik jika dapat berjalan lancar.

Sementara usulan ini menambahkan dengan menitikberatkan pada pembinaan kewirausahaan. Jika melalui KUR pemerintah baru menangkap pengusaha rakyat yang sudah jadi, maka dengan program ini pemerintah juga dituntut mengembangkan kewirausahaan di masyarakat. Diusulkan agar pemerintah membuka kelas-kelas wirausaha di tiap-tiap kecamatan dan memfasilitasinya dengan permodalan yang selama ini sudah berjalan. Evaluasi KUR adalah pencairannya yang masih di bawah target. Dengan adanya kelas-kelas wirausaha di tingkat kecamatan maka diharapkan semakin banyak masyarakat yang mengajukan modal usaha dan menjalankan usahanya sehingga akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Teknis program ini adalah sebagai berikut.

Tahapan	No	Kegiatan	Waktu	Pelaksana	Keterangan
I Persiapan	1	Sosialisasi	1 bulan	Pemerintah dan Bank	Meliputi pemberitaan melalui media, kecamatan, dan promosi dari bank.
	2	Pendataan dan uji kelayakan penerima pinjaman modal	1 bulan	Bank	Registrasi, pengisian formulir pendaftaran peserta penerima modal ini sekaligus melakukan observasi apakah pendaftar layak menerima modal usaha.
II Pelaksanaan	1	Pelatihan	1 bulan	Pemerintah	Mengadakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan setiap 2 kali dalam sebulan.
	2	Pencairan dan Penyerahan Modal	Relatif/ sewaktu-waktu	Bank	Pemberian modal diberikan kepada pendaftaran yang sudah lolos uji kelayakan. Tipe pendaftar ada 2 yaitu: pendaftar yang sudah mempunyai keahlian dapat langsung mencairkan modal sedangkan yang belum memiliki keahlian harus mengikuti pelatihan sebelum diberikan modal.
	3	Pembinaan dan pengembalian modal	3 tahun	Pemerintah (pembinaan) dan Bank (pengembalian modal)	Pembinaan dan pengawasan dilakukan bersamaan dengan pencicilan modal.

Program ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengentaskan kemiskinan dari akar permasalahan yang fundamental.
2. Menciptakan masyarakat mandiri yang mampu mengupayakan kesejahteraan sendiri
3. Memberikan pembinaan kewirausahaan pada rakyat miskin.
4. Memberikan kemudahan akses permodalan terhadap usaha rakyat miskin.

Dengan parameter keberhasilan sebagai berikut:

1. Terlaksana minimal di 30% kecamatan dan 30% kabupaten/kota di tiap-tiap provinsi.
2. Menyalurkan kredit minimal Rp 20 triliun per tahun
3. Menciptakan 4 juta lapangan kerja baru per tahun sehingga dalam 5 tahun diharapkan dapat membuka 20 juta lapangan kerja baru.
4. Mengurangi kemiskinan 1,7% per tahun sehingga dalam 5 tahun diharapkan dapat mengurangi separuh kemiskinan di Indonesia.

4. 2. Memfokuskan Program Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan

Selama ini anggaran penanggulangan kemiskinan ditebar pada 51 program yang tersebar hampir di semua departemen/lembaga. Akibatnya, terjadi tumpang-tindih, bahkan repetisi program yang berpotensi pada penghamburan anggaran dan tidak tercapainya tujuan penanggulangan kemiskinan. Pada rentang 2004-2008, anggaran pemerintah untuk memerangi kemiskinan naik hampir empat kali lipat, tapi angka kemiskinan hanya turun 1 persen. Akan lebih baik jika penanggulangan kemiskinan dikumpulkan dalam satu lembaga sehingga pelaksanaan program lebih bermanfaat, efektif, dan efisien. Sehingga ke depan upaya penanggulangan kemiskinan dapat lebih baik.

4. 3. Keberlanjutan Program Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan

Sebuah ironi ketika masing-masing rezim pemerintahan selalu menyalahkan kebijakan pemerintahan sebelumnya. Sebuah ironi ketika hal ini semua terjadi diatas penderitaan rakyat yang tak kunjung berakhir. Masalah keberlangsungan suatu proyek adalah sebuah masalah yang harus ditangani. Kebanyakan proyek berlangsung hanya dalam sebuah periode pemerintahan. Hal ini tentu tidak sehat karena tujuan-tujuan pembangunan jangka panjang menjadi tidak optimal pencapaiannya. Begitu juga dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang butuh waktu lama untuk menuntaskannya.

Sejak tahun 2000 – 2005, Pemerintah Indonesia telah membuat Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK), sebuah *blue print* yang belum ada pada masa sebelumnya, terutama yang disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan di Indonesia dalam mencapai target Millennium Development Goals (MDGs). SNPK menggunakan pendekatan berbasis hak (*right-based approach*) sebagai pendekatan utama dengan menegaskan adanya pencapaian secara bertahap dan progresif (*progressive realization*) dalam penghormatan (*respect*), perlindungan (*protect*) dan pemenuhan (*fulfill*) hak dasar rakyat, memberikan perhatian terhadap perwujudan kesetaraan dan keadilan gender, serta percepatan pengembangan wilayah.

SNPK dibuat agar menjadi basis, arah dan payung dari seluruh upaya penanggulangan kemiskinan, baik oleh pemerintah, masyarakat maupun lembaga donor maupun internasional. Sebuah program yang sangat bagus pada dasarnya. Namun belum berjalan cukup progresif sesuai target dan kesepakatan antar *stakeholder* pembuatnya. Dengan mengoptimalkan SNPK pemerintah diharapkan mampu konsisten dalam pencapaian jangka panjang dalam penanggulangan kemiskinan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan bukan lagi sekedar proyek 5 tahun-an, melainkan merupakan sebuah rangkaian kebijakan yang berkelanjutan.

4. 4. Menyediakan Desain Data dan Informasi Kemiskinan yang Akurat

Faktor yang dapat mengakibatkan gagalnya program penanggulangan kemiskinan adalah kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri sehingga program-program pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan, yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal. Ukuran-ukuran kemiskinan yang dirancang di pusat belum sepenuhnya memadai dalam upaya pengentasan kemiskinan secara operasional di daerah. Sebaliknya, informasi-informasi yang dihasilkan dari pusat tersebut dapat menjadikan kebijakan salah arah karena data tersebut tidak dapat mengidentifikasi kemiskinan sebenarnya yang terjadi di tingkat daerah yang lebih kecil.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu disadari bahwa walaupun kebutuhan sistem pengumpulan data yang didesain, diadministrasikan, dianalisis, dan didanai pusat masih penting dan perlu dipertahankan, sudah saatnya dikembangkan pula mekanisme pengumpulan data untuk kebutuhan komunitas dan kabupaten. Oleh karena itu, di samping data kemiskinan makro yang diperlukan dalam sistem statistik nasional, perlu juga diperoleh data kemiskinan (mikro) yang spesifik daerah. Namun, sistem statistik yang dikumpulkan secara lokal tersebut perlu diintegrasikan dengan sistem statistik nasional sehingga keterbandingan antarwilayah, khususnya keterbandingan antarkabupaten dan provinsi dapat tetap terjaga.

Maka, dengan ini kami, mahasiswa fakultas ekonomi Indonesia mengajukan 4 poin dalam petisi kami tentang kemiskinan, yaitu sebagai berikut:

- 1. Mengoptimalkan Program Permodalan dan Pembinaan Kewirausahaan**
- 2. Memfokuskan Program Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan**
- 3. Keberlanjutan Program Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan**
- 4. Menyediakan Desain Data dan Informasi Kemiskinan yang Akurat**

TEMA : KETAHANAN ENERGI

Anissa Wastiti

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
(Anggota Tim Perumus Simposium Ekonomi Nasional)

Ardani Nanda

Universitas Gajah Mada
(Finalis lomba paper Simposium Ekonomi Nasional)

Rora Puspita Sari

Universitas Indonesia
(Finalis lomba paper Simposium Ekonomi Nasional)

Tantia Dian P.

Universitas Airlangga
(Finalis lomba paper Simposium Ekonomi Nasional)

Miza, Toni dan fuady

Institute Teknologi Bandung
(Delegasi Simposium Ekonomi Nasional)

Pendahuluan

Dewasa ini, energi memiliki peranan yang sangat penting baik dalam pertumbuhan ekonomi maupun ketahanan nasional. Kemampuan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan energi dalam negeri kini menjadi sebuah indikator dari tingkat keberlanjutan pertumbuhan ekonominya. Di sisi lain, pemakaian energi di dunia masih didominasi oleh bahan bakar dari fosil, seperti minyak, batubara, dan gas alam yang merupakan sumber daya alam tak terbarukan. Sedangkan pemakaian dari energi terbarukan masih relative sedikit.

Indonesia sendiri tercatat sebagai negara dengan potensi sumber energi dan mineral yang cukup besar di dunia. Disandingkan dengan Uni Emirat Arab, Kuwait, Argentina, dan negara Timur Tengah yang kaya akan minyak, Indonesia pernah menjadi anggota aktif OPEC sebagai negara pengekspor minyak dunia. Namun predikat Indonesia sebagai negara berkembang dengan sektor industri sebagai penunjang yang terus meningkat, kebutuhan akan energi pun menjadi semakin besar. Begitu pula dengan tingkat populasi yang tinggi, jumlah permintaan terhadap energi pun tinggi. Akan tetapi, peningkatan kebutuhan akan energi ini tidak selaras dengan jumlah ketersediaan energi nasional.

Hal ini menjadi sangat ironis mengingat masih banyak sumber energi yang terkandung di dalam bumi Indonesia dan masih belum dimanfaatkan dengan maksimal, atau bahkan dikirim ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan energi negara lain. Juga potensi Sumber daya alam non fossil yang bisa dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat.

Dalam tataran global, fenomena yang kerap menjadi perhatian adalah terjadinya pemanasan global yang berakibat pada perubahan iklim dalam kurun waktu yang sangat cepat. Ancaman yang mulai dirasakan penduduk dunia mendesak semua negara untuk berupaya melakukan mitigasi terhadap dampak *climate change*. Maka pemenuhan kebutuhan energi di tingkat global kini berkaitan erat dengan usaha mitigasi yang dilakukan. Seiring dengan upaya tersebut, pemenuhan kebutuhan akan energi kini mulai memperhatikan mengenai dampak yang terjadi terhadap lingkungan, yaitu melalui perlindungan terhadap daerah penyerapan karbon seperti hutan, serta peningkatan teknologi biofuel yang lebih ramah lingkungan.

- **Menata kembali kebijakan energi nasional untuk mewujudkan ketahanan energi nasional**

- Revisi UU Migas No. 22 Tahun 2001
- Restrukturisasi kontrak karya dan merevisinya menjadi sistem balas jasa dan/atau sistem *production sharing contract*
- Meninjau kembali peran, fungsi, dan efektivitas BP Migas dan BPH Migas
- Adanya upaya peningkatan kompetensi Pertamina sebagai BUMN oleh pemerintah

Tujuan : Memastikan pemerintah Indonesia sebagai penguasa utama dalam pengelolaan energi nasional demi kemakmuran rakyat.

Parameter : Dilaksanakannya *point - point* diatas dalam pemerintahan 2009 – 2014.

PENJELASAN

Kebijakan energi nasional Indonesia yang ada selama ini masih belum merepresentasikan keinginan untuk melakukan pengelolaan energi secara mandiri. Struktur kontrak karya dalam kerja sama pengelolaan energi selama ini masih merugikan negara.

Merugikan ini dalam hal kita tidak banyak menikmati hasil kekayaan dalam negeri, namun justru diekspor untuk kebutuhan negara lain, sedangkan kita mengalami kelangkaan energi.

Keberadaan UU Migas nomor 22 tahun 2001 yang kemudian melahirkan BP Migas dengan segala tugas dan perannya dalam mengatur permigasan Indonesia kemudian mengubah peran Pertamina. Pertamina yang dulunya berbentuk BUMN dengan peran *player* dan *regulator* di bawah UU no. 8 tahun 1971, kini hanya memiliki peran sebagai *player*, sama dan disejajarkan dengan perusahaan dan kontraktor migas asing lainnya. Kondisi ini sejatinya bertolak belakang dengan pengelolaan energi yang seharusnya lebih mandiri.

Maka diperlukan lagi revisi UU Migas no. 22 tahun 2001, sekaligus melakukan peninjauan ulang terhadap peran, fungsi, dan efektivitas BP Migas dan BPH migas. BP Migas yang berbentuk Badan Pelaksana dan bukan perusahaan tidak memiliki tugas untuk melakukan transaksi dengan perusahaan dan kontraktor minyak. Mereka hanya bertugas sebagai badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi. Peran ini kemudian tidak memiliki fungsi lebih, seperti yang sebelumnya dimiliki Pertamina, yaitu melakukan transaksi hasil eksplorasi minyak dan gas bumi. Maka yang menjadi solusi adalah pengaturan mengenai skema transaksi B to B. Hasil eksplorasi minyak dan gas oleh kontraktor asing bisa diberikan kepada Pertamina, dengan *production sharing contract*.

Selain itu, peningkatan kompetensi Pertamina sebagai BUMN merupakan peran serta pemerintah. Dengan demikian, pengelolaan energi dari perut tanah air ini dapat dikelola dengan baik oleh bangsa sendiri. Pengelolaan secara mandiri merupakan awal dari terwujudnya ketahanan energi nasional. Maka peran serta Pertamina tidak boleh diamputasi.

Semua ini bermuara pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dan kami mengambil empat kebijakan penting di atas yang harus segera ditinjau kembali.

- **Memprioritaskan dan mewujudkan secara nyata pencapaian diversifikasi energi sesuai dengan *blueprint* pengembangan energi nasional**

- Mendorong pengembangan industri yang menggunakan dan/atau memproduksi energi terbarukan
- Menyediakan transportasi publik berbasis energi alternatif oleh pemerintah daerah
- Memberikan insentif bagi tiap-tiap daerah untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber energi terbarukan sesuai dengan Sumber Energi Setempat (SES). Sebagai langkah implementatif, seperti meningkatkan

pemberdayaan pemerintah daerah melalui pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi wilayah yang mengembangkan sumber daya energi terbarukan

Tujuan : Meningkatkan keamanan dan akses masyarakat terhadap energi.

Parameter : Terpenuhinya target - target produksi yg terdapat pada blue print energy nasional, meliputi sumber energi Brown Coal liquefaction, energi panas bumi, tenaga angin, nuklir, Biodiesel, Gasohol, Bio Oil, dan Tenaga Surya

PENJELASAN

Besarnya tingkat pemakaian terhadap energi yang bersumber dari *crude oil* beserta pemakaian produk olahannya, pemerintah juga harus mulai menggalakan program diversifikasi pemakaian energi. Dengan cadangan batubara dan gas alam yang melimpah, konsumsi energi dalam negeri seharusnya diarahkan terhadap pemanfaatan sumber energi dari kedua sumber energi tersebut. Selain kedua jenis sumber energi tersebut, pemerintah juga harus mulai mengembangkan pemanfaatan energi terbarukan.

Maka, salah satu alternatif pemecahan masalah krisis energi di bangsa ini dapat dilakukan dengan skema diversifikasi energi. Melimpahnya sumber daya alam selain fosil di perut bumi pertiwi sejatinya bisa menjadi solusi. Pemerintah melalui Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral pada periode kabinet Indonesia Bersatu jilid I pun telah membuat *blueprint* pengembangan energi nasional yang juga merancang skema pengembangan energi alternatif dari berbagai jenis sumber daya yang tersedia di Indonesia. Namun sayang, *blueprint* yang telah dirancang belum terlaksana dengan maksimal. Pengembangan energi alternatif masih terkesan lambat dan terhenti dalam rencana.

Indonesia sendiri memiliki potensi Sumber Daya terbarukan yang sangat besar dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif. Seperti Gas alam, Geothermal, Microhydro, Bio-fuels, Tenaga angin, dan tenaga matahari. Semua sumber energi itu bisa dimanfaatkan sebagai pengganti energi fosil yang persediannya kian menipis. Terlebih lagi, energi-energi alternatif tersebut lebih ramah lingkungan dengan tingkat emisi yang sangat rendah, bahkan *zero emission*.

Namun saat ini, sumber energi terbarukan memang memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan energi fosil, namun untuk kedepannya, justru energi terbarukan akan semakin murah harganya dibandingkan dengan harga energi fosil. Hal ini dikarenakan sumber energi fosil (yang jumlahnya terbatas keberadaannya di muka bumi) akan semakin habis

persediannya. Penawaran energi fosil yang semakin terbatas akan semakin meningkatkan harga dari energi fosil itu sendiri.

Pemerintah memiliki peran utama dalam mewujudkan ketahanan energi nasional. Termasuk dalam upaya diversifikasi energi di Indonesia. Pemberian insentif merupakan salah satu cara mudah untuk meningkatkan pengembangan teknologi energi terbarukan dan pemanfaatannya. Hal ini bisa dilakukan dalam beberapa cara, yaitu seperti penggalakan program Sumber Energi Setempat yang mampu menyelesaikan masalah krisis energi di daerah yang relatif terpencil.

- **Meningkatkan investasi terhadap pengembangan energi terbarukan dan tidak terbarukan**
 - Memberlakukan sistem insentif bagi produsen dan konsumen energi yang melakukan diversifikasi dan penghematan energi. Insentif dapat berupa penghapusan pajak dan penyederhanaan birokrasi.

Tujuan : Mencapai target diversifikasi energi

Parameter : Terpenuhinya sasaran target produksi energi nasional.

PENJELASAN

Pengembangan teknologi energi terbarukan dapat dilakukan dengan mudah bila terdapat insentif lebih untuk melakukannya. Insentif bisa diberikan melalui beberapa skema, baik kepada produsen, konsumen, maupun investor.

Insentif kepada produsen bisa dilakukan dalam bentuk pemberian subsidi untuk penggunaan energi terbarukan. Misalnya geothermal, dengan cost of production yang lebih tinggi dari batu bara. Sedangkan insentif bagi konsumen juga dapat diberikan, misalnya bagi industri yang menggunakan input energi terbarukan, bisa diberikan pengurangan pajak.

Untuk investor, insentif dapat diberikan melalui penyederhanaan birokrasi, sehingga bisa memberikan iklim investasi yang lebih baik.

- **Melakukan mekanisme dikotomi harga energi antara pasar domestik (sesuai *cost production*) dan pasar global (*floating price*)**
 - Dengan demikian dikotomi akan mampu mengalihkan pendapatan pemerintah ke arah penelitian dan pengembangan energi
 - Dikotomi harga juga akan menjamin harga energi dalam negeri yang stabil

Tujuan : Dimanfaatkannya energi sebagai komoditas utama penghasil devisa negara sekaligus sebagai kebutuhan publik yang harus dipenuhi.

Parameter : Adanya perbedaan harga antara pasar domestik dan pasar global.

PENJELASAN

Permasalahan harga energi memang selalu menjadi polemik. Pro dan kontra di masyarakat yang juga mempengaruhi keputusan pemerintah dalam menentukan kebijakan. Namun sejatinya, diperlukan kebijakan yang bijaksana, melihat kondisi masyarakat Indonesia yang sangat sensitif terhadap harga, terutama harga energi yang kini menjadi barang kebutuhan primer.

Kebijakan subsidi terhadap energi dengan proporsi yang cukup besar dalam proporsi APBN menjadi alasan pemerintah untuk mencabut subsidi tersebut, namun masyarakat berteriak dan *multiplier effect* atas kebijakan tersebut pun bergulir semakin besar.

Namun sejatinya pengurangan subsidi energi dilakukan agar masyarakat dan pelaku usaha menjadi terbiasa dengan harga energi yang berlaku di dunia. Dengan tingkat harga energi saat ini yang cukup tinggi, masyarakat dan pelaku usaha akan lebih menghargai pemakaian energi. Dengan hal ini, beban subsidi terhadap energi yang sifatnya konsumtif, dapat dialihkan kepada kepentingan nasional lainnya yang sifatnya lebih membangun, misalnya, pembangunan infrastruktur, pabrik baru, dan lain-lain yang sifatnya tidak konsumtif.

Term subsidi yang selama ini digunakan mungkin salah. Perbedaan harga energi dalam negeri dan luar negeri merupakan *opportunity cost* yang hilang akibat penjualan energi yang lebih murah di dalam negeri. Maka dikatakan pemerintah memberikan subsidi atas selisih harga tersebut. Penerapan harga jual sesuai dengan biaya produksi lebih bijaksana dibandingkan dengan pencabutan subsidi. Tidak benar jika pemerintah mengambil keuntungan dari rakyat dengan menaikkan harga jual, melalui mekanisme pencabutan subsidi dan penerapan harga energi berdasarkan harga pasar internasional.

Penjualan energi di dalam negeri harus sesuai dengan biaya produksinya, sedangkan pengambilan keuntungan bisa dilakukan dalam penjualan energi ke luar negeri (*export*).

- **Memprioritaskan penelitian dan pengembangan teknologi energi**

- Merealisasikan penelitian dalam pengembangan energy sesuai target *blueprint* energi.
- Mewujudkan kerjasama (bilateral, regional, multilateral) dalam hal penelitian dan pengembangan teknologi berbasis hubungan mutualisme
- Pembangunan *platform clean technology* yang tepat dan jelas
- Pembangunan teknologi infrastruktur eksplorasi dan distribusi energi

Tujuan : Terwujudnya teknologi yang mampu mengoptimalkan sumber - sumber energi potensial yang ada di Indonesia.

Parameter : Terealisasinya terget pengembangan infrastruktur energi dan pengembangan teknologi sesuai blue print energy nasional

PENJELASAN

Research & Development merupakan dua hal yang penting dalam upaya menciptakan kemandirian energi nasional. Selama ini kita belum memprioritaskan R&D menjadi hal yang harus dilaksanakan. Kita masih merasa nyaman dengan teknologi yang ada, padahal itu sudah ketinggalana zaman. Termasuk penggunaan energi fosil yang bersifat korosif dengan level emisi yang sangat tinggi. Padahal bila kita melihat negara lain, terutama negaramaju, kita telah tertinggal sangat jauh.

Maka R&D harus menjadi prioritas. Penelitian dan pengembangan ini bisa dilakukan pada dua jenis energi, baik fosil maupun non fosil. Misalnya pengembangan *clean coal technology*, mengingat masih banyaknya *supply* batubara di perut bumi pertiwi yang masih dapat digunakan hingga 100 tahun ke depan. Juga penelitian dan pengembangan teknologi energi non fosil seperti energi angin, ombak, yang masih belum ada infrastrukturnya di Indonesia.

Program penelitian dan pengembangan tersebut juga dapat dilakukan dengan kerja sama baik bilateral, regional, maupun multilateral. Salah satunya adalah ASEAN power grid yang sekarang telah terhenti. Pola kerja sama seperti itu dapat kita kembangkan lagi.

Petisi Mahasiswa

Indonesian Development Goals 2009-2014

Pada tanggal 12 – 15 Oktober yang lalu kami, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) mengadakan sebuah acara yang bertajuk ***Symposium Ekonomi Nasional 2009***.

Acara ini merupakan suatu wujud sumbangsih kami sebagai mahasiswa untuk turut serta membantu pemerintah mewujudkan Indonesia yang lebih baik lagi, ditinjau dari berbagai bidang, di mana bidang yang menurut kami sangat krusial antara lain *kemiskinan, pengangguran, ketahanan pangan, pelayanan & barang publik, energi, serta pendidikan & kesehatan*. Oleh karena itu, dalam acara ini kami mengundang teman = teman mahasiswa yang berasal dari universitas lain yang tersebar di seluruh Indonesia, antara lain UnAir, IPB, UGM, dan lain – lain (total partisipan ada 16 universitas), untuk berdiskusi dan merumuskan apa yang kami sebut sebagai ***Indonesian Development Goals 2009 – 2014***, yaitu suatu ide, pemikiran, usul atau masukan terhadap pemerintah, khususnya presiden terpilih beserta jajaran kabinet periode 2009 – 2014, dalam menentukan kebijakan – kebijakan terkait dengan bidang tersebut di atas.

Peserta diskusi terdiri atas mahasiswa FEUI yang telah menyusun paper terhadap tema / bidang tertentu, mahasiswa lain yang juga telah menyusun paper dan berasal dari universitas yang memiliki *core competence* di bidang tersebut (misalnya IPB untuk ketahanan pangan), serta mahasiswa pemenang *paper competition* yang telah kami adakan sebelumnya untuk setiap tema. Adapun proses diskusi berlangsung di dalam beberapa tahapan. Yang pertama, masing – masing kelompok (berdasarkan tema / bidang) berdiskusi untuk pertama kalinya untuk menentukan framework mengenai masalah inti yang terjadi serta menentukan solusi yang kiranya dapat ditempuh pemerintah, kemudian hasilnya mereka bawaikan pada simposium yang juga mengundang para pakar di bidangnya (Bustanul Arifin, Dr dr Kartono Muhammad, Kaman Nainggolan, dll) untuk turut memberi pandangan dan masukan yang memperkaya hasil diskusi mahasiswa tadi. Kemudian para mahasiswa berdiskusi kembali dengan mempertimbangkan pendapat para pakar untuk tema / bidang yang mereka pegang, dan di akhir tahapan mereka menyusun sebuah petisi yang uraian lengkapnya dapat dibaca di buku kecil ini. Adapun nantinya hasil ini beserta paper mahasiswa akan dibukukan oleh penerbit Salemba Empat dan dijual bebas di pasaran.

Melalui petisi ini, kami juga ingin menyampaikan dukungan yang sebesar – besarnya kepada jajaran pemerintahan periode 2009 – 2014. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan

semoga buah pikiran kami ini dapat berguna dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik lagi.

Petisi Mahasiswa

Kami Mahasiswa Indonesia Mendesak Pemerintah Melalui Presiden RI periode 2009-2014 untuk :

di Bidang Kemiskinan

- 1) Mengoptimalkan Program Permodalan dan Pembinaan Kewirausahaan***
- 2) Memfokuskan program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan***
- 3) Keberlanjutan Program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan***
- 4) Menyediakan Desain Data dan Informasi Kemiskinan yang akurat***

di Bidang Pengangguran

- 1) Memasukkan entrepreneurship dan softskill dalam kurikulum di setiap jenjang pendidikan***
- 2) Pemberian bantuan modal usaha disertai pelatihan keterampilan bagi pengangguran terbuka***
- 3) Meningkatkan partisipasi tenaga kerja Indonesia dalam setiap investasi dalam negeri***
- 4) Optimalisasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Industri Kreatif***

di Bidang Energi

- 1) Menata kembali kebijakan energi nasional untuk mewujudkan ketahanan energi nasional***

- 2) *Memprioritaskan dan mewujudkan secara nyata pencapaian diversifikasi energi sesuai dengan blueprint pengembangan energi nasional*
- 3) *Meningkatkan investasi terhadap pengembangan energi terbarukan dan tidak terbarukan*
- 4) *Melakukan mekanisme dikotomi harga energi antara pasar domestik (sesuai cost production) dan pasar global (floating price)*
- 5) *Memprioritaskan penelitian dan pengembangan teknologi energi*

di Bidang Ketahanan Pangan

- 1) *Mewujudkan Reformasi Agraria.*
- 2) *Menjadikan desa sebagai fokus pembangunan.*
- 3) *Menggalakkan Diversifikasi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.*
- 4) *Membangun Sistem Pertanian yang Terintegrasi (Agriculture to Agrobusiness) dan Berkelanjutan.*
- 5) *Membangun Komitmen dan Sinergisitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di bidang pertanian.*
- 6) *Menjalin kemitraan antar stakeholder di bidang pertanian.*
- 7) *Menerapkan kebijakan pertanian yang mengedepankan kepentingan nasional.*

di Bidang Pelayanan dan Barang Publik

- 1) *Menjadikan Pemberantasan korupsi di ranah pelayanan publik sebagai agenda utama Pemerintahan 2009-2014*
- 2) *Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU Pelayanan Publik Nomor 25 tahun 2009 serta UU lain yang terkait.*
- 3) *Mereformasi dan memperkuat lembaga penegak hukum di Indonesia.*
- 4) *Memastikan setiap daerah memiliki dan mengimplementasikan perda tentang pelayanan publik*
- 5) *Memastikan adanya ombudsman (lembaga pengawas pelayanan publik) pada setiap daerah tingkat II di seluruh Indonesia.*
- 6) *Mengalokasikan dana pelayanan publik sesuai dengan skala prioritas dan kepentingan publik.*

- 7) *Memberikan jaminan kemudahan akses pelayanan publik yang berkualitas kepada rakyat miskin di Indonesia.*
- 8) *Meningkatkan kualitas input SDM aparatur pelayanan publik. Mis: mengadakan kerjasama pemerintah dengan perguruan tinggi.*
- 9) *Menerapkan konsep workplace spirituality dan Total Quality Management (TQM) yang didasarkan pada nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai social budaya untuk meningkatkan profesionalisme aparatur pelayanan publik.*
- 10) *Mengupayakan Penerapan Teknologi Informasi disetiap unit penyedia pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi, komunikasi dan koordinasi demi mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan mampu bersaing di era perdagangan bebas.*

di Bidang Pendidikan dan Kesehatan

PENDIDIKAN

- 1) *Realisasikan anggaran 20% APBN untuk pendidikan (di luar komponen gaji guru, dosen, dan sekolah kedinasan).*
- 2) *Ciptakan sistem pengawasan yang efektif guna menekan kebocoran anggaran Negara di sektor pendidikan*
- 3) *Realisasikan Standar Nasional Pendidikan dalam hal kurikulum, insfrastruktur serta kualitas tenaga Pendidik guna pengembangan pendidikan di tiap-tiap daerah*
- 4) *Tingkatkan kualitas dan kesejahteraan guru*

KESEHATAN

- 1) *Meningkatkan sumber pembiayaan kebijakan di sektor kesehatan.*
- 2) *Ubah fokus kebijakan pemerintah di bidang kesehatan yang awalnya kuratif menjadi promotif dan preventif.*
- 3) *Wujudkan sistem jaminan sosial yang terintegrasi sesuai dengan amanat UU No.40 tahun tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).*

Uraian dan Penjelasan

di Bidang Kemiskinan

1. Program Permodalan dan Pembinaan Kewirausahaan (P3K)

Penjelasan:

P3K merupakan alternatif program yang ditawarkan oleh mahasiswa dalam rangka upaya menggabungkan sector modal dan pembinaan kewirausahaan dalam rangka menciptakan masyarakat produktif dan mandiri. Dalam program ini, pemerintah memiliki peran sebagai pelaku penyedia modal yang akan disalurkan untuk pengembangan usaha. Peran distributor modal dan pelaksana P3K ini sendiri adalah lembaga keuangan mikro yang memang sudah berdiri di tengah-tengah masyarakat agar tidak mengacaukan pasar yang sudah ada di masyarakat. Lembaga keuangan mikro ini juga termasuk unit-unit koperasi unit desa, sehingga program ini juga dapat sekaligus merevitalisasi peran dan fungsi lembaga keuangan di daerah.

Pembinaan kewirausahaan dalam program ini memiliki dua fungsi, yaitu pengembangan diri dan eksplorasi diri. Apabila masyarakat memiliki kemampuan spesifik yang dapat dikembangkan untuk membuat usaha, ia dapat mendapat pinjaman modal untuk membangun usahanya. Dalam hal ini, masyarakat akan mendapat pembinaan usaha termasuk dari awal pengembangan kemampuan, penciptaan usaha, pemasaran produk, dan lain-lain. Pembinaan usaha ini meliputi pengawasan agar usaha dijalankan sesuai dengan konteks pembangunan usaha awal. Contohnya, misalkan seseorang telah memiliki inovasi untuk membuat kerajinan dari pelepah pisang tapi tidak memiliki modal untuk usaha. Dengan mengikuti sekolah ini, orang ini dapat mendapatkan modal untuk pengembangan usahanya dan juga pembimbingan pembentukan usaha hingga akhirnya produknya dapat didistribusikan.

Eksplorasi diri yang dimaksudkan dalam program ini adalah akan dibuatnya sekolah pengembangan keahlian yang meliputi sekolah menjahit, memasak dan lainnya hingga masyarakat itu menemukan potensi dirinya. Dalam sekolah ini juga ada pembinaan karakter untuk menumbuhkan jiwa mandiri dan produktif. Setelah seseorang dapat menemukan potensi dirinya maka alur pemberian modal akan dilakukan dari awal lagi. Misalkan seseorang belum menemukan potensi dirinya, maka ia dapat mengikuti kelas memasak, menjahit, hingga ia menemukan potensi dasar dirinya. Setelah menemukan keahliannya, ia

dapat mengikuti kelas pembinaan pengembangan usaha seperti orang pertama yang memiliki inovasi untuk kerajinan dari pelepah pisang.

Tujuan:

3. Mengentaskan kemiskinan dari akar permasalahan yang fundamental.
4. Menciptakan masyarakat mandiri yang mampu mengupayakan kesejahteraan sendiri
3. Memberikan pembinaan kewirausahaan pada rakyat miskin.
4. Memberikan kemudahan akses permodalan terhadap usaha rakyat miskin.

Parameter:

1. Terlaksana minimal di 30% kecamatan dan 30% kabupaten/kota di tiap-tiap provinsi.
2. Menyalurkan kredit minimal Rp 20 triliun per tahun dan
3. Menciptakan 4 juta tenaga kerja baru per tahun sehingga dalam 5 tahun diharapkan dapat membuka 20 juta lapangan kerja baru.
4. Mengurangi kemiskinan 1,7% per tahun sehingga dalam 5 tahun diharapkan dapat mengurangi separuh kemiskinan di Indonesia.

Langkah :

Tahapan	No	Kegiatan	Waktu	Pelaksana	Keterangan
I (Persiapan)	1.	Sosialisasi	1 bulan	Pemerintah dan Bank	Meliputi pemberitaan melalui media, kelurahan, dan promosi dari Bank
	2.	Pendataan dan uji kelayakan penerima pinjaman modal	1 bulan	Bank	Registrasi, pengisian formulir pendaftaran peserta penerima modal ini sekaligus melakukan observasi apakah pendaftar layak menerima bantuan modal.
II (Pelaksanaan)	1	Pelatihan	1 bulan	Pemerintah	Mengadakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan setiap 2 kali seminggu dalam sebulan.
	2	Pencairan&Penyerahan Modal	Relatif (sewaktu-waktu)	Bank	Pemberian modal diberikan kepada pendaftaran yang sudah lolos uji kelayakan. Tipe pendaftar ada 2 yaitu: pendaftar yang sudah mempunyai keahlian dapat langsung mencairkan modal sedangkan yang belum memiliki keahlian terlebih dahulu harus mengikuti pelatihan sebelum diberikan modal. (pencairan dan penyerahan modal dari bank kurang lebih 3 minggu).
	3.	Pembinaan dan pengembalian modal	3 tahun	Pemerintah (pembinaan) dan Bank (pengembalian modal)	Pembinaan dan pengawasan dilakukan bersamaan dengan pencicilan modal. Pembinaan dilakukan secara langsung (evaluasi perorangan ataupun pembinaan secara bersama-

					sama setiap 1 minggu sekali).
--	--	--	--	--	-------------------------------

2. Fokus program

Penjelasan:

Anggaran antikemiskinan ditebar pada 51 program yang tersebar hampir di semua departemen/lembaga. Akibatnya, terjadi tumpang-tindih, bahkan repetisi program yang ujung-ujungnya penghamburan anggaran.

Tujuan:

Akan lebih baik jika penanggulangan kemiskinan dikumpulkan dalam satu lembaga sehingga pelaksanaan program lebih bermanfaat, efektif, dan efisien. Sehingga ke depan upaya antikemiskinan tidak akan kembali gagal seperti yang sudah-sudah.

Sudah tidak terhitung program dan usaha pemerintah untuk memberdayakan ekonomi rakyat miskin. Tanpa mengecilkan hasilnya, meskipun diklaim jumlahnya menurun, sejatinya jumlah penduduk miskin masih bejibun. Di tengah membaiknya berbagai indikator makroekonomi, kemiskinan tidak juga menurun drastis, gizi buruk masih menjangkiti 2,3 juta jiwa, dan pengangguran masih sebesar 10,4 persen. Pada rentang 2004-2008, anggaran untuk memerangi kemiskinan naik hampir empat kali lipat, tapi angka kemiskinan hanya turun 1 persen.

Parameter:

Langkah:

3. Keberlanjutan Program

Penjelasan:

Sebuah ironi ketika masing-masing rezim pemerintahan selalu menyalahkan kebijakan pemerintahan sebelumnya. Sebuah ironi ketika sebuah *blue print* penanganan kemiskinan jangka panjang harus dibuang dan menjadi sampah dan digantikan dengan yang baru hanya dengan alasan : kebijakan saya yang lebih benar. Sebuah ironi ketika hal ini semua terjadi diatas penderitaan rakyat yang tak kunjung berakhir. Masalah keberlangsungan suatu proyek adalah sebuah masalah yang harus ditangani. Selama ini kami rasa belum ada sebuah rencana strategis jangka panjang yang dapat berjalan dengan *sustainable* dan berhasil dengan baik. Kebanyakan proyek berlangsung hanya dalam sebuah periode pemerintahan.

Tahun	Program	Keterangan
1990	Pelita V-VI	<p>Program PK dengan strategi khusus menuntaskan kesenjangan sosial ekonomi. Sesuai Inpres No3 Tahun 1993 tentang Peningkatan PK. Inpres tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pendu-duk perdesaan, misal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan mengenai Kredit Usaha Tani, untuk memudahkan petani mendapatkan modal untuk mengolah tanah; Ketentuan mengenai kredit perbankan (KIK atau kredit candak kulak/KCK) tujuannya adalah memberikan kemudahan rakyat untuk menda-patkan modal untuk usaha di luar sektor pertanian; 2. Pembebasan pajak untuk hasil pertanian; 3. Subsidi atas pupuk dan obat obatan pertanian; 4. Penetapan harga dasar gabah, untuk menjamin nilai tukar petani (padi) tidak turun, bahkan meningkat terhadap hasil produk industri lainnya; Pola KKPA untuk sistim transmigrasi terpadu, tujuannya adalah menjamin para transmigran mendapatkan penghasilan yang tetap dan alat produksi. 5. dan lain lain. <p>Secara umum pola ini diakui keberhasilannya.</p>
1999	PPK	Merupakan penyempurnaan dari P3DT, penyampaian dana bantuan langsung melalui lembaga keuangan milik masyarakat (UPK).
	P2KP	Identik dengan PPK hanya pelaksanaannya dilakukan di perkotaan.
	PDMDKE	Merupakan penyempurnaan dari IDT dan P3DT, PPK dan pembangunan padat karya melalui prinsip pengembangan ekonomi rakyat.
2000	KKMB	Upaya PK dianggap belum mencapai harapan. Program dilakukan bersama oleh Bank Indonesia khususnya untuk usaha mikro bersama BPD dan BPR dan bekerjasama dengan LDKP, KSM. BUMN melalui PUKK. Masing-masing jalur mempunyai program sesuai dengan PK.

2001	Keppres 124 Tahun 2001 jo. No. 8 Tahun 2002 : KPK.	Secara khusus menyelenggarakan upaya PK di Indonesia yang dilakukan oleh forum lintas pelaku melalui pem pusat hingga ke pemerintah prov dan pem kab/kota, lembaga keuangan dan perbankan, usaha nasional, dan kelompok LSM yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan rakyat miskin dan menurunkan populasi penduduk miskin dalam ukuran yang signifikan.
2002-2004	Program PK Terpadu	Dilaksanakan secara terpadu melalui Departemen-Departemen. (dapat dilihat pada Tabel berikut)

Tujuan & Langkah:

Sejak tahun 2000 – 2005, Pemerintah Indonesia telah membuat Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK)/(National Strategy for Poverty Reduction), sebuah blueprint yang belum ada pada masa sebelumnya, terutama yang disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan di Indonesia dalam mencapai target Millennium Development Goals (MDGs).

SNPK menggunakan pendekatan berbasis hak (right-based approach) sebagai pendekatan utama dengan menegaskan adanya pencapaian secara bertahap dan progresif (progressive realization) dalam penghormatan (respect), perlindungan (protect) dan pemenuhan (fulfill) hak dasar rakyat, memberikan perhatian terhadap perwujudan kesetaraan dan keadilan gender, serta percepatan pengembangan wilayah.

SNPK dibuat agar menjadi basis, arah dan payung dari seluruh upaya penanggulangan kemiskinan, baik oleh pemerintah, masyarakat maupun lembaga donor maupun internasional. Sebuah program yang sangat bagus pada dasarnya. Namun belum berjalan cukup progresif sesuai target dan kesepakatan antar stakeholder pembuatnya.

4. Desain Data dan Informasi Kemiskinan

Penjelasan:

Faktor yang dapat mengakibatkan gagalnya program penanggulangan kemiskinan adalah kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri sehingga program-program pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan, yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal.

Sebagaimana diketahui, data dan informasi yang digunakan untuk program-program penanggulangan kemiskinan selama ini adalah data makro hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS dan data mikro hasil pendaftaran keluarga prasejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN. Kedua data ini pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan perencanaan nasional yang sentralistik, dengan asumsi yang menekankan pada keseragaman dan fokus pada indikator dampak. Pada kenyataannya, data dan informasi seperti ini tidak akan dapat mencerminkan tingkat keragaman dan kompleksitas yang ada di Indonesia sebagai negara besar yang mencakup banyak wilayah yang sangat berbeda, baik dari segi ekologi, organisasi sosial, sifat budaya, maupun bentuk ekonomi yang berlaku secara lokal.

Secara konseptual, data makro yang dihitung BPS selama ini dengan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) pada dasarnya (walaupun belum sempurna) dapat digunakan untuk memantau perkembangan serta perbandingan penduduk miskin antardaerah. Namun, data makro tersebut mempunyai keterbatasan karena hanya bersifat indikator dampak yang dapat digunakan untuk target sasaran geografis, tetapi tidak dapat digunakan untuk target sasaran individu rumah tangga atau keluarga miskin. Untuk target sasaran rumah tangga miskin, diperlukan data mikro yang dapat menjelaskan penyebab kemiskinan secara lokal, bukan secara agregat seperti melalui model-model ekonometrik.

Proses pendataan memiliki masalah yaitu pada keakuratan pendataan dan kemampuan setiap instansi dalam melakukan pendataan. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia (CIA World Factbook 2004), dengan luas daratan 1.922.570 km² dengan 17.504 pulau (data tahun 2004) dan terrain yang bermacam-macam yang tentu saja menyulitkan akses terutama pada daerah-daerah terpencil. Ini juga merupakan salah satu alasan kenapa diperlukan kerjasama dari semua pihak dalam melakukan pendataan.

Proses pendataan ulang pun ternyata masih kurang baik, akibat kurangnya sumberdaya dan sistem informasi yang baik, pendataan masih dilakukan dalam hitungan tahun dan bukan bulan pada negara-negara lain. Akibatnya hasil dari sebuah kebijakan dan perubahan ekonomi tak dapat dilihat pengaruhnya dengan jelas terhadap angka kemiskinan. Faktor budaya ternyata juga berpengaruh terhadap proses pendataan ini. Masyarakat Indonesia cenderung menganggap persoalan finansial sebagai persoalan yang tabu untuk diungkap dan cenderung menolak untuk memberikan informasi yang benar.

Tujuan:

Berkaitan dengan penerapan otonomi daerah sejak tahun 2001, data dan informasi kemiskinan yang ada sekarang perlu dicermati lebih lanjut, terutama terhadap manfaatnya untuk perencanaan lokal. Strategi untuk mengatasi krisis kemiskinan tidak dapat lagi dilihat

dari satu dimensi saja (pendekatan ekonomi), tetapi memerlukan diagnosa yang lengkap dan menyeluruh (sistemik) terhadap semua aspek yang menyebabkan kemiskinan secara lokal.

Data dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan serta pencapaian tujuan atau sasaran dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat nasional, tingkat kabupaten/kota, maupun di tingkat komunitas.

Masalah utama yang muncul sehubungan dengan data mikro sekarang ini adalah, selain data tersebut belum tentu relevan untuk kondisi daerah atau komunitas, data tersebut juga hanya dapat digunakan sebagai indikator dampak dan belum mencakup indikator-indikator yang dapat menjelaskan akar penyebab kemiskinan di suatu daerah atau komunitas.

Yang menjadi permasalahan juga bahwa ketika bantuan ini tak tepat sasaran, ketika seseorang yang mampu ternyata mendapat bantuan dimana masih banyak orang yang membutuhkan justru tak mendapatkannya. Karena hal inilah sebenarnya data mengenai kemiskinan sangat penting. Diperlukan suatu kesatuan dan koordinasi antar lembaga dan instansi yang terkait masalah penanggulangan kemiskinan ini. Sebuah standar kemiskinan yang sama, proses yang saling terkoordinasi dan kerjasama yang saling bahu-membahu, sebuah proses dengan sistem informasi yang baik dan frekuensi yang efektif. Sebuah kemajuan besar bagi perang melawan kemiskinan bila hal ini dapat terwujud.

Dalam proses pengambilan keputusan diperlukan adanya indikator-indikator yang realistis yang dapat diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan dan program yang perlu dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan. Indikator tersebut harus sensitif terhadap fenomena-fenomena kemiskinan atau kesejahteraan individu, keluarga, unit-unit sosial yang lebih besar, dan wilayah.

Parameter:

Kajian secara ilmiah terhadap berbagai fenomena yang berkaitan dengan kemiskinan, seperti faktor penyebab proses terjadinya kemiskinan atau pemiskinan dan indikator-indikator dalam pemahaman gejala kemiskinan serta akibat-akibat dari kemiskinan itu sendiri, perlu dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota dengan dibantu para peneliti perlu mengembangkan sendiri sistem pemantauan kemiskinan di daerahnya, khususnya dalam era otonomi daerah sekarang. Para peneliti tersebut tidak hanya dibatasi pada disiplin ilmu ekonomi, tetapi juga disiplin ilmu sosiologi, ilmu antropologi, dan lainnya.

Langkah:

Ukuran-ukuran kemiskinan yang dirancang di pusat belum sepenuhnya memadai dalam upaya pengentasan kemiskinan secara operasional di daerah. Sebaliknya, informasi-

informasi yang dihasilkan dari pusat tersebut dapat menjadikan kebijakan salah arah karena data tersebut tidak dapat mengidentifikasi kemiskinan sebenarnya yang terjadi di tingkat daerah yang lebih kecil. Oleh karena itu, di samping data kemiskinan makro yang diperlukan dalam sistem statistik nasional, perlu juga diperoleh data kemiskinan (mikro) yang spesifik daerah. Namun, sistem statistik yang dikumpulkan secara lokal tersebut perlu diintegrasikan dengan sistem statistik nasional sehingga keterbandingan antarwilayah, khususnya keterbandingan antarkabupaten dan provinsi dapat tetap terjaga.

Dalam membangun suatu sistem pengelolaan informasi yang berguna untuk kebijakan pembangunan kesejahteraan daerah, perlu adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam penyediaan dana secara berkelanjutan. Dengan adanya dana daerah untuk pengelolaan data dan informasi kemiskinan, pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi pemborosan dana dalam pembangunan sebagai akibat dari kebijakan yang salah arah, dan sebaliknya membantu mempercepat proses pembangunan melalui kebijakan dan program yang lebih tepat dalam pembangunan.

Keuntungan yang diperoleh dari ketersediaan data dan informasi statistik tersebut bahkan bisa jauh lebih besar dari biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan pengumpulan data tersebut. Selain itu, perlu adanya koordinasi dan kerja sama antara pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder), baik lokal maupun nasional atau internasional, agar penyaluran dana dan bantuan yang diberikan ke masyarakat miskin tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

Ketersediaan informasi tidak selalu akan membantu dalam pengambilan keputusan apabila pengambil keputusan tersebut kurang memahami makna atau arti dari informasi itu. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kemampuan teknis dari pemimpin daerah dalam hal penggunaan informasi untuk manajemen.

Sebagai wujud dari pemanfaatan informasi untuk proses pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan pembangunan di daerah, diusulkan agar dilakukan pemberdayaan pemerintah daerah, instansi terkait, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pemanfaatan informasi untuk kebijakan program. Kegiatan ini dimaksudkan agar para pengambil keputusan, baik pemerintah daerah, dinas-dinas pemerintahan terkait, perguruan tinggi, dan para LSM, dapat menggali informasi yang tepat serta menggunakannya secara tepat untuk membuat kebijakan dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai.

Pemerintah daerah perlu membangun sistem pengelolaan informasi yang menghasilkan segala bentuk informasi untuk keperluan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan yang sesuai. Perlu pembentukan tim teknis yang dapat

menyarankan dan melihat pengembangan sistem pengelolaan informasi yang spesifik daerah. Pembentukan tim teknis ini diharapkan mencakup pemerintah daerah dan instansi terkait, pihak perguruan tinggi, dan peneliti lokal maupun nasional, agar secara kontinu dapat dikembangkan sistem pengelolaan informasi yang spesifik daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu disadari bahwa walaupun kebutuhan sistem pengumpulan data yang didesain, diadministrasikan, dianalisis, dan didanai pusat masih penting dan perlu dipertahankan, sudah saatnya dikembangkan pula mekanisme pengumpulan data untuk kebutuhan komunitas dan kabupaten.

Salah satu langkah konkret lagi dalam menangani masalah data ini adalah menciptakan sebuah *Single Identity Number* bagi setiap masyarakat Indonesia. Seperti kita ketahui, saat ini terjadi kekacauan dalam hal identitas, banyak masyarakat yang masih belum memiliki KTP, dan sebaliknya banyak masyarakat yang memiliki KTP lebih dari satu. Jika SIN ini dapat terintegrasi dengan baik, tentu penanganan kemiskinan akan berjalan lebih mudah dan tepat.

Mekanisme pengumpulan data ini harus berbiaya rendah, berkelanjutan, dapat dipercaya, dan mampu secara cepat merefleksikan keberagaman pola pertumbuhan ekonomi dan pergerakan sosial budaya di antara komunitas pedesaan dan kota, serta kompromi ekologi yang meningkat.

di Bidang Pengangguran

Kebijakan 1:

“Memasukkan *entrepreneurship* dan *softskill* dalam kurikulum di setiap jenjang pendidikan”

Tujuan: Membentuk kreativitas dan jiwa kemandirian di dalam diri setiap anak bangsa

Parameter:

3. Minimal 30% dari jumlah sekolah formal di setiap tingkatan di setiap daerah tingkat II (Kabupaten/Kota) menerapkan kurikulum tersebut
4. Minimal 30% dari penduduk yang berusia 17-24 tahun di daerah tingkat I (Provinsi) memiliki usaha sendiri

Langkah-langkah:

5. Satu tahun pertama, berupa sosialisasi dan memastikan tiap sekolah memasukkan kurikulum tersebut.

6. Tiga tahun berikutnya, memastikan program telah berjalan dan menghasilkan *entrepreneur* sesuai dengan target.
7. Tahun terakhir, evaluasi program
8. Tahun pertama sampai dengan tahun kelima, pengawasan berkelanjutan

Kebijakan 2:

“Pemberian bantuan modal usaha disertai pelatihan keterampilan bagi pengangguran terbuka”

Tujuan: Mengurangi jumlah pengangguran yang ada secara langsung

Parameter: Turunannya tingkat pengangguran hingga 5% pada tahun 2014

Langkah-langkah:

5. Pendataan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) dan pelaksanaan pelatihan keterampilan oleh Balai Latihan Kerja (BLK).
6. Optimalisasi pendanaan melalui program pemerintah yang sudah ada seperti: Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
7. Melakukan pengawasan dalam penyaluran dana dan pelaksanaan program.
8. Melakukan evaluasi tahunan.

Kebijakan 3:

”Meningkatkan partisipasi tenaga kerja Indonesia dalam setiap investasi dalam negeri”

Tujuan: Memaksimalkan potensi tenaga kerja Indonesia di negeri sendiri

Parameter: Mewajibkan setiap investor untuk melibatkan minimal 70% tenaga kerja dalam negeri dari keseluruhan tenaga kerja yang digunakan.

Langkah:

Pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Bab VI (Ketenagakerjaan) Pasal 10 ayat 1-4.

(1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.

(2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan 4:

“Optimalisasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Industri Kreatif”

Tujuan:

3. Memberdayakan potensi UMKM dan Industri Kreatif berbasis sektoral di setiap daerah
4. Meningkatkan *market share* dan daya saing produk UMKM dan Industri Kreatif

Parameter:

Komposisi pendapatan dari UMKM dan Industri Kreatif dalam PDRB meningkat

Langkah:

4. Pemetaan potensi setiap daerah untuk dikembangkan.
5. Memperkuat posisi UMKM dan Industri Kreatif dengan kelembagaan yang kuat.
6. Memberikan insentif (bagi UMKM dan Industri Kreatif) berbasis kinerja.

di Bidang Energi

- Menata kembali kebijakan energi nasional untuk mewujudkan ketahanan energi nasional
 - Revisi UU Migas No. 22 Tahun 2001
 - Restrukturisasi kontrak karya dan merevisinya menjadi sistem balas jasa dan/atau sistem *production sharing contract*
 - Meninjau kembali peran, fungsi, dan efektivitas BP Migas dan BPH Migas

- Adanya upaya peningkatan kompetensi Pertamina sebagai BUMN oleh pemerintah

Tujuan : Memastikan pemerintah Indonesia sebagai penguasa utama dalam pengelolaan energi nasional demi kemakmuran rakyat.

Parameter : Dilaksanakannya *point - point* diatas dalam pemerintahan 2009 – 2014.

- Memprioritaskan dan mewujudkan secara nyata pencapaian diversifikasi energi sesuai dengan *blueprint* pengembangan energi nasional
 - Mendorong pengembangan industri yang menggunakan dan/atau memproduksi energi terbarukan
 - Menyediakan transportasi publik berbasis energi alternatif oleh pemerintah daerah
 - Memberikan insentif bagi tiap-tiap daerah untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber energi terbarukan sesuai dengan Sumber Energi Setempat (SES). Sebagai langkah implementatif, seperti meningkatkan pemberdayaan pemerintah daerah melalui pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi wilayah yang mengembangkan sumber daya energi terbarukan

Tujuan : Meningkatkan keamanan dan akses masyarakat terhadap energi.

Parameter : Terpenuhinya target - target produksi yg terdapat pada blue print energy nasional, meliputi sumber energi Brown Coal liquefaction, energi panas bumi, tenaga angin, nuklir, Biodiesel, Gasohol, Bio Oil, dan Tenaga Surya

- Meningkatkan investasi terhadap pengembangan energi terbarukan dan tidak terbarukan

- Memberlakukan sistem insentif bagi produsen dan konsumen energi yang melakukan diversifikasi dan penghematan energi. Insentif dapat berupa penghapusan pajak dan penyederhanaan birokrasi.

Tujuan : Mencapai target diversifikasi energi

Parameter : Terpenuhinya sasaran target produksi energi nasional.

- Melakukan mekanisme dikotomi harga energi antara pasar domestik (sesuai *cost production*) dan pasar global (*floating price*)
 - Dengan demikian dikotomi akan mampu mengalihkan pendapatan pemerintah ke arah penelitian dan pengembangan energi
 - Dikotomi harga juga akan menjamin harga energi dalam negeri yang stabil

Tujuan : Dimanfaatkannya energi sebagai komoditas utama penghasil devisa negara sekaligus sebagai kebutuhan publik yang harus dipenuhi.

Parameter : Adanya perbedaan harga antara pasar domestik dan pasar global.

- Memprioritaskan penelitian dan pengembangan teknologi energi
 - Merealisasikan penelitian dalam pengembangan energi sesuai target *blueprint* energi.
 - Mewujudkan kerjasama (bilateral, regional, multilateral) dalam hal penelitian dan pengembangan teknologi berbasis hubungan mutualisme
 - Pembangunan *platform clean technology* yang tepat dan jelas
 - Pembangunan teknologi infrastruktur eksplorasi dan distribusi energi

Tujuan : Terwujudnya teknologi yang mampu mengoptimalkan sumber - sumber energi potensial yang ada di Indonesia.

Parameter : Terealisasinya target pengembangan infrastruktur energi dan pengembangan teknologi sesuai blue print energy nasional

Quote pasal 30 UU no. 30 tahun 2007 “Pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian tentang energi baru dan energi terbarukan dibiayai dari pendapatarl negara yang berasal dari energi tak terbarukan.”

di Bidang Ketahanan Pangan

3. Mewujudkan Reformasi Agraria

Definisi

Merupakan kebijakan yang mengatur pemerataan dalam kepemilikan lahan. Di indonesia pelaksanaan reformasi agraria didasarkan pada UU No. 5 tahun 1960.

Tujuan:

1. Mengurangi jumlah petani gurem.
2. Menciptakan sistem kepemilikan lahan yang adil bagi petani.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan yang ada untuk kegiatan produktif.
4. Meningkatkan hasil produksi pertanian.
5. Meningkatkan kesejahteraan petani.
6. Merapihkan sistem admistrasi pertanahan dengan mengurangi monopoli kepemilikan dan spekulasi lahan.

Reformasi agraria sudah dicanangkan sejak tahun 1960 dengan dikeluarkannya UU No. 5 tahun 1960. Namun, kebijakan tersebut belum memberikan hasil yang signifikan. menurut hasil pendataan usaha tani yang dilakukan oleh BPS 2009, sebanyak 63% petani di Indonesia merupakan petani gurem yang kepemilikan lahannya kurang 0,25 Ha. Minimnya lahan akan berpengaruh langsung terhadap jumlah hasil pertanian dan kesejahteraan petani.

Oleh karena itu, menggiatkan kembali reformasi agraria sangat perlu untuk menciptakan pertanian yang maju, mengurangi kemiskinan, dan selanjutnya mewujudkan ketahanan pangan.

Parameter

1. Terciptanya pemakaian sumber daya lahan untuk kegiatan yang produktif.
2. Berkurangnya jumlah petani gurem secara signifikan.

Langkah-langkah

- c. Menetapkan pajak lahan yang progresif terhadap jumlah lahan yang menganggur, artinya semakin luas lahan yang menganggur, semakin tinggi juga pajak yang harus dibebankan terhadap pemilik lahan.
- d. Realisasi program pendistribusian lahan gratis kepada petani gurem, yaitu: Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAM).

Sebagai penyempurnaan terhadap Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAM), pendistribusian lahan terhadap petani sebaiknya dilakukan secara simultan dengan sistem kredit bunga lunak.

2. Menjadikan desa sebagai fokus pembangunan

Pemerintah harus menjadi agen pembangunan yang aktif, baik secara langsung maupun tidak. Adapun pembangunan yang dimaksud dalam konteks ini mencakup pembangunan dalam bentuk material dan non-material.

Pembangunan material dilakukan dengan membangun fasilitas pertanian terkait dari tahap *on-farm* hingga *off-farm* (pasca pertanian). Fasilitas pada tingkat *on-farm* mencakup infrastruktur pendukung seperti irigasi, jalan raya, hingga komunikasi (aksesibilitas terhadap telepon yang dapat digunakan oleh petani dalam memasarkan produk).

Pembangunan non-material: yakni penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya masyarakat desa (human capital). Proses tersebut dapat dicapai melalui implementasi program pelatihan, penyuluhan, hingga pembangunan lembaga-lembaga pendidikan formal, sejak jenjang pendidikan dasar hingga tinggi. Pembangunan non-material lainnya adalah pembangunan lembaga desa yang multifungsi. Lembaga ini dapat berfungsi sebagai intermediator antara petani dengan pemilik dana (seperti bank, blockgrant pemerintah ataupun dana CSR dan kredit perusahaan swasta).

Selain masalah kredit, lembaga ini juga harus dapat menjadi fasilitator yang membantu masalah distribusi agar petani dapat mengoptimalkan pemasarannya dan

mendapatkan harga yang layak. Lembaga ini juga akan membantu pemerintah dalam mengumpulkan data produksi pertanian dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi (karena menyentuh hingga unit-unit terkecil dalam system pertanian, seperti petani berlahan sempit). Lembaga ini pula yang akan menjadi mediasi antara pemerintah daerah dan petani agar kebijakan pemerintah dapat benar-benar mencapai targetnya. Lembaga yang membantu dalam hal modal usaha dan proses distribusi sangat krusial karena kedua hal tersebut memiliki korelasi secara langsung dengan tingkat kesejahteraan petani (melalui fungsi pendapatan).

- **Tujuan butir petisi (fokus pembangunan pedesaan):**

Selama ini pemerintah seolah hanya berfokus pada pembangunan di kota (mengingat kota memberikan kontribusi terbesar dalam pendapatan negara). Berbagai program pembangunan desa yang komprehensif memang telah dibuat oleh pemerintah, namun kenyataannya banyak yang belum terealisasi.

- **Parameter keberhasilan:**

- a. Pembangunan materiil:**

- Terbangunnya lebih banyak irigasi (sawah tadah hujan berkurang)
 - Kondisi jalan di pedesaan membaik
 - Jaringan telepon dan listrik di desa banyak terbangun
 - Lembaga pendidikan (sekolah) terbangun

- b. Pembangunan non-materiil:**

- Terbangunnya lembaga multifungsi yang benar-benar menjadi intermedator (perpanjangan tangan pemerintah pusat, daerah kepadapetani).

3. Menggalakkan diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal

Pangan merupakan kebutuhan dasar setiap individu. Tanaman pangan yang merupakan penghasil utama karbohidrat memiliki permasalahan yang cukup rumit, terutama

jika dihubungkan dengan komoditas beras yang juga memiliki dimensi politik. Diversifikasi pangan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut.

Diversifikasi pangan dapat diartikan sebagai pergeseran konsumsi sumberdaya komoditas pangan tertentu kepada komoditas pangan lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan alternatif pilihan komoditas pangan menjadi lebih beragam, seperti komoditas padi kepada jagung, ubi jalar, atau ubi kayu. Kemandirian pangan pun akan tercipta di seluruh pelosok daerah karena setiap masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pangan tanpa adanya ketergantungan terhadap pihak asing. Lebih jauh lagi, intervensi pihak asing terhadap bangsa ini dapat dicegah demi keberlangsungan NKRI. Diversifikasi pangan yang digalakkan harus diawasi dengan baik karena pergeseran ini berpotensi meningkatkan konsumsi terigu (gandum) di dalam negeri dengan berbagai produk olahannya, seperti kue, mie, dan biskuit. Kecenderungan masyarakat terhadap komoditas cepat saji (*instan*), terutama kaum muda, merupakan penyebab utama meningkatnya konsumsi terigu di Indonesia. Sebenarnya, permasalahan ini pun dapat diselesaikan jika pemerintah bekerjasama dengan *stakeholders* lainnya menekuni pengembangan agribisnis gandum lokal yang cukup adaptif di Indonesia. Pelaksanaan diversifikasi pangan harus dimulai dari pihak pemerintah untuk memberikan sebuah kebijakan yang tepat dan akurat. Sebagai langkah awal, media massa pun dapat menjadi partner yang baik dalam perubahan citra pola makan masyarakat non-beras, bukan menganggap masyarakat yang mengkonsumsi komoditas non-beras (ubi jalar, ubi kaya, singkong, dll) sebagai masyarakat yang memiliki kerawanan pangan.

4. Membangun sistem pertanian yang terintegrasi (Agriculture to Agribusiness) dan Berkelanjutan

Indonesia terkenal sebagai negara agraris, namun seiring dengan berjalannya waktu, gelar yang ada seolah hilang ditelan zaman. Berbagai permasalahan yang muncul di bidang pertanian menyebabkan munculnya permasalahan struktural yang membutuhkan penanganan secara intensif dan komprehensif.

Berdasarkan isu dan permasalahan pembangunan perdesaan yang terjadi, pembangunan sistem pertanian secara terintegrasi diharapkan menjadi alternatif solusi untuk mengembalikan citra Indonesia sebagai negara agraris. Jika selama ini kita berkutat dengan sistem pertanian konvensional yang mengedepankan sistem tradisional, sekarang sudah saatnya kita menciptakan nilai tambah terhadap produk pertanian yang ada.

Pengembangan kawasan agropolitan merupakan salah satu alternatif solusi untuk mewujudkan sistem pertanian yang terintegrasi. Kawasan agropolitan disini diartikan sebagai sistem fungsional desa-desa yang ditunjukkan dari adanya hirarki keruangan desa yakni dengan adanya pusat agropolitan dan desa-desa di sekitarnya. Disamping itu, Kawasan agropolitan ini juga dicirikan dengan kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis di pusat agropolitan yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya

Dengan adanya implementasi konsep ini diharapkan kawasan pedesaan akan berkembang sesuai dengan keunikan lokal. Kemudian, pengembangan kawasan agropolitan dapat meningkatkan pemerataan mengingat sektor yang dipilih merupakan basis aktifitas masyarakat dan yang pada akhirnya akan menciptakan keunggulan kompetitif dan komparatif produk pertanian yang ada.

Disisi lain proses ekstensifikasi dan intensifikasi demi peningkatan output produksi merupakan hal yang lumrah dalam proses pembangunan pertanian, Namun, proses ini juga harus dilandasi dengan kesinambungan pembangunan dengan mempertimbangkan kesuburan tanah dan daya dukung lingkungan..

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah pergeseran kultur pertanian dari penggunaan pupuk organik menjadi pupuk anorganik yang berpotensi berdampak buruk pada masa depan pertanian. Intensitas kesuburan dan kualitas tanah akan berkurang seiring dengan penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan. Oleh karena itu diperlukan sebuah gerakan kembali kepada penggunaan pupuk organik sebagai tindakan preventif terhadap ancaman berkurangnya tingkat kesuburan tanah dan daya dukung lingkungan. Namun, proses transisi ini tidak dapat dilakukan secara radikal, melainkan proses penyesuaian bertahap (komposisi penggunaan pupuk anorganik dikurangi sedikit demi sedikit dan disubstitusikan dengan pupuk organik).

5. Membangun komitmen dan sinergisitas antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di bidang pertanian.

Sebuah Komitmen dan sinergisitas harus dipegang teguh oleh antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Program-program serta kebijakan untuk pembangunan ketahanan pangan yang dibuat oleh pemerintah pusat harus tersalurkan secara optimal ke pemerintah daerah dan diteruskan ke masyarakat yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Butuh komitmen besar dari pemerintah pusat terkait pembangunan pertanian khususnya

ketahanan pangan. Seperti yang kita ketahui bahwa RAPBN 2010 anggaran pertanian hanyalah 8 Triliun rupiah dan ini menempati urutan ke 10. Hal ini menunjukkan kurangnya keseriusan dan komitmen pemerintah pusat terhadap pembangunan pertanian demi terciptanya ketahanan pangan.

Komitmen Pemerintah daerah untuk mengembangkan pertanian harus didahulukan untuk menciptakan ketahanan pangan pada daerahnya masing-masing. Dengan terciptanya ketahanan pangan secara daerah maka secara menyeluruh akan menciptakan ketahanan pangan Indonesia.

Tercapainya komitmen dan sinergisitas antar pemerintah pusat dan daerah dimaksudkan agar seluruh kelembagaan pemerintah dapat menjalankan program dan kebijakan secara optimal dan sesuai yang diharapkan tanpa terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan bangsa dan Negara ini. Salah satu indikator tercapainya komitmen dan sinergisitas antar pemerintah pusat dan daerah adalah semua lapisan masyarakat dapat mengerti dan merasakan akan kebijakan dan program pemerintah secara komprehensif yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk menciptakan kondisi yang sinergis dan komitmen yang tinggi antar pemerintah pusat dan daerah, cukup dengan keseriusan, reformasi birokrasi, serta rasa dedikasi yang tinggi untuk bangsa dan Negara tanpa mementingkan kepentingan pribadi dan golongan maka pembangunan pertanian khususnya ketahanan pangan akan tercapai dengan apa yang kita harapkan bersama.

6. Menjalin kemitraan antar *stakeholder* di bidang pertanian

Definisi:

Terciptanya hubungan antara pihak pemerintah yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan instansi-instansi lain seperti instansi pendidikan, pihak swasta serta masyarakat.

Tujuan:

Tujuan dari terjalinnya kemitraan antar para *stakeholder* adalah agar tidak terjadi ketimpangan antara perumus kebijakan, dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan para pelaku kebijakan di lapangan, mulai dari masyarakat, instansi pendidikan, serta pihak swasta. Dengan adanya kemitraan ini, maka kebijakan yang telah dirumuskan tidak hanya menjadi kebijakan formal di atas kertas tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata oleh para *stakeholder* lain di lapangan. Dengan adanya

kemitraan juga, diharapkan antar para *stakeholder* bisa tercipta mekanisme saling koreksi terhadap kewajiban-kewajiban yang seharusnya mereka lakukan untuk kepentingan pembangunan pertanian.

Selain itu, mengingat ranah dari sektor pertanian yang sangat luas serta kompleksitas masalah yang ada pada sektor ini, maka kemitraan mutlak diperlukan, agar penanganan masalah pertanian tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja tetapi berbagai pihak dan ada spesialisasi dalam penyelesaian masalah yang ada sehingga upaya yang dilakukan oleh para *stakeholder* akan lebih efektif dan efisien.

Parameter:

- Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah mendukung para *stakeholder* lain agar bisa menggiatkan dan memajukan pertanian di suatu daerah.
- Tersalurkannya para penyuluh-penyuluh pertanian dari instansi-instansi pendidikan seperti dari perguruan tinggi maupun staff ahli pertanian ke wilayah-wilayah pedesaan untuk mendampingi para petani di wilayah yang bersangkutan. Pendampingan harus berjalan secara berkelanjutan dan dilakukan evaluasi berkala.
- Program CSR yang bertujuan untuk pembangunan pertanian bisa dilakukan secara berkesinambungan sehingga efek yang diharapkan, yaitu ketahanan pangan, bisa tercapai. Program dapat berbentuk pinjaman modal dari perusahaan swasta kepada petani ataupun kredit tanah.
- Adanya dukungan masyarakat untuk melaksanakan program-program yang dianjurkan serta pelaksanaan dari saran-saran yang diajukan oleh para penyuluh.

Langkah-langkah yang harus dicapai:

- Mengoptimalkan program sarjana pendamping petani.
- Perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan pertanian dan atau menggunakan sumber daya pertanian harus melakukan kegiatan CSR yang berkaitan dengan pembangunan pertanian.
- Pengoptimalan kinerja BULOG. Dalam hal ini pemerintah daerah dan masyarakat bisa melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh BULOG.

- Perumusan kebijakan oleh pemerintah yang memudahkan penyuluh pertanian serta program CSR bisa berkontribusi untuk kemajuan pertanian.
- Penyuluhan yang dilakukan serta program CSR yang dilakukan tidak hanya menyangkut teknis cara bertani tetapi juga melingkupi pendampingan untuk peningkatan mutu SDM serta pembangunan lembaga-lembaga pertanian.
- Pengalokasian dana untuk pertanian yang adil.
- Revitalisasi koperasi sebagai focus utama dalam pembangunan pertanian.

di Bidang Pelayanan dan Barang Publik

1. Menjadikan Pemberantasan korupsi di ranah pelayanan publik sebagai agenda utama Pemerintahan 2009-2014
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU Pelayanan Publik Nomor 25 tahun 2009 serta UU lain yang terkait.
3. Mereformasi dan memperkuat lembaga penegak hukum di Indonesia.
4. Memastikan setiap daerah memiliki dan mengimplementasikan perda tentang pelayanan publik
5. Memastikan adanya ombudsman (lembaga pengawas pelayanan publik) pada setiap daerah tingkat II di seluruh Indonesia.
6. Mengalokasikan dana pelayanan publik sesuai dengan skala prioritas dan kepentingan publik.
7. Memberikan jaminan kemudahan akses pelayanan publik yang berkualitas kepada rakyat miskin di Indonesia.
8. Meningkatkan kualitas input SDM aparatur pelayanan publik. Mis: mengadakan kerjasama pemerintah dengan perguruan tinggi.

9. Menerapkan konsep workplace spirituality dan Total Quality Management (TQM) yang didasarkan pada nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai social budaya untuk meningkatkan profesionalisme aparatur pelayanan publik.
10. Mengupayakan Penerapan Teknologi Informasi disetiap unit penyedia pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi, komunikasi dan koordinasi demi mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan mampu bersaing di era perdagangan bebas

Permasalahan Pelayanan Publik dalam Birokrasi (bad governance):

1. Profesionalisme Aparatur Negara dalam penyediaan pelayanan publik, dalam hal:
 - * kedisiplinan
 - * integritas
 - * kompetensi
 - * inisiatif
2. Budaya KKN/korupsi yang menggerogoti birokrasi
3. Kurangnya kontrol terhadap kinerja aparatur

Solusi Mengatasi Permasalahan Pelayanan Publik dalam Birokrasi (bad governance):

1. Penerapan konsep workplace spirituality untuk meningkatkan profesionalisme aparatur pelayanan publik
 2. Meningkatkan kualitas input SDM aparatur pelayanan publik. Mis: mengadakan kerjasama pemerintah dengan perguruan tinggi
 3. Pemberantasan korupsi menjadi agenda utama Pemerintahan 2009-2014, diantaranya mereformasi lembaga dan mekanisme penegakan hukum
 4. Pembentukan KPAN (Komisi Pengawasan Aparatur Negara)
-
- Sedangkan untuk pembahasan masalah infrastruktur, bahasan dikerucutkan dalam Ruang lingkup pembahasan infrastruktur, yaitu memfasilitasi arus barang dan jasa, baik berupa ruang dan jaringan serta bersentuhan langsung dengan roda perekonomian secara signifikan.

- Sehingga permasalahan Pelayanan Publik dalam infrastruktur yang ditemui

1. Pengadaan

Proses → tidak efisien, ex: KKN

Objek → kurang dalam hal kuantitas dan kualitas

2. Pemeliharaan yang tidak baik

3. Pemerintah merasa tidak adanya kompetitor terhadap barang yang mereka monopoli, sehingga tidak adanya usaha untuk meningkatkan kualitas

- Maka solusi yang dapat ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan Pelayanan Publik dalam infrastruktur di Indonesia yaitu:

1. Pengadaan dan pemeliharaan barang publik yang transparan dan bebas dari KKN serta mark up harga melalui penetapan standar harga dan pengawasan oleh publik, seperti: LSM, akademisi, mahasiswa, dll
2. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya terkait pelayanan publik.

di Bidang Pendidikan dan Kesehatan

4. Realisasikan anggaran 20% APBN untuk pendidikan(di luar komponen gaji guru, dosen, dan sekolah kedinasan).

Tujuan Kebijakan: untuk meningkatkan akses atas pendidikan dan standar kualitas atas pendidikan yang berlaku menyeluruh dan non-diskriminasi.

Parameter: telah terpenuhinya 20% anggaran pendidikan dari APBN.

Langkah-langkah:

1. Optimalisasi anggaran pendidikan dengan cara mengurangi pengeluaran Negara yang dirasa tidak perlu, misalnya mengurangi tunjangan anggota dewan terkait kunjungan ke daerah, ke luar negeri atau tunjangan lain yang dirasa di luar kewajaran masyarakat.

2. Memisahkan biaya pendidikan dengan biaya administratif yang dibebankan pada 20% anggaran pendidikan seperti gaji/tunjangan guru dan tenaga kependidikan, serta biaya operasional dan investasi (sudah termasuk perhitungan gaji/tunjangan guru dan tenaga kependidikan)
 3. Restrukturisasi hutang luar negeri guna meningkatkan APBN yang kemudian dapat di gunakan untuk meningkatkan anggaran pendidikan.
5. Ciptakan sistem pengawasan yang efektif guna menekan kebocoran anggaran Negara di sektor pendidikan.

Tujuan kebijakan: Terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran pendidikan.

Parameter: Realisasi sesuai alokasi anggaran yang telah ditetapkan pemerintah

Langkah-langkah:

1. Membentuk sebuah tim audit khusus (internal) yang bertugas mengawasi alokasi anggaran APBN untuk pendidikan.
 2. Menetapkan dan menjalankan sistem monitoring dan evaluasi berkala pengelolaan dana pendidikan di pusat dan daerah.
 3. Menjalin hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah lewat pembangunan sistem pendanaan pendidikan yang transparan
 4. Menjalankan *performance based audit* dalam kinerja setiap lembaga pendidikan
6. Realisasikan Standar Nasional Pendidikan dalam hal kurikulum, insfrastruktur serta kualitas tenaga Pendidik guna pengembangan pendidikan di tiap-tiap daerah.

Tujuan: Mewujudkan pemerataan standar pendidikan di Pusat dan Daerah

Parameter: Terwujudnya standar pendidikan yang berlaku secara nasional.

Langkah-langkah:

- c. Menetapkan standar minimum pendidikan nasional terkait sesuai dengan PP No.65 Tahun 2005 demi meningkatkan kualitas pendidikan

- d. Revisi standar yang digunakan sebagai basis perhitungan biaya agar tidak terlalu mahal dan rancu dalam hal pelaksanaannya. Selama ini pemerintah daerah hanya memenuhi Standar Pelayanan Minimal dan tidak wajib mengikuti Standar Nasional Pendidikan.

4. Tingkatkan kualitas dan kesejahteraan guru

Tujuan: Meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, terutama tenaga kerja honorer

Parameter: Meningkatnya human development index Indonesia (HDI), menurunnya jumlah tenaga pendidik yang memiliki pekerjaan sampingan selain di bidang akademik.

Langkah- langkah:

- c. Menetapkan standar gaji tenaga pendidik (Remunerasi gaji guru dan dosen)
- d. Memberikan insentif kepada tenaga pendidik yang berprestasi, sebagai stimulus untuk memacu peningkatan kinerja dan prestasi tenaga pendidik secara keseluruhan

Kesehatan

1. Meningkatkan sumber pembiayaan kebijakan di sektor kesehatan.

Tujuan: Menambah sumber pembiayaan untuk mendanai program-program penanggulangan maupun program-program pencegahan

Parameter: Alokasi anggaran di bidang kesehatan mencapai 5% hingga 15% dari PDB dan dapat mendanai klaim-klaim asuransi kesehatan termasuk program-program kesehatan pemerintah

1. Melakukan kajian mendalam mengenai kebutuhan dana untuk memenuhi program-program kesehatan pemerintah.
2. Peningkatan alokasi anggaran untuk kesehatan setidaknya 5% dari PDB/15% dari APBN.
3. Naikkan cukai rokok karena rokok merupakan salah satu penyumbang biaya kesehatan.

4. Mewujudkan SJSN yang merupakan sebuah asuransi bersifat universal sehingga mengurangi beban anggaran Negara dalam APBN
5. Memberikan regulasi dan insentif fiskal bagi perusahaan-perusahaan agar memiliki program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam program kesehatan masyarakat, melihat kecenderungan CSR yang masih terfokus di bidang pendidikan.
2. Ubah fokus kebijakan pemerintah di bidang kesehatan yang awalnya kuratif menjadi promotif dan preventif.

Tujuan: Menciptakan kondisi masyarakat yang sehat

Parameter: Tercapainya seluruh tujuan-tujuan dalam MDG'S yang harus dicapai tahun 2015, antara lain menurunkan tingkat malnutrisi hingga 19%, *infant mortality rate* sebesar 23 per 1000 kelahiran, *maternal mortality rate* hingga 102 per 1000 kelahiran.

Langkah –langkah:

- f. Mencanangkan kembali Visi Indonesia Sehat yang sebelumnya sudah dicanangkan tahun 1999 dan seharusnya berakhir tahun 2010 mendatang
- g. Mengembalikan kembali fungsi Puskesmas kepada fungsi utamanya yaitu memberikan penyuluhan tentang kesehatan di masyarakat tidak lagi sebagai balai pengobatan
- h. Memperbanyak iklan layanan masyarakat tidak hanya ketika ada kasus-kasus tertentu saja. Departemen Kesehatan harus mampu meningkatkan kinerja penyuluhannya dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga masyarakat setempat seperti LKMD di pedesaan, atau bekerja sama dengan kantor-kantor pemerintahan seperti kecamatan dan kelurahan
- i. Meningkatkan program – program dasar kesehatan dasar seperti pemberantasan penyakit cacangan pada anak-anak, sehingga memperbaiki kualitas intelektual anak-anak Indonesia
- j. Pemerintah mampu memonitor dan mendesak pemerintah daerah sesuai dengan otoritasnya untuk mengembangkan penyuluhan kesehatan tingkat daerah.

3. Wujudkan sistem jaminan sosial yang terintegrasi sesuai dengan amanat UU No.40 tahun tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Parameter: Berhasil mewujudkan BPJS (Badan Penyedia Jaminan Sosial) untuk mengintegrasikan progema-program jaminan akses kesehatan masyarakat

Langkah-langkah:

1. Meninjau ulang keberadaaan P.T. Askes, P.T. Asabri, P.T. Taspen, dan P.Tmm sebagai lembaga sosial
2. Melebur lembaga-lembaga penjaminan sosial yang sudah disebutkan yaitu P.T. Askes, P.T. Asabri, P.T. Taspen, dan P. kedalam suatu badan yang terintegrasi yang nantinya berbentuk BPJS.
3. Memastikan BPJS berfungsi sebagai suatu lembaga jaminan kesehatan sosial yang non-profit yang sifatnya universal.
4. Mengevaluasi keberadaan lembaga-lembaga jaminan kesehatan seperti perusahaan asuransi lain diluar BPJS sebagai lembaga swasta yang tetap diawasi oleh pemerintah dalam menentukan premi dan kepastian pemenuhan klaimnya.
5. Setiap warga Negara wajib mengikuti SJSN sehingga terkumpul iuran sebagai sumber pendanaan
6. Mewujudkan suatu standar mutu dan pelayanan dengan membentuk badan khusus yang mengurus hal tersebut.

Daftar pustaka

- Moebyarto. “Involusi Pertanian dan Pemberantasan Kemiskinan”. *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*. Penerbit Kanisius. Jakarta. 2005.
- Soetjipto, Widyono. *Farmers’ Production Decision*. Lecture 8 of Agricultural Economic Course. FEUI. 2009.
- Arifin, B. 2005. *Ekonomi Kelembagaan Pangan*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Surono, Sulastri. *Dampak Globalisasi Terhadap Sektor Pertanian di Indonesia*. Bahan Kuliah Ekonomi Pertanian. FEUI. 2009.
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta : BPF
- Departemen Pertanian (Deptan). 2008. *Rencana Teknis Pengembangan Gandum*. Jakarta: Direktorat Budidaya Sereal, Deptan
- Krisnamurthi, B. 2001. *Agribisnis*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Sinar Tani.
- BPS.GO.ID